BILDUNG
Pustaka Utama

Dr. H. M. Hadi Purnomo, M. Pd

MANAJEMEN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN

MANAJEMEN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN

BILDUNG

MANAJEMEN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN

Dr. H. M. Hadi Purnomo, M. Pd

Copyright ©2017 Dr. H. M. Hadi Purnomo, M.Pd .
All rights reserved

MANAJEMEN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN
Dr. H. M. Hadi Purnomo, M. Pd

Editor: Ach. Barocky Zaimina
Desain Sampul: Ruhtata
Lay out/tata letak Isi: Tim Redaksi

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

x ii+ 154 halaman; 14 x 20 cm
ISBN: 978-602-50675-6-3

Cetakan Pertama: Januari 2017

Penerbit dan Distribusi:
Bildung Pustaka Utama
(CV. Bildung Nusantara)
Jl. Raya Pleret KM 2
Banguntapan Bantul Yogyakarta 55791
Telpn: +6281227475754 (HP/WA)
Email: bildungpustakautama@gmail.com
Website: www.penerbitbildung.com

Anggota IKAPI

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari Penerbit.

PENGANTAR PENULIS

Assalamu'alaikum warahmatullahi wa barkatuh

Buku ini adalah buku yang sudah banyak Anda temukan pada literatur lain yang membincang tentang pesantren. Isinya mungkin tak jauh beda bahkan nyaris sama, namun sudah tentu ada yang sangat berbeda, karena karya ini adalah hasil dari refleksi dan pengkajian terhadap perjalanan pesantren. Pesantren sebagai agen perubahan sosial (*social change*), yang berada dalam atmosfir modernisasi dan globalisasi, dewasa ini dituntut untuk mampu memainkan perannya secara dinamis dan proaktif. Kehadirannya diharapkan mampu membawa perubahan dan kontribusi yang berarti bagi perbaikan umat Islam, baik pada tataran intelektual teoretis maupun praktis. Pendidikan pesantren bukan sekadar proses penanaman nilai-nilai moral keagamaan guna membentengi diri dari ekses negatif globalisasi. Lebih dari itu, yang paling urgen adalah bagaimana nilai-nilai moral yang telah ditanamkan oleh pondok pesantren tersebut mampu berperan sebagai kekuatan pembebas (*liberating force*) dari himpitan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

Pesantren adalah bagian dari infrastruktur masyarakat yang secara makro telah berperan menyadarkan komunitas

masyarakat untuk memiliki idealisme, kemampuan intelektual dan perilaku mulia (*al-akhlaq al-karimah*) guna menata dan membangun karakter masyarakat yang paripurna. Ini dapat dilihat dari peran strategis pesantren yang dikembangkan dalam kultur internal pendidkan pesantren. Bukankah dunia pesantren telah lama memegang sebuah kaidah *al-muhafazhah 'ala al-qadim ash-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah* (memelihara hal-hal lama yang baik dan mengambil sesuatu yang baru dan kekinian yang lebih konstruktif). Kaidah ini merupakan legalitas yang kuat atas segala upaya rekonstruksi. Kebebasan membentuk model pesantren merupakan sebuah keniscayaan asalkan tidak terlepas dari bingkai *al-ashlah* (lebih baik). Begitu pula ketika dunia pesantren diharuskan mengadakan rekonstruksi sebagai konsekuensi dari akibat era multikulturalisme, aspek *al-ashlah* menjadi kunci yang harus dipegang. Pesantern era multi-kulturalisme berarti pesantren yang selalu tanggap terhadap perubahan zaman, berwawasan masa depan, mengajarkan ideal-ideal inklusivisme, pluralisme dan saling menghargai perbedaan.

Perkembangan pesantren begitu cepat, apalagi dengan munculnya berbagai perguruan tinggi yang ada di dalam lokasi pesantren, pesantren diharapkan mampu memberikan solusi terhadap problematika pendidikan di Indonesia yang masih "kering makna". Pendidikan di Indonesia masih terkesan berorientasi "otot dan otak" dan belum menyentuh aspek "nilai dan nurani", kalaupun ada, hanya sekadar "hiasan" saja. Nah, Perguruan Tinggi pesantren diharapkan mampu mencetak intelektual yang paham dengan tradisi seperti yang telah dikumandangkan oleh Clifford Geertz, bahwa pesantren sebagai *"cultural broker",* penjaga dan pewaris nilai-nilai tradisi yang sah atau dalam pandangan Gus Dur mampu membumikan ajaran islam yang berakar pada tradisi.

Buku ini penulis selesaikan di tengah-tengah kesibukan, tentu saja. Untuk menyelesaikan naskah ini membutuhkan waktu

yang cukup panjang. Oleh karena itu, merupakan kebahagiaan tersendiri ketika naskah ini akhirnya selesai, walaupun belum sempurna. Dan penulis harus mengatakan coretan buku ini, hanyalah urun rembuk dari pikiran-pikiran yang tidak pernah selesai, belum tuntas dan tidak akan pernah tuntas. Sekian.

Wallahu a'lam bi al-shawab.

Jember, 02 Januari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS ___v
DAFTAR ISI ___ix

BAB I PENDAHULUAN ___1

BAB II MANAJEMEN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN ___7
A. Akuntabilitas ___7
B. Manajemen Pendidikan ___12
C. Transformasi dalam Masyarakat ___18
D. Sistem Manajemen Pendidikan Pondok Pesantren ___20

BAB III DINAMIKA PESANTREN DI INDONESIA ___23
A. Definisi Pesantren ___23
B. Tujuan dan Sistem Pendidikan Islam di Pesantren ___28
C. Dasar-dasar Didirikannya Pondok Pesantren ___31
D. Tipologi Pondok Pesantren ___35
   1. Pesantren Salafi (Tradisional) ___36
   2. Pesantren Khalafi (Modern) ___36
   3. Pesantren Komprehensif ___37
E. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Pesantren ___38

1. Walisongo dan Pengaruhnya ___40
2. Masa Kerajaan Mataram ___43
3. Masa Penjajahan ___45
4. Masa Kemerdekaan dan Pembangunan ___49

BAB IV PESANTREN DAN GLOBALISASI ___53
A. Pendahuluan ___53
B. Globalisasi sebagai Tantangan ___54
C. Eksistensi Pondok Pesantren dalam Rekaman Sejarah ___60
D. Keberadaan Pesantren di Tengah Arus Globalisasi ___64
E. Kiprah Riil Pondok Pesantren ___71
F. Tantangan Global Pondok Pesantren ___72

BAB V KEPEMIMPINAN PONDOK PESANTREN ___77
A. Kepemimpinan ___77
B. Kepemimpinan Kiai Pesantren ___78
C. Asas Kepemimpinan ___80
D. Faktor-faktor dan Sifat-fifat Pemimpin ___81
E. Tipe-tipe Kepemimpinan ___82
F. Tipologi Kepemimpinan Kiai ___85

BAB VI PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN ___89
A. Pendahuluan ___89
B. Pengembangan Program ___96
C. Pengembangan Anggaran ___98
D. Prosedur dan Implementasi ___100
E. Pesantren dan Perguruan Tinggi ___104

BAB VII KURIKULUM DAN PENGAJARAN DI PESANTREN ___111
A. Pendahuluan ___111
B. Metode Pendidikan Pesantren ___112
C. Kurikulum Pendidikan Pondok Pesantren ___115
D. Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam ___116

E. Manajemen Pendidikan Islam __118
F. Manajemen Peserta Didik Pendidikan Islam __126
G. Asas-asas Kurikulum Pendidikan Islam __134
G. Ciri-ciri Kurikulum Pendidikan Islam __139
H. Prinsip Kurikulum Pendidikan Islam __140

DAFTAR PUTAKA __143
BIODATA PENULIS __153

BAB I
PENDAHULUAN

Pesantren atau pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional tertua di Indonesia. Pesantren adalah lembaga yang bisa dikatakan wujud dari proses perkembangan sistem pendidikan nasional. Menurut Nurcholis Madjid, secara historis pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman tetapi juga mengandung makna keaslian (*indigenous) I*ndonesia.[1] Karena, sebelum datangnya Islam ke Indonesia pun lembaga serupa pesantren ini sudah ada di Indonesia dan Islam tinggal meneruskan, melestarikan dan mengislamkannya. Jadi pesantren merupakan hasil penyerapan akulturasi kebudayaan Hindu-Budha dan kebudayaan Islam kemudian menjelma menjadi suatu lembaga yang kita kenal sebagai pesantren sekarang ini.

Akar historis keberadaan pesantren di Indonesia dapat dilacak jauh ke belakang, yaitu pada masa-masa awal datangnya Islam di bumi Nusantara ini dan tidak diragukan lagi pesantren intens terlibat dalam proses islamisasi tersebut. Sementara proses islamisasi itu, pesantren dengan canggihnya telah

---

[1] Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan,* (Jakarta: Paramadina, 1997), hal.3

melakukan akomodasi dan transformasi sosio-kultural terhadap pola kehidupan masyarakat setempat. Oleh karena itu, dalam prespektif historis, lahirnya pesantren bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan akan pentingnya pendidikan, tetapi juga untuk penyiaran agama Islam. Menurut M. Dawam Raharjo, hal itu menjadi identitas pesantren pada awal pertumbuhannya, yaitu sebagai pusat penyebaran agama Islam, di samping sebagai sebuah lembaga pendidikan.[2]

Pesantren merupakan sistem pendidikan tertua khas Indonesia. Ia merupakan sumber inspirasi yang tidak pernah kering bagi para pencita ilmu dan peneliti yang berupaya mengurai anatominya dari berbagai demensi. Dari kawahnya, sebagai objek studi telah lahir doktor-doktor dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari antropologi, sosiologi, pendidikan, politik, agama dan lain sebagainya. Sehingga kita melihat pesantren sebagai sistem pendidikan Islam di negeri ini yang kontribusinya tidak kecil bagi pembangunan manusia seutuhnya.

Pesantren sebagai pranata pendidikan ulama (*intelektual*) pada umumnya terus menyelenggarakan misinya agar umat menjadi *tafaqquh fiddin* dan memotifasi kader ulama dalam misi dan fungsinya debagai *warasat al anbiya*. Hal ini terus dipertahankan agar pesantren tidak tercerabut dari akar utamanya yang telah melembaga selama ratusan tahun. Kemudian muncul tuntutan modernisasi pesantren, sebagai dampak dari modernisasi pendidikan pada umumnya, tentu hal itu merupakan suatu yang wajar sepanjang menyangkut aspek teknis operasional penyelenggaraan pendidikan. Jadi, modernisasi tidak kemudian membuat pesantren terbawa arus sekularisasi karena ternyata pendidikan sekuler yang sekarang

---

[2] M. Dawam Raharjo, *Perkembangan Masyarakat dalam Perspektif Pesantren,* Pengantar dalam M. Dawam Raharjo (ed), *Pergaulan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah* (Jakarta: P3M, 1985), hal. vii.

ini menjadi *trend*, dengan balutan pendidikan moderen, tidak mampu menciptakan generasi mandiri. Sebaliknya, pesantren yang dikenal dengan tradisionalnya justru dapat mencetak lulusan yang berkepribadian dan mempunyai kemandirian. Pondok pesantren yang tersebar di pelosok-pelosok kepulauan nusantara, turut pula menyumbangkan darma bakti dalam usaha mulia *"character building"* bangsa Indonesia.[3]

Banyaknya opini negatif terhadap eksistensi pesantren, bahwa pesantren dinilai tidak responsif terhadap perkembangan zaman, sulit menerima perubahan (pembaruan), dengan tetap mempertahankan pola pendidikannya yang tradisional *(salafiyah)* pesantren menjadi semacam institusi yang cenderung ekslusif dan isolatif dari kehidupan sosial umumnya. Bahkan lebih sinis lagi ada yang beranggapan pendidikan pesantren tergantung selera kiai. Masih banyak orang yang memandang sebelah mata terhadap pesantren. Hal ini muncul karena memang banyak orang tidak mengenal dan tidak mengerti tentang pondok pesantren, sehingga mereka mempunyai penilaian yang salah terhadapnya.

Sesuai dengan Keputusan bersama Dirjen Binbaga Islam Depag dan Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor: E/83/2000 dan Nomor: 166/C/Kep/DS/2000 tentang Tentang Pedoman Pondok Pesantren Salafiyah, Pondok Tradisional yang dalam bahasa sering disebut sebagai Pesantren Salafiyah adalah salah satu tipe pondok pesantren yang menyelenggarakan pengajaran pengajian Al-Qur'an dan kitab kuning secara berjenjang atau madrasah Diniyah yang kegiatan pendidikan dan pengajarannya menggunakan kurikulum khusus pondok pesantren.

Di samping itu pula, perjalanan panjang sejarah pesantren di Indonesia di tengah kebijakan Pendidikan Nasional sejak masa

---

[3] Faisal Ismail, *Percikan Pemikiran Islam*, (Yogyakarta: Bina Usaha, 1984), hal. 69.

penjajahan hingga era awal pemerintahan Orde Baru membawa pesantren pada posisi termarjinalkan. Sehingga jika dikatakan, seandainya Indonesia tidak pernah dijajah, pondok pesantren-pondok pesantren tidaklah begitu jauh terperosok ke daerah-daerah pedesaan yang terpencil seperti sekarang, melainkan akan berada di kota-kota atau pusat kekuasaan dan ekonomi, sebagaimana terlihat pada awal perkembangan pesantren yang merupakan lembaga pendidikan agama yang amat kosmopolit dan tentunya pertumbuhan sistem pendidikan di Indonesia akan mengikuti jalur-jalur yang ditempuh oleh pondok pesantren. Sehingga perguruan tinggi di Indonesia mungkin akan mewujud dan mengikuti nama-nama dari Pondok Pesantren seperti Al-Qodiri, As-Suniyyah, An-Nurriyah, Nurul Jadid, Bustanul Faizin dan sebagainya.

Eksistensi Pesantren ternyata sampai hari ini, ditengah-tengah deru modernisasi, pesantren tetap bisa bertahan *(survive)* dengan identitasnya sendiri. Bahkan akhir-akhir ini para pengamat dan praktisi pendidikan dikejutkan dengan tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga pedidikan pondok pesantren di tanah air ini. Pertumbuhan pesantren yang semula *rural based institution* menjadi juga lembaga pendidikan urban, bermunculan juga di kota-kota besar. Di samping banyak juga pendidikan umum yang mengadopsi aspek-aspek tertentu dari sistem pendidikan pesantren seperti yang di lakukan oleh SMU Madania di Parung, SMU Insan Cendekia-nya BPPT (sekarang MA Unggulan-nya Departemen Agama RI) di Serpong, Assalam di Surakarta, ketiganya mengadopsi sistem asrama dengan menyebutnya *boarding school*. Sistem*"boarding"* tentu saja merupakan salah satu karakteristik dasar sistem pendidikan pesantren.

Satu hal lagi yang perlu kita catat bahwa tidak sedikit pemimpin-pemimpin bangsa ini, baik pemimpin yang duduk dalam pemerintahan maupun yang bukan, formal atau informal,

besar maupun kecil, dilahirkan oleh pondok pesantren, seperti KH. Abdur Rahman Wahid (gus Dur), KH. Sahal Mahfudz, KH Said Aqiel Siraj (Kang Said), Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Mahfud MD, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan sebagainya Mereka ini merupakan jebolan pesantren. Kalau demikian adanya, tidak berlebihan jika kita mengakui bahwasannya pendidikan pesantren mampu menciptakan generasi yang berinteregitas tinggi, bertanggung jawab atas ilmu yang diperolehnya-meminjam istilah pesantrennya *"berilmu amaliyah dan beramal ilmiyah",* sadar akan penciptaannya sebagai kholifah di bumi. Maksudnya manusia dijadikan kholifah dibumi dan bertugas memakmurkan atau membangun bumi ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh yang menugaskan, yaitu Allah. Sehingga akan tetap berada dalam koridor *pengabdian kepada Allah* sejalan dengan tujuan penciptaan manusia maksudnya agar manusia dan jin menjadikan tujuan akhir atau hasil segala aktivitasnya sebagai *pengabdian kepada Allah, Sang Kholiq*.

Ada beberapa nilai fundamental pendidikan pesantren yang selama ini jarang dipandang oleh kalangan yang menganggap dirinya modern, antara lain: (1) komitmen untuk *tafaquh fi ad-din*, nilai-nilai untuk teguh terhadap konsep dan ajaran agama; (2) pendidikan sepanjang waktu (*fullday school*); (3) pendidikan integratif dengan mengkolaborasikan antara pendidikan formal dan nonformal pendidikan seutuhnya, teks dan kontekstual atau teoritis dan praktis; (5) adanya keragaman, kebebasan, kemandirian dan tanggungjawab; (6) dalam pesantren diajarkan bagaimana hidup bermasyarakat.[4]

Setelah melalui beberapa kurun waktu, pesantren tumbuh dan berkembang secara subur dengan tetap menyandang ciri-

---

[4] Chabib Thoha, *Mencari Format Pesantren Salaf,* dalam *Majalah Bulanan Rindang* No. 9 Th.XXVI April 2001, hal. 87

ciri tradisionalnya. Sebagai lembaga pendidikan *indigenous*, menurut Azra, pesantren memiliki akar sosio-historis yang cukup kuat sehingga membuatnya mampu menduduki posisi yang relatif sentral dalam dunia keilmuan masyarakatnya dan sekaligus bertahan di tengah berbagai gelombang perubahan.[5]

Sejak abad ke 20 hingga hari ini, sosok dan dunia pesantren telah menarik perhatian para akademisi untuk dijadikan bahan studi dan fokus telaah ilmiahnya dan telah terbit sejumlah karya tulis-karya tulis tentang pesantren dikaji dari berbagai sudutnya.[]

---

[5] Azyurmardi Azra, *Esei-esei Intelektual Muslim & Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), hal. 87.

BAB II
AKUNTABILITAS MANAJEMEN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN

A. Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas sebenarnya sudah dikenal sejak dahulu kala. Namun skala penggunaanya di kala itu masih tidak sesering sekarang. Hanya ada beberapa pemimpin yang mungkin dianggap "bijaksana" yang mempergunakan akuntabilitas. Pada masa sekarang bentuk-bentuk organisasi utamanya organisasi pendidikan pondok pesantren berbagai macam bentuk sturktur organisasinya yang sudah dimodifikasi oleh pengelolola pesantren masing-masing. Sehingga penggunaan akuntabilitas menjadi semakin meningkat. Hal ini karena pemimpin (pengasuh pondok pesantren sebagai pendiri atau penerus) ditunjuk dan mengemban tugas masyarakat. Hal ini menjadi menarik, karena pesantren merupakan organisasi pendidikan yang unik karena bentuk dan pola mengatur organisasinya berbeda antara satu dengan lainnya.

1. Pengertian Akuntabilitas

Konsep tentang Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa inggris biasa disebut dengan *accoutability* yang diartikan sebagai "yang dapat dipertanggungjawabkan". Atau dalam kata sifat disebut sebagai accountable. Lalu apa bedanya dengan respon-

sibility yang juga diartikan sebagai "tanggung jawab". Pengertian *accountability* dan *responsibility* seringkali diartikan sama. Padahal maknanya jelas sangat berbeda. Beberapa ahli menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan birokrasi, *responsibility* merupakan otoritas yang diberikan atasan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Sedangkan *accountability* merupakan kewajiban untuk menjelaskan bagaimana realisasi otoritas yang diperolehnya tersebut.

Accountability[1] menurut *Oxford Advance Learner's Dictionary*, *Oxford University Press*, adalah *required or expected to give an explanation for one's action*. Sementara dalam Kamus Inggris Indonesia *accountability*[2] adalah keadaan untuk dipertanggung-jawabkan atau keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban. Dapat dipahami bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban seseorang atau organisasi untuk menyajikan danmelaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasan. Dalam hal ini terminologi akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian tindakan pada pencapaian tujuan.

Pertanggungjawaban (*accountability*) secara tradisional istilah tersebut memiliki makna sebagai "sebagai kemampuan untuk memberikan jawaban terhadap perilaku atau tindakan seseorang (*answerability for one`s actions or behavior*).[3] Akuntabilitas menurut Widodo didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan

---

[1] *Oxford Advance Learner's Dictionary* (Oxford: Oxford University Press, 2005), 20

[2] John M. Echols dan Hassan Shadly, *Kamus Inggris Indonesia* cetakan XIV .(Jakarta :PT Gramedia Jakarta, , 1986), 31

[3] Joseph. G. Jabbra dan O. P. Dwivedi. *Publik Service Accountability, A Comparative Perspective Connecticut* : (Kumarian Press. Inc., 1989), 5

dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggung-jawaban yang dilaksanakan secara periodik.[4]

Menurut penjelasan Inpres No. 7 Tahun 1999, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan atau hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.[5]

Sedangkan pada buku karangan Wahyudi Kumorotomo[6] menyatakan bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam administrasi publik mengandung tiga konotasi yaitu:

1. Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas, akuntabilitas berperan jika suatu lembaga harus bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan tertentu. Dalam akuntabilitas ini terbagi dua bentuk yaitu, akuntabilitas eksplisit dan akuntabilitas implisit.

2. Pertanggungjwaban sebagai sebab-akibat, muncul bila suatu lembaga diharuskan untuk mempertanggungjawabkan jalannya suatu urusan.

3. Pertanggungjawaban sebagai kewajiban, muncul apabila seseorang bertanggung jawab dalam artian kewajiban untuk melakukan sesuatu.

2. Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Dalam penyelenggaraan akuntabilitas, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:[7]

---

[4] Joko Widodo. Good Governance : *Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*. (Surabaya: Insan Cendikiawan, 2001), 30

[5] LAN dan BPKP, Modul I. *Akuntabilitas dan Good Governance*. (2000), 6

[6] Wahyudi Kumorotomo. *Etika Administrasi Negara*. Ed. 1 Cet 2. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1994), 145-147

[7] Depag RI. *Akuntabilitas Dan Good Governance*. (Jakarta : Sekretariat Jenderal Biro Organisasi Dan Tatalaksana, 2006), 11

a. Harus ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf;

b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin kegunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran;

d. Harus berorientasi kepada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;

e. Harus jujur, objektif, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

3. Tipe Akuntabilitas

Bruce Stone, O.P Dwivedi, dan Joseph G. Jabbra, dalam Rosemarie S.N,[8] membagi tipe akuntabilitas sebagai berikut:

1) Akuntabilitas Moral.

Berkaitan dengan tanggung jawab moral seseorang secara pribadi. Akuntabilitas ini sulit untuk diukur karena berkaitan dengan apa yang diyakini pribadi tersebut yang bisa berbeda satu dengan yang lainnya.

2) Akuntabilitas Politik.

Akuntabilitas politik adalah akuntabilitas dari pihak pemerintah, pelayan masyarakat, dan para politikus kepada masyarakat umum dan kepada berbagai badan legslatif seperti kongres atau parlemen (di Indonesia seperti MPR dan DPR).

---

[8] Rosemarie S.N. *Akuntabilitas sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan* (Bandung : Univ. Kristen Maranatha)

3) Akuntabilitas Administratif.

Menjaga para pelayan masyarakat yang bekerja dalam bidang administrasi pemerintahan untuk tetap dapat dikatakan akuntabel. Perlu ada berbagai mekanisme untuk melakukan hal ini, yaitu dengan dibuatnya berbagai peraturan dan norma internal dan juga dibentuknya berbagai komisi independen.

4) Akuntabilitas Pasar.

Banyaknya tuntutan akan desentralisasi dan privatisasi kepada pihak pemerintah, menyebabkan berbagai bentuk pelayanan yang tersedia di hari-hari ini menjadi lebih terfokus kepada kebutuhan konsumen *("customer-driven")* dan harus tertuju untuk menyediakan kenyamanan dan berbagai pilihan kepada warga negara.

5) Akuntabilitas dalam berbagai Hubungan Konstituen.

Dalam pandangan ini, organisasi tertentu atau pihak pemerintahan dapat dikatakan akuntabel jika suara dari berbagai kelompok dan institusi yang ada di luar sektor publik yang mewakili berbagai minat warga negara dalam bidang konstituensi telah terdengar.

6. Akuntabilitas Manajerial.

Akuntabilitas manajerial terpusat pada manajerial suatu organisasi, efisiensi dan efektivitas penggunaan harta perusahaan yang berupa dana, sumber daya manusia, berbagai peralatan, dan lain-lain. Akuntabilitas ini juga melihat pada kinerja manajer atau pengawas dalam menangani masalah yang ada, menetapkan suatu proses yang berkelanjutan seperti perencaaan dan penganggaran, sehingga memungkinkan mereka memberikan pelayan publik yang terbaik.

7) Akuntabilitas Profesional.

Akuntabilitas profesional diperuntukkan bagi kaum profesional dengan cara menetapkan suatu standar profesi dan

berbagai kode etik. Dalam melaksanakan kegiatannya tetap dalam jalur norma-norma dan standar profesi tersebut. Jika mereka menaati semua standar profesi tersebut maka mereka dapat dikatakan akuntabel.

8) Akuntabilitas Legal/Yudisial.

Berkaitan dengan aspek hukum, di mana pelaksanaan hukum disesuaikan dengan produk dan jasa hukum yang memang diminta oleh masyarakat/sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

B. Manajemen Pendidikan

Manajemen dalam kamus *Ilmiah Popular*, diartikan sebagai pengelolaan usaha: kepengurusan, ketatalaksanaan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang diinginkan oleh direksi.[9] Sedangkan dalam kamus *Bahasa Lengkap Bahasa Indonesia*, diartikan pimpinan atau direksi yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi, penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.[10] Kata manajemen sesungguhnya berasal dari bahasa latin, yaitu dari kata manus yang berarti tangan dan *agere* yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi *managere* yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang berarti *to manage*, dengan kata benda *management* dan *manager* untuk orang yang melakukan kegiatan manajeman. Akhirnya, *management* diterjemahkan orang ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan, dengan kata lain bahwa manajemen adalah seni melakukan pekerjaan melalui orang-orang.[11]

---

[9] Widodo, dkk. *Kamus Ilmiah Popular*. (Yogyakarta: Absolut, 2002), 434.

[10] Anwar Dessy, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Karya Aditama, 2001), 274.

[11] Husaini Usman, *Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 3.

Makna manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat dan profesional. Manajemen diartikan sebagai ilmu karena merupakan suatu bidang pengetahuan yang secara sistematik berusaha memahai mengapa dan bagaimana orang bekerja sama. Manajemen diartikan sebagai kiat karena manajemen mencapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur orang lain menjalankan dalam tugas. Adapun manajemen diartikan sebagai profesi karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi manajer, dan para profesional dituntut oleh suatu kode etik.[12]

Pada umumnya manajemen disamakan dengan administrasi dalam arti yang luas, yakni proses kerjasama sekelompok manusia dalam rangka mencapai tujuan kelompok/organisasi secara efektif dan efisien.[13] Jika diterapkan dalam bidang pendidikan, pengertian administrasi pendidikan menurut Nurhadi dalam bukunya *Administrasi Pendidikan di Sekolah*, menyatakan bahwa Administrasi Pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang bergabung dalam organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, agar efektif dan efisien.[14]

Dari definisi di atas dapat disimpulkan menjadi lima pengertian pokok administrasi pendidikan, yaitu:

1. Merupakan proses kegiatan pengelolaan bidang pendidikan.

2. Bahwa proses kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kerjasama.

---

[12] Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung : Remaja RosdaKarya,1999),.1

[13] Hendyat Soetopo, *Manajemen Pendidikan,* (Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang, 2001), 1

[14] Ibid., 2

3. Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan dalam suatu organisasi pendidikan.

4. Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

5. Bahwa tujuannya diharapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien.[15]

Dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer/pimpinan, yaitu: Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pemimpinan (*Leading*), dan pengawasan (*Controlling*). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencana, mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.[16]

George R Terry juga mengemukakan bahwa proses manajemen dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*): *Budgetting, Programming, Decision Making, Forcasting*.

2. Pengorganisasian (*Organizing*): *Structuring, Assembling resources, Staffing*.

3. Penggerakan (*Actuating*): *Coordinating, Directing, Commanding, Motivating, Leading, Stimulating*.

4. Pengawasan (*Controlling*): *Monitoring, Appraising, Evaluating, Reporting*.[17]

Selain pandangan tersebut di atas, telah berkembang pengertian manajemen dari para pakar yang berbeda-beda secara redaksioanl, namun tampaknya ada unsur kesamaan

---

[15] Ibid, hal. 3.

[16] Fattah, *Landasan ...*, hal. 1.

[17] George R Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen, (Bumi Aksara, 2001), hal. 4.

dalam substansi maknanya. Secara sederhana manajemen berarti mengatur, mengarahkan dan menggerakkan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang diiinginkan oleh organisasi. Secara umum, pengertian manajemen adalah merupakan proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.[18]

Istilah manajemen terkadang dapat diartikan sebagai ilmu, kiat, dan profesi. Dikatakan sebagai ilmu oleh Luther Gulick karena manajeman dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematik berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama. Dikatakan sebagai kiat karena manajemen mencapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur orang lain dalam menjalankan tugas. Dipandang sebagai suatu profesi karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi.[19]

Secara tidak langsung kegiatan manajemen diartikan sebagai proses pengintegrasian sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total untuk menyelasaikan sesuatu.[20] Sumber-sumber yang dimaksud pada istilah ini adalah mencakup orang-orang, alat-alat, media, bahan-bahan, uang serta sarana dan prasarana.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa istilah manajemen merupakan konsep yang secara umum sudah dipahami sebagai proses kegiatan yang meliputi tahapan

---

[18] Ety Rochaety, dkk, *Sistem informasi Manajemen Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2006, hal 4.

[19] Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya,2000), hal 1.

[20] Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1998), hal 3.

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pegendalian dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Perencanaan (*planning*) adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Perencanaan juga dapat diartikan sebagai proses pemilihan dari sejumlah alternatif tentang penetapan prosedur pencapaian, serta pemikiran sumber yang dapat disediakan untuk mencapai tujuan. Yang dimaksud dengan sumber meliputi: sumber manusia, material, uang dan waktu.

Perencanaan juga dapat bermakna sebagai semacam prediksi terhadap apa yang akan terjadi pada masa datang disertai dengan persiapan untuk menghadapi masa yang akan datang. Rencana adalah suatu arah tindakan yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Dari perencanaan tersebut akan mengungkapkan tujuan-tujuan organisasi dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Dengan demikian secara umum, pada dasarnya tujuan perencanaan adalah sebagai pedoman untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.[21]

Pengorganisasian (*organizing*) dapat diartikan sebagai proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Termasuk di dalam kegiatan pengorganisasian adalah penetapan tugas, tanggung jawab, dan wewenang orang-orang tesebut serta mekanisme kerjanya sehingga dapat menjamin tercapainya

---

[21] Soebagio Armodiwirio, *Manajemen Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Ardadizya Jaya, 2005) 76.

tujuan sekolah itu.[22] Setelah melalui fase perencanaan dan pengorganisasian, maka tahap berikutnya adalah tahap penggerakan (*actuating).* Penggerakan merupakan proses untuk menumbuhkan semangat pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat serta membimbing mereka dalam melaksakan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Penggerakan juga dapat dipahami sebagai suatu keseluruhan usaha, cara, tehnik dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif dan ekonomis.[23]

Tahapan manajeman yang terakhir dalam suatu kegiatan adalah proses pengawasan (*controlling*). Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengendalikan semua unsur-unsur yang terkait dalam unsur kegiatan agar konsisten tehadap prinsip-prinsip kegiatan yang telah ditetapkan. Pengawasan juga dimaksudkan agar pihak-pihak yang bertanggung jawab menaati peraturan-peraturan yang ada. Pengawasan dapat dipahami sebagai tindakan mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif yang perlu. Fungsi pengawasan ini juga sangat erat kaitannya dengan fungsi perencanaan. Bisa juga dikatakan bahwa fungsi pengawasan dan perencanaan seperti kedua sisi gunting.[24] Lebih lanjut Manajemen pendidikan adalah aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan

---

[22] Suryo Subroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), 24

[23] Sondang P Siagaan, *Fungsi-Fungsi Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 128

[24] Soebagio Armodiwirio, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Ardadizya Jaya, 2005), 175.

sebelumnya.[25] Sedangkan Menurut Tilaar, manajemen pendidikan adalah mobilisasi segala sumberdaya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.[26] Sedangkan menurut Sulistyorini manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, agar efektif efisien.[27]

C. Transformasi dalam masyarakat

Transformasi dalam kamus ilmiah populer adalah perubahan bentuk atau perubahan rupa.[28] Sedangkan sosial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat.[29] Jadi, transformasi sosial adalah gerak atau dinamika masyarakat dari suatu tahap ketahap tertentu, baik yang bersifat evolusioner maupun revolusioner, dalam skala lokal maupun global yang terjadi karena faktor internal atau eksternal.[30]

Transformasi sosial merupakan perubahan wajah dan watak masyarakat dari peradaban yang terus berkembang ke arah yang lebih maju. Masalah transformasi sosial di pesantren dengan perspektif khasanah pemikiran keagamaan, menghadapkan berbagai potensi dan kecenderungan baik yang positif maupun negatif. Hal ini wajar karena setiap perubahan atau

---

[25] Made Pidarta. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 4

[26] Mastuhu. *Dinamika ....,* 31

[27] Sulistyorini. *Manajemen Pendidikan Islam, Konsep, Strategi dan Aplikasi*. (Yogyakarta: Teras, 2009), 13

[28] Dahlan M Albarri, , Pius A Partanto. *Kamus Ilmiyah Populer*. (Surabaya: Arkola, 1994), 754

[29] Ibid., 718

[30] A Halim., *Manajemen Pesantren*, (Yogyakarta: LKIS, 2005), 78

pemunculan fenomena baru tentu menghadirkan pula harapan-harapan dan tantangan-tantangan baru. Sementara masyarakat memandang sebagai hal yang positif sehingga konstruktif. Pendapat lain memandangnya sebagai hal yang negatif sehingga destruktif terhadap perkembangan pesantren. Dalam hal ini adalah konsep normatif keagamaan dan peran kiai sebagai agen trasformasi sosial yang menjembatani dialektika yang terjadi antara ilmu dan agama dengan kehidupan ummat. Dengan mengemukakan potensi-potensi positif.[31]

Proses transformasi sosial yang harus dikelola oleh pesantren, setidaknya ada dua yang tidak dapat terpisahkan dari unsur pengembangan pesantren, yaitu pengembangan santri dan pengembangan masyarakat. Dalam pengertiannya, pengembangan masyarakat atau pengembangan sumber daya manusia diartikan sebagai memperluas horison pilihan bagi masyarakat banyak. Pada negara maju pengembangan masyarakat tidak terlalu difokuskan pada penyediaan kebutuhan dasar masyarakat (seperti layanan kesehatan, makanan, air bersih, pendidikan dasar dan menengah), tetapi lebih diarahkan pada mengembangkan proses demokrasi, memperbaiki proses demokrasi yang ada dan mengembangkan konklusi logis dari masalah-masalah yang ada. Tujuan utama pergerakan adalah pengembangan "harga diri" dan kepuasan berpartisipasi. Pada sisi lain, pada berbagai negara berkembang, fokus perhatian dari pengembangan masyarkat lebih diarahkan pada peningkatan kesehatan masyarakat, peningkatan kondisi ekonomi, komunitas, pembuatan fasilitas infrastrktur, membangun fasilitas rumah untuk kelompok miskin, mengembangkan pendidikan dasar, menengah dan kejuruan, serta menyiapkan lapangan kerja.[32]

---

[31] Irwan Abdullah dkk. *Agama, Pendidikan Islam dan Tanggung Jawab Sosial Pesantren*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 51

[32] http://aliciacomputer.blogspot.com , 2009

D. Sistem Manajemen Pendidikan Pondok Pesantren

Beberapa istilah yang berhubungan dengan *term* akuntabilitas sebagai rambu dan pembatas masalah. Istilah akuntabilitas dalam penelitian ini adalah diartikan sebagai pemberian informasi dari pesantren terhadap komunitas pesantren dan masyarakat luas tentang lembaga pesantren dalam merespon kebutuhan santri. Bukan laporan pertanggung jawaban yang sifatnya administratif. Melainkan pertanggung jawaban moral pada *stakeholder*. Isi dari akuntabilitas yang dimaksud adalah terselenggaranya pesantren, kualifikasi santri, kualifikasi asatidz, pelaksanaan pembelajaran, indikator hasil yang ditunjukkan dengan bukti konkrit kepada masyarakat.

Selanjutnya manajemen pendidikan pesantren sebagai objek kajian adalah pengelolaan, perencanaan lembaga pesantren dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap santri dan masyarakat.karena masa depan pesantren sangat ditentukan oleh faktor manajerial. Karena pesantren kecilpun akan berkembang ketika di kelola dengan manjerial yang *apik*. Begitu pula sebaliknya pesantren besar tatapi manajemennya amburadul akan mengalami kemunduran.

Sistem pendidikan adalah totalitas interaksi dari seperangkat unsur-unsur pendidikan yang bekerja sama secara terpadu dan saling melengkapi satu sama lain menuju tercapainya tujuan pendidikan yang telah menjadi cita-cita bersama para pelakunya.[33] Sistem Pendidikan pesantren menurut M. Arifin adalah sarana yang berupa perangkat organisasi yang diciptakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berlangsung dalam pesantren.[34] Perengkat organisasi diawali dengan pemberdayaan

---

[33] Mastuhu. *Dinamika ....,* 6.

[34] Ismail, *Dinamika.....,* 8.

terhadap sumber daya manusia untuk bisa menjalankan roda organisasi, ketika sumber daya manusia itu terwujud maka tujuan pendidikan di pesantren bisa terlaksana.

Menurut Ismail pesantren merupakan sebuah diskursus yang kapanpun diperbincangkan tetap hangat, menarik dan aktual. Banyak aspek yang mendukung wacana pesantren tetap aktual dalam setiap dimensi, kerena pesantren dengan eksistensi tetap percaya diri dan penuh pertahanan diri dalam setiap arus tantangan yang dihadapinya. Pesantren merupakan sistem yang memang unik dan merupakan sistem pendidikan paling tradisional di negeri ini.[35] Tetapi pesantren dalam perkembangannya memiliki dinamika tersendiri dalam sistem pendidikannnya. Menurut Mastuhu dinamika sistem pendidikan pesantren adalah gerak perjuangan pesantren di dalam memantapkan identitas dan kehadirannya ditengah-tengah kehidupan bangsa sebagai sub sistem pendidikan nasional. Artinya di satu sisi pesantren mempertahankan identitasnya dan di sisi yang lain pesantren diharapkan terbuka pada kemajuan teknologi, hal ini ditujukan untuk tercapainya pendidikan nasional.[36]

Karena ketika pesantren tutup mata dengan perkembangan zaman yang dibarengi dengan era globalisasi, di mana era tersebut merupakan era tanpa batas dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, maka dunia pesantren akan berada dalam ketertinggalan. Bisa dikatakan pesantren tidur seperti para *ashabul kahfi* yang ketika bangun berada pada masa yang jauh tertinggal pada dari masa ia sebelum tertidur.

Lebih lanjut Mastuhu membagi unsur-unsur sistem pendidikan pesantren yang dikelompokkan sebagai berikut:

---

[35] Ibid., 171

[36] Mastuhu. *Dinamika ...., 7*.

1. Aktor atau pelaku: kiai, santri dan pengurus:

2. Sarana perangkat keras, seperti: masjid, rumah kiai, asrama, atau pondok, rumah kiai dan sebagainya.

3. Sarana perangkat lunak, seperti tujuan, kurikulum, metodologi pengajaran, evaluasi, dan alat-alat pendidikan lainnya.[37]

[37] Ibid., 25.

BAB III
DINAMIKA PESANTREN DI INDONESIA

A. Definisi Pesantren

Pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam *(tafaqquh fiddin)* dengan menekankan moral agama Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari- hari. Secara etimologi, istilah pesantren berasal dari kata *santri*, yang dengan awalan *pe* dan akhiran *an* berarti tempat tinggal santri. Kata "santri" juga merupakan penggabungan antara suku kata *sant* (manusia baik) dan *tra* (suka menolong), sehingga kata pesantren dapat diartikan sebagai tempat mendidik manusia yang baik.[1]

Sementara, Dhofier menyebutkan bahwa menurut Profesor Johns, istilah santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji, sedang C C Berg berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari istilah *shastri* yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci Agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci Agama Hindu. Kata *shastri* berasal dari kata *shastra* yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan.[2] Dengan kata lain, istilah santri

---

[1] Manfred Ziemek, *Pesantren Dalam Perubahan Sosial*, terj. Butche B. Soendjojo, (Jakarta: P3M, 1986), hal.8

[2] Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren*.....,hal. 44

mempunyai pengertian seorang murid yang belajar buku-buku suci/ilmu-ilmu pengetahuan Agama Islam. Dengan demikian, pesantren dipahami sebagai tempat berlangsungnya interaksi guru- murid, kiai¯santri dalam intensitas yang relatif permanen dalam rangka transferisasi ilmu-ilmu keislaman. Dalam hubungan dengan usaha pengembangan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah (Departemen Agama), pengertian yang lazim dipergunakan untuk pesantren adalah sebagai berikut:

Pertama, pondok pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang pada umumnya pendidikan dan pengajaran tersebut diberikan dengan cara *non-klasikal* (sistem *Bandongan* dan *Sorogan)* di mana seorang kiai mengajar santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama-ulama besar sejak abad pertengahan, *(Sistem Bandongan dan Sorongan)* di mana seorang kiai mengajar santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang tertulis dalam bahasa Arab oleh ulama-ulama besar sejak abad pertengahan, sedang para santri biasanya tinggal dalam pondok/asrama dalam lingkungan pesantren tersebut.

Kedua, pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang pada dasarnya sama dengan pondok pesantren tersebut di atas tetapi para santrinya tidak disediakan pondokan dikompleks pesantren, namun tinggal tersebar diseluruh penjuru desa sekeliling pesantren tersebut (*Santri kalong),* di mana cara dan metode pendidikan dan pengajaran agama Islam diberikan dengan sistem *wetonan,* para santri berduyun-duyun pada waktu-waktu tertentu (umpama tiap hari jum'at, ahad, selasa atau tiap-tiap waktu shalat dan sebagainya).

Ketiga, pondok pesantren dewasa ini adalah gabungan antara sistem pondok dan pesantren yang memberikan pendidikan dan pengajaran agama Islam dengan sistem *bandongan, sorogan* atau *wetonan* dengan disediakan pondokan untuk para santri yang

berasal dari jauh dan juga menerima santri *kalong,* yang dalam istilah pendidiÿÿn modernrtemenuhi kriteria pendidikan non formal serta menyelenggarakan juga pendidikan formal berbentuk madrasah dan bahkan sekolah umum dalam berbagai bentuk tingkatan dan aneka kejuruan sesuai dengan kebutuhan masyarakat masing-masing.[3]

Pesantren atau pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang cukup unik karen memiliki elemen dan karakteristik yang berbeda dengan lembaga pendidikan Islam lainnya. Elemen-elemen Islam yang paling pokok, yaitu: Pondok atau tempat tinggal para santri, masjid, kitab-kitab klasik, kiai dan santri.[4] Kelima elemen inilah yang menjadi persyaratan terbentuknya sebuah pcsantren, dan masing-masing elemen tersebut saling terkait satu sama dengan lain untuk tercapainya tujuan pesantren, khususnya, dan tujuan pendidikan Islam, pada umumnya, yaitu membentuk pribadi muslim seutuhnya *(insan kamil).* Adapun yang dimaksud dengan pribadi muslim seutuhnya adalah pribadi ideal meliputi aspek individual dan sosial, aspek intelektual dan moral, serta aspek material dan spiritual. Sementara, karakteristik pesantren muncul sebagai implikasi dari penyelenggaraan pendidikan yang berlandaskan pada keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian (menolong diri sendiri dan sesama), ukhuwwah *diniyyah* dan *islamiyyah* dan kebebasan. Dalam pendidikan yang seperti itulah terjalin jiwa yang kuat, yang sangat menentukan falsafah hidup para santri.[5]

---

[3] Marwan Saridjo, dkk, *Sejarah Pondok Persantren di Indonesia*, (Jakarta: Dharma Bhakti, 1982), hal. 9-10

[4] Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren.....,* hal. 44

[5] Imam Zarkasyi, *Pembangunan Pondok Pesantren dan Usaha Untuk Melanjutkan Hidupnya* dalam Al jami'ah No. 5-6 Th. Ke –IV Sept – Nop. 1965 (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1965), hal. 24-25

Penyelenggaraan pendidikan pesantren berbentuk asrama yang merupakan komunitas tersendiri di bawah pimpinan kiai atau ulama, dibantu seorang atau beberapa ustadz (pengajar) yang hidup ditengah-tengah para santri dengan masjid atau surau sebagai pusat peribadatan, gedung-gedung sekolah atau ruang-ruang belajar sebagai pusat kegiatan belajar-mengajar serta pondok-pondok sebagai tempat tinggal para santri. Kegiatan pendidikannya pun diselenggarakan menurut aturan pesantren itu sendiri dan didasarkan atas prinsip keagamaaan. Selain itu, pendidikan dan pengajaran agaman Islam tersebut diberikan dengan metode khas yang hanya dimiliki oleh pesantren, yaitu;

Rundongan atau *Wetonan* adalah metode pengajaran di mana santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kiai yang membacakan kitab tertentu, sementara santri menyimak kitab masing-masing dan membuat catatan-catatan. Disebut dengan istilah *Wetonan,* berasal dari kata *wektu* (istilah jawa untuk kata: waktu), karena pelajaran itu disampaikan pada waktu-waktu tertentu seperti sebelum atau sesudah shalat fardhu yang lima atau pada hari-hari tertentu.

Sorogan, adalah metode pengajaran individual, santri menghadap Kiai seorang demi seorang dengan membawa kitab yang dipelajarinya. Kiai membacakan pelajaran dari kitab tersebut kalimat demi kalimat, kemudian menerjemahkan dan menerangkan maksudnya. Santri menyimak dan mengesahkan (istilah jawa: *ngesah),* yaitu dengan memberi catatan pada kitabnya untuk menandai bahwa ilmu itu telah diberikan kiai. Adapun istilah *sorogan* tersebut berasal dari kata *sorog* (jawa) yang berarti menyodorkan, maksudnya santri menyodorkan kitabnya dihadapan kiai, sehingga terkadang santri itu sendiri yang membaca kitabnya dihadapan kiai, sedangkan kiai hanya menyimak dan memberikan koreksi bila ada kesalahan dari bacaan santri tersebut. Beberapa pesantren dalam perkembangannya, di samping mempertahankan sistem tradisionalnya

juga menggunakan sistem madrasi, baik sebagai basis pendidikannya ataupun yang bersifat tambahan.

Pengertian pondok pesantren secara terminologi telah diungkapkan oleh para ahli sebagai berikut:

1. Dhofier memberikan pengertian:

Sebuah pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional di mana para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang (atau lebih) guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai. Asrama untuk para siswa tersebut berada dalam lingkungan komplek pesantren di mana kiai bertempat tinggal juga menyediakan sebuah masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain.[6]

2. Daulay mendefinisikan:

Saat sekarang pengertian yang populer dari pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang bertujuan untuk mendalami ilmu agama Islam dan mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian atau disebut *tafaqquh fiaddin* dengan menekankan pentingnya moral dalam hidup bermasyarakat.[7]

3. Djamaluddin memberikan pandangan:

Pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (kampus) yang santri-santrinya menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dan kepemimpinan

---

[6] Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren*....., hal. 19

[7] Daulay, Haidar Putra, *Hostorisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah Dan Madrasah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. 2001) hal.8

seorang atau beberapa orang kiai dengan ciri-ciri khas yang bersifat kharimatis serta independen dalam segala hal.[8]

4. Menurut A. Mukti Ali sebagaimana dikutip Hasbullah:

Pondok pesantren yaitu suatu lembaga pendidikan Islam, yang di dalamnya terdapat seorang kiai (pendidik) yang mengajar dan mendidik para santri (anak didik) dengan sarana masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut, serta di dukung adanya pondok sebagai tempat tinggal para santri.[9]

Dari beberapa batasan dan definisi para ahli di atas dapat diketahui bahwa dalam pondok pesantren ada beberapa unsur-unsur yang perlu diperhatikan yaitu meliputi:Pondok, Masjid, Santri, Pengajian kitab-kitab Islam klasik dan Kiai.[10] Dengan demikian pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang terdiri dari unsur kiai, asrama yang bertujuan untuk mecetak kader-kader ulama'dengan mendalami ilmu-ilmu agama sebagai bekal pengalaman dalam kehidupan sehari-hari.

B. Tujuan dan Sistem Pendidikan Islam di Pesantren

Pada dasarnya pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam, karena di dalamnya terdapat seperangkat pengetahuan yang berhubungan dengan agama Islam. Apapun usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pesantren dimasa kini dan masa mendatang harus tetap pada prinsip ini, artinya pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dengan ciri khas, meskipun ia banyak terlibat dalam berbagai masalah kemasyarakatan. Seperti pesantren dalam upaya menciptakan keadilan sosial

---

[8] Djamaluddin dan Abdullah Aly, *Kapita Slekta Pendidikan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia,1999). hal.99

[9] Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, (Jakatra: Raja Grafindo Persada. 1999), hal.24

[10] Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren*....., hal. 19

karena bagaimanapun juga pada konsep keadialan sosial akan menjadi tujuan dan idaman bagi setiap masyarakat.

Secara umum tujuan pendidikan di pesantren adalah mendidik produk yang mandiri. Meskipun tujuan pendidikan di pesantren belum secara rinci dan dijabarkan dalam suatu sistem pendidikan yang lengkap dan konsisten, tetapi secara sistematis di pesantren jelas menghendaki produk lulusan yang mandiri dan berakhlak baik serta bertaqwa dengan memilahkan secara tegas antara aspek pendidikan dan pengajaran yang keduanya saling mengisi satu dengan lainnya, yang pada akhirnya dimensi pendidikan dalam arti membina budi pekerti terhadap anak didik di samping dimensi pengajaran yang membangun dan mengembangkan daya kognetif bagi anak didik. Dengan adanya harmonisasi antara dimensi pendidikan dan dimensi pengajaran, maka tujuan pendidikan di pesantren menjadi jelas.[11]

Tujuan pendidikan yang diselenggarakan dapat diketahui dengan jalan menanyakan langsung kepada para penyelenggara dan pengasuh pesantren atau dengan cara memahami fungsi-fungsi yang dilaksanakan baik dalam hubungannya dengan para santri maupun dengan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan wawancara dengan para pengasuh pesantren, Prof. Mastuhu menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan pesantren adalah:

Menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa pada tuhan, berakhlak mulia, beranfaat bagi masyarakat atau berkhidmat kepada masyarakat dengan jalan menjadi kawula atau abdi masyarakat sekaligus menjadi rasul, yaitu menjadi pelayan masyarakat sebagaimana kepribadian Nabi Muhammad SAW (mengikuti sunah Nabi), mapu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam keribadian, menyebarkan agama atau menegakkan Islam

---

[11] Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren*.....,hal. 21

dan kejayaan umat Islam di tengah-tengah masyarakat (*'izzu-l-Islam wa-l-muslimin*) serta mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian Indonesia.[12]

Dengan tujuan tersebut tampaknya pesantren merupakan sistem pendidikan yang *kaffah* yakni tidak hanya sekadar bermodalkan semangat, ungkapan verbal, dan slogan melainkan didasarkan pada kometmen terhadap Islam dan adab-adabnya bahkan sunnah-sunnahnya.

Akan tetapi untuk menciptakan rumusan formal dari tujuan pesantren yang bersifat integral, komprehensive atau total meliputi segala jenis pondok dalam hubungannya dengan masa pembangunan sekarang, jangan terlepas dari cita-cita tujuan bangsa kita. Oleh karena itu rumusan tujuan formal pendidikan pesantren perlu disesuaikan dengan tujuan pendidikan Nasional yang pada BAB II pasal 4: Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan.[13]

Dengan demikian perumusan tujuan yang bersifat integral yang dapat menampung cita-cita negara dan ulama. Seperti disebutkan oleh Djamaluddin dan Abdullah Aly, Tujuan tersebut dapat kita rumuskan sebagai berikut antara lain:

a. Tujuan Umum

Membentuk mubalig-mubalig Indonesia berjiwa Islam Pancasilais yang bertakwa, yang mampu, baik rohaniah maupun

---

[12] Ismail, *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset. 2002) hal.46

[13] Sekretariat Negara RI. *UURI No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya,* (Semarang, Raneka Ilmu, 1989), hal.4

jasmaniah mengamalkan ajaran agama Islam bagi kepentingan kebahagiaa hidup diri sendiri, keluarga, masyarakat dan bangsa serta negara Indonesia.

b. Tujuan Khusus/Intermediair:

1) Membina suasana hidup keagamaan dalam (santri).

2) Memberikan pengrtian keagamaan melali pengajaran ilmu agama Islam.

3) Mengembangkan sikap beragama melalui praktek-praktekibadah.

4) Mewujudkan ukhuwah islamiyah dalam pondok pesantren dan sekitarnya.

5) Meberikan pedidikan keterampilan *civic* dan kesehatan, olah raga kepada anak didik.

6) Mengusahakan terwujudnya segala fasilitas dalam pondok pesantren yang memungkinkan pencapaian tujuan umum tersebut.[14]

Dari tujuan pendidikan pesantren tersebut jelas bahwa cita-cita negara yang berupa tujuan Sistem Pendidikan Nasional dapat tertampung dan terlaksana dalam tujuan pendidikan pesantren.

C. Dasar-dasar Didirikannya Pondok Pesantren

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa pondok pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional yang tumbuh dan berkembang sejak zaman dahulu. Dan dengan demikian tentunya landasan yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari tentunya landasan agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

---

[14] Djamaluddin dan Abdullah Aly, *Kapita Slekta Pendidikan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hal. 104

Akan tetapi, dalam perkembangannya pondok pesantren sebagai upaya untuk menyamakan dinamika pondok pesantren se-Indonesia akhirnya tertuju kepada satu titik dan arah yang sama, dan akhirnya rumusan dari dasar pendidikan pondok pesantren mengalami suatu perkembangan.

Adapun yang dimaksud dengan landasan dasar pendidikan pondok pesantren adalah sebagai berikut:

a. Dasar Religius

Yang dimaksud dengan dasar religius dalam uraian ini adalah: Dasar-dasar yang bersumber dari ajaran agama Islam yang tertera dalam ayat Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Menurut ajaran Islam, bahwa melaksanakan pendidikan agama merupakan perintah dari Tuhan dan merupakan Ibadah kepada-Nya.[15] Sebagaimana dapat kita lihat pada surat An-Nahl 125:

ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ
وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦۖ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q. S. An-Nahl: 125.[16]

Dari landasan di atas dapat dipahami bahwa sesungguhnya ajaran Islam pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan

---

[15] Zuhairini, *Metodik Khusus Pendidikan Agama,* (Surabaya: Usaha Nasional, 1993) hal. 23

[16] Depag RI, *Alqur'an DanTerjemahan,* (Semarang: Toha Putra. 1989), hal.421

kesejahteraan hidup, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat, dengan berusaha membangun kehidupannya yang seimbang antara dunia dan spiritual.

b. Dasar Yuridis (Hukum)

Dasar yuridis ini terdiri dari:

1. Dasar Ideal

Yaitu dasar dari Falsafah Negara: Pancasila, di mana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini mengandung pengertian, bahwa seluruh bangsa Indonesia harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau tegasnya harus beragama.[17] Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka diperlukan Pendidikan Agama kepada anak-anak, karena tanpa adanya Pendidikan Agama, akan sulit sekali untuk mewujudkan sila pertama dari Pancasila tersebut.[18]

2. Dasar Kultural/Konstitusional

Selain dasar ideal yang telah disebutkan di atas juga terdapat dasar kultural/konstitusional yakni yang terdapat dalam UUD 1945 dalam BAB XI pasal 29 ayat 1 yang berbunyi: Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mana bunyi pasal tersebut mempunyai makna yang terkandung di dalamnya bahwa bangsa Indonesia harus mempunyai agama. Di samping itu juga dijelaskan bahwa negara melindungi umat yang beragama, untuk menunaikan agamanya dan beribadah menurut kepercayaannya masing-masing. Oleh karena itu agar mereka bisa menjalankan agamanya tersebut maka diperlukan adanya pendidikan agama sebagai upaya untuk meningkatkan taraf kehidupan bangsa Indonesia yang sejahtera.

---

[17] Zuhairini, *Metodik Khusus Pendidikan Agama,* (Surabaya: Usaha Nasional, 1993) hal. 22

[18] *Ibid,* hal.22

3. Dasar Sosial Psikologi

Dalam seluruh kehidupan umat manusia tentunya dibutuhkan pandangan hidup sebagai pegangan dalam kehidupannya yaitu agama. Maka dari itulah sangat diperlukan sekali bagi orang-orang Muslim adanya pendidikan agama Islam agar kehidupan orang Muslim tersebut menjadi tenang dan sejahtera baik di dunia dan akhirat, sebab tanpa adanya pendidikan agama Islam akan mengakibatkan semakin jauhnya orang Muslim tersebut dari ajaran agama yang benar sehingga pada akhirnya akan mengakibatkan kesengsaraan dalam hidupnya baik di dunia maupun di akhirat.

Secara konkret tujuan pondok pesantren belum dirumuskan, hal ini disebabkan karena pertumbuhan dan perkembangan dari pondok pesantren itu sendiri yang semakin hari semakin berkembang. Ditinjau dari sistem pengajaran, besar kecilnya santri, materi yang diajarkan maka akan kita dapati atau kita jumpai berbagai jenis pondok pesantren, baik itu berupa pondok pesantren salafi, pondok pesantren kholafi dan masih banyak jenis pondok pesantren yang mana hal tersebut dipandang dari segi kebutuhan dan perkembangan zaman.

Berdasarkan hal tersebut di atas yaitu beragamnya jenis pondok pesantren, yang mana tentunya hal ini juga akan mempunyai ciri-ciri khusus yang berbeda-beda antara pondok pesantren yang satu dengan yang lainnya. Dan hal ini berakibat pula pada tujuan pondok pesantren yang belum diketahui perumusannya secara jelas. Sedangkan tujuan pendidikan pondok pesantren adalah membentuk manusia hidup dengan kekuatan diri sendiri tidak merupakan keharusan untuk menjadi pegawai negeri.[19]

---

[19] Imron Arifin, *Kepemimpinan Kiai Studi Kasus Pondok Pesantren Tebu Ireng,* (Jombang: Kalimasahadah,1993), hal.35

Dalam penjelasan yang lain sebagaimana yang diungkapkan oleh Ahmad Tafsir tentang tujuan pendidikan pondok pesantren yaitu:

1. Memiliki kebijaksanaan menurut ajaran Islam
2. Memiliki kebebasan yang terpimpin.
3. Berkemampuan mengatur diri sendiri.
4. Memiliki rasa kebersamaan yang tinggi.
5. Menghormati orang tua dan guru.
6. Cinta kepada ilmu.
7. Mandiri.
8. Kesederhanaan.[20]

C. Tipologi Pondok Pesantren

Pesantren seagai lembaga pendidikan Islam secara selektif bertujuan menjadikan para santrinya sebagai manusia yang mandiri serta diharapkan dapat menjadi pemimpin umat dalam menuju keridhoan Tuhan. Oleh karena itu pesantren bertugas untuk mencetak para santrinya menjadi manusia yang benar-benar ahli di bidang agama dan ilmu pengetahuan kemasyarakatan serta berakhlak mulia.

Ada beberapa model dan bentuk pesantren, dalam pandangan Dhofier ada dua model yang sangat berpengaruh yakni: pesantren salafi dan pesantren khalafi, pesantren salafi memberikan gambaran danya ortodoksi dalam mempertahankan tradisi pengajaran kitab klasik sebagai inti pendidikannya. Sedangkan pesantren khalafi menggambarkan adanya pemasukan

---

[20] Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dan Perspektif Islam,* (Bandung: Remaja Rosda Karya. 1992), hal.201-202

terhadap pelajaran-pelajaran umum dalam madrasah yang dikembangkan atau membuka tipe-tipe sekolah umum dalam lingkungan pesantren.

a. Pesantren Salafi (Tradisional)

Model pesantren salafi sampai saat ini masih mempertahankan sistem pengajaran sorogan, wetonan dan bandongan karena berpedoman pada hakekat tujuan pendidikan psantren bukan mengajar kepentingan duniawi, tetapi ditanamkan pada mereka bahwa belajar adalah semata-mata kewajiban dan pengabdian kepada Tuhan.[21]

Implikasi dari suatu pengajaran yang demikian ini adalah jenjang pendidikannya di pesantren ini tidak hanya dibatasi para santri hanya belajar kitab kuning secara bergantian, tinggi rendahnya kedalaman ilmu seorang santri diukur lama tidaknya santri tersebut berada di pondok pesantren, sehingga dapatlah dikatakan bahwa ada perbedaan nilai keilmuan di masing-masing santri.

b. Pesantren Khalafi (Modern)

Tipe pesantren khalafi sebagaimana telah dijelaskan di bagian awal yang telah memasukkan pelajaran umum dalam madrasah pada lingkungan pesantren dan bahkan ada yang tidak mengajarkan kitab kuning klasik, akan tetapi pada umumnya pesantren menerapkan kedua-duanya yakni pesatren salafi dan khalafi.

Dalam Undang-Undang No.2 tahun 1989 dijabarkan bahwa ada dua jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melaui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan. Sedangkan jalur

---

[21] Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren*.....,hal. 21

pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang dilakukan melalui kegiatan belajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan.

Pada model pesantren khalafi lembaga tersebut di samping memasukkan pelajaan-pelajaran umum juga mengikuti perkembangan kurikulum baik kurikulum lokal maupun kurikulum nasional, disebabkan kurikulum bukanlah sekadar menentukan pelajaran yang harus dipelajari untuk menambah pengetahuan atau mengembangkan bakatnya melainkan merupakan masalah memperbaiki dan meningkatkan mutu kehidupan individu dan masyarakat, baik pada masa ini maupun masa yang akan datang.

Pendidikan yang ada di pesantren khalafi, seperti halnya dalam satuan Sistem Pendidikan Nasional yaitu ada dua jalur yaitu melalui jalur pendidikan sekolah dan melalui jalur pendidikan luar sekolah seperti dijelaskan dalam UUSPN pasal 10 bahwa:

1. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah.

2. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan.

3. Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan.[22]

c. Pesantren Komprehensif

Sistem pesantren ini disebut komprehensif merupakan sistem pendidikan dan pengajaran gabungan antara yang

---

[22] Moejiono Hasibuan, *Proses Belajar Mengajar,*(Bandung: Remaja Rosda Karya, 1986), hal.23

tradisional dan yang modern. Artinya di dalamnya diterapkan pendidikan dan pengajaran kitab kuning dengan metode *sorogan*, *bandongan* dan *watonan*, namun secara reguler sistem *pesekolahan* terus dikembangkan. Bahkan pendidikan keterampilan pun diaplikasikan sehingga menjadikannya berbeda dari tipologi kesatu dan kedua.

B. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Pesantren

Agak sulit untuk mengidentifikasi dan menerangkan kapan dan bagaimana sesungguhnya pesantren itu lahir. Studi yang dilakukan oleh para sarjana kadang-kadang belum menemukan titik temu yang dapat dipakai sebagai sumber informasi yang benar-benar dipercaya mengenai perjalanan kehidupan pesantren. Seperti dikemukakan oleh Geertz sebagaimana dikutip oleh Zamakhsyari Dhofier, bahwa:

Islam masuk ke Indonesia secara sistematis baru pada abad ke-14, herpapasan dengan suatu kebudayaan besar yang telah menciptakan suatu sistern politik, nilai-nilai estetika, dan kehidupan sosial keagamaan ayang sangat maju, yang dukembangkan oleh kerajaan Hindu-Budha di Jawa yang telah sanggup menanamkan akar yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia"[23]

Apa yang dikemukakan Geertz[24] tersebut hanya tentang Islam di kraton-kraton (pusat kekuasaan) di Jawa, sedangkan

---

[23] Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren.....,* hal. 6

[24] Cliffort Geertz seorang antropolog yang merintis penelitian dengan tema Abangan, santri dan Priyayi dalam masyarakat Jawa dengan meminjam istilahnya Wolf. Melihat bahwa kiai di Jawa menepati posisi sebagai pialang budaya (*cultural Broker*). Pada masa sesudah kemerdekaan, telah menjadi perubahan peran para kiai. Dari seorang kominikator yang menghubungkan dunia Islam yang berpusat di Mekah dengan para petani di Jawa di pedesaan. Berubah peran menjadi seorang politisi yang mengageni pemerintah pusat

yang menyangkut Islam dilingkungan pesantren tidak disinggung sama sekali. Sebenarnya Islam di pesantren merupakan upaya kelanjutan dari masuknya Islam di Indonesia, khususnya di Jawa, yang dilakukan oleh pedagang Arab sejak abad ke-13. Geertz tidak menyebut tentang Islam di lingkungan pesantren, padahal Islam di lingkungan orang pesantren merupakan akar yang amat kuat yang dibentuk melalui pendekatan yang sangat manusiawi yang disebarkan lewat pengajaran oleh guru dan murid berdasarkan atas kehidupan kekeluargaan. Sesungguhnya proses terbentuknya pesantren dapat dipastikan sebagai upaya untuk melembagakan kegiatan agama, agar memiliki posisi dan peran yang berarti dalam menangani dan menanggulangi berbagai permasalahan kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh para pemula penyebar agama Islam yang dilaksanakan melalui kegiatan non formal dengan tatap muka yang kurang terjadwal berubah secara berangsur-angsur menjadi kegiatan yang terorganisasi, terlembaga dalam wujud yayasan-yayasan pendidikan pesantren, dari pesantren dengan sistem pendidikannya yang masih sangat sederhana hingga pesantren yang telah menerapkan sistem pendidikan sebagaimana lembaga pendidikan sekolah atau lebih dikenal dengan sebutan sekolah berasrama (*Islamic Boarding School).*

---

desa. Geertz berhasil menarik perhatian banyak ahli karena berhasil mengangkat kiai kepada posisi istimewa. Titik tekan pada penelitian Geertz adalah identifikasi antropologi terhadap keberadaan masyarakat muslim di daerah Mojokuto, dalam penelitiannya, Geertz merumuskan adanya trikotomi dalam masyarakat Mojikuto, yaitu santri abangan dan Priyayi, dalam kerangka penelitiannya ini, Geertz menguraikan tentang signifikansi peran kiai dalam kontruksi sosiologis-antropologis masya-rakat Jawa ketika itu. Pada titik inilah antropologi ini telah membuka peranan bagi penelitian terhadap peranan kiai pada mas-masa berikutnya. Dalam Clillifort Geertz, *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983)

1. Walisongo dan Pengaruhnya

Asal-usul pesantren tidak bisa dipisahkan dari sejarah pengaruh Walisongo pada abad ke-15–16 di Jawa. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang unik di Indonesia. Lembaga pendidikan ini telah berkembang khususnya di Jawa selama berabad-abad.[25] Maulana Malik Ibrahim (Tahun 1419 di Gresik)–*spiritual father* Walisongo dalam masyarakat santri Jawa biasanya dipandang sebagai gurunya guru tradisi pesantren di Tanah Jawa.[26]

Walisongo adalah tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Jawa abad ke-15–16 yang telah berhasil mengkombinasikan aspek-aspek sekuler dan spiritual dalam memperkenalkan Islam pada masyarakat. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Drajat, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Muria dan Sunan Gunung Jati. "Wali" dalam bahasa Inggris pada umumnya diartikan *"saint"*, sementara "songo" adalah istilah bahasa jawa yang berarti sembilan. Para santri jawa berpandangan bahwa Walisongo adalah pemimpin umat yang sangat saleh dan dengan pencerahan spiritual religius mereka, bumi Jawa yang tadinya tidak mengenal agama monotheis menjadi bersinar terang. Posisi mereka dalam kehidupan sosio-kultural dan religius di jawa demikian memikat.

Pada abad ke-15 para saudagar muslim telah mencapai kemajuan pesat dalam usaha bisnis dan dakwah mereka hingga mereka memiliki jaringan di kota- kota bisnis disepanjang pantai

---

[25] *Pesantren* merupakan sebutan bagi lembaga pendidikan Isam tradisional di Jawa pada umumnya. Sedangkan di Aceh dikenal dengan sebutan Rangkang, Dayah, meunaseh. Di Minangkabau di sebut Surau, dan di Sumatera pada umumnya di sebut madrasah. Lihat Karel A Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, (Jakarta: LP3ES, 1986), h. 21

[26] KH. Saefuddin Zuhri, *Sejarah kebangkitan Islam dan perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Al Ma'arif, 1979), hal. 263

utara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di kota-kota inilah komunitas muslim pada mulanya terbentuk. Komunitas ini dipelopori oleh Walisongo mendirikan masjid pertama di Tanah Jawa, yaitu masjid Demak. Masjid ini kemudian menjadi pusat terpenting di Jawa dan memainkan peran besar dalam upaya menuntaskan Islamisasi di seluruh Jawa termasuk daerah--daerah pedalaman.

Bagi komunitas muslim, Masjid Demak tentu bukan saja sebagai pusat ibadah (ritual keagamaan), tetapi juga sebagai wahana pendidikan mengingat lembaga pendidikan Islam lebih dikenal dengan pesantren pada masa awal ini belum menemukan bentuknya yang final, bahkan masih sangat sederhana. Masjid dan pesantren sesungguhnya merupakan *center of execellece* yang saling mendukung dan melengkapi dalam membentuk kepribadian muslim. Sesungguhnya pula dakwah dan pendidikan tidak bisa dipisahkan dalam sejarah dan ajaran dasar Islam.

Pendidikan Islam atau juga transmisi Islam yang dipelopori Walisongo merupakan perjuangan *brilliant* yang diimplementasikan dengan cara sederhana, yaitu menunjukkan jalan dan alternatif baru yang tidak mengusik tradisi dan kebiasaan lokal, serta mudah ditangkap oleh orang awam karena pendekatan-pendekatan Walisongo yang konkrit realistik, tidak *"jlimet"* dan menyatu dengan kehidupan masyarakat.

Approach dan *wisdom* Walisongo agaknya terlembaga dalam satu esensi budaya pesantren dengan kesinambungan ideologis dan kesejarahannya. Kesinambungan ini tercermin dalam hubungan filosofis dan keagamaan antara *taqlid* dan modeling bagi masyarakat santri. Melalui konsep *modeling,* keagungan Muhammad SAW, serta kharisma Walisongo, yang dipersonifikasikan oleh para auliya dan kiai, telah terjunjung tinggi dari masa ke masa. Barangkali karena *modeling* ini pula gagasan pesantren sederhana yang diperkenalkan Maulana Malik Ibrahim mampu eksis dan berekembang dari abad ke abad sampai kini.

Untuk mengantisipasi dan mengakomodasi persoalan-persoalan sosial keagamaan serta merekrut murid-murid baru, Maulana Malik lbrahim tidak merasa kesulitan dalam mendirikan prototipe pesantren dalam bentuk embrio.

Pendirian pesantren ini dibarengi dengan keberhasilan tokoh ini dalam menarik simpati massa, dan melengkapi diri dengan modal materi pribadi yang digunakan untuk dakwah lslamiyyah sebagai *"a traveling Muslim merchant"* dan guru panutan. Pada siang hari, sang guru membawa anak didik ke sawah dan malam hari mengajarkan mereka ilmu-ilmu dasar seperti membaca A1-Qur'an. Karena rekayasa ini, tokoh ini sering disebut sebagai *"the father of early pesantren"* di Jawa. Langkah beliau ini kemudian diikuti oleh para wali setelahnya, seperti yang dilakukan oleh Raden Rahmat atau lebih dikenal dengan Sunan Ampel dengan mendirikan pesantren di daerah Kembang Kuning (Surabaya)[27] sebagai pusat kegiatan dalam mengajarkan dan mendakwahkan agama.[28] Pesantren ini yang terdokumentasi dalam *Babad Tanah Djawi* sebagai awal mula adanya sebuah lembaga yang disebut "pesantren".[29]

Walisongo mendidik adalah tugas dan panggilan agama. Mendidik murid sama halnya dengan mendidik anak sendiri. Pesan mereka dalam konteks ini adalah "sayangi, hormati, dan jagalah anak didikmu, hargailah tingkah laku mereka sebagaimana engkau memperlakukan anak turunmu. Beri mereka makanan dan pakaian, hingga mereka bisa menjalankan syari'at Islam dan memegang teguh ajaran agama tanpa keraguan.

---

[27] Marwan Saridjo, dkk, *Sejarah Pondok Persantren di Indonesia*, (Jakarta: Dharma Bhakti 1982), hal 25

[28] Identitas pesantren pada awal pertumbuhannya adalah sebagai pusat penyebaran agama Islam lihat M. Dawam Raharjo.

[29] Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, Cet. I (Jakarta: Logos, 1999), hal. 145

Sedangkan pola hubungan antara santri dan kiai lebih diwarnai oleh ajaran dari kitab *ta'lim al-Muta'allim* karya Zarnuji, yang dianggap sebagai pedoman etika mencari ilmu yang melibatkan peran kiai.

2. Masa Kerajaan Mataram

Pada abad berikutnya setelah masa Walisongo, sekitar abad ke-17, lembaga pendidikan pesantren semakin mendapatkan posisi di masyarakat, karena penguasa kerajaan saat itu memberikan perhatian besar terhadap pendidikan agama Islam dengan memelopori usaha-usaha untuk memajukan dunia pendidikan dan pengajaran Islam.

Pengaruh Walisongo diperkuat oleh Sultan Agung yang memerintah Mataram dari tahun 1613 sampai dengan 1645, Sultan Agung merupakan penguasa terbesar di Jawa setelah pemerintahan Majapahit dan Demak, yang juga dikenal sebagai *Sultan Abdurrahman* dan *Khalifatullah Sayyidin Panotogomo Ing Tanah Jawi,* yang berarti pemimpin dan penegak agama di tanah jawa. Sultan Agung adalah pemimpin negara yang salih dan menjadi salah satu rujukan utama bagi dunia santri. Sultan Agung menjalin hubungan intim dengan kelompok ulama. Bersama mereka, Sultan Agung melaksanakan shalat jum'at dan diikuti dengan tradisi musyawarah dan mendengar fatwa-fatwa keagamaan mereka.[30] Sebagai wujud besarnya perhatian Sultan Agung terhadap pendidikan Islam, beliau menawarkan tanah pendidikan bagi kaum santri serta menciptakan iklim sehat bagi kehidupan intelektualisme keagamaan hingga komunitas ini berhasil mengembangkan lembaga pendidikan mereka tidak kurang dari 300-an pesantren. Tanah pendidikan, tanah dengan beberapa *privileges* adalah sebuah lokasi untuk kepentingan kehidupan beragama yang dibebaskan dari pajak negara. Per-

---

[30] Lihat KH. Saefudin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan.....,* hal. 534 – 535

kembangan berikutnya menunjukkan bahwa tanah pendidikan meluas menjadi sebuah kampong khusus yang memiliki fungsi keagamaan seperti menjaga tempat-tempat suci, merawat dan mengembangkan pesantren serta menghidupkan Masjid.[31]

Pendidikan pesantren yang diselenggarakan pada masa kerajaan Mataram, khususnya masa Sultan Agung, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Tingkat pengajian Al-Qur'an, yang terdapat dalam setiap desa yang diajarkan meliputi huruf Hijaiyah, membaca Al-Qur'an, barjanji, Rukun Iman, Rukun Islam.

1) Tingkat pengajian kitab. Para santri yang belajar pada tingkat ini adalah mereka yang telah khatam A1-Qur'an. Gurunya biasanya modin terpandai di desa itu, atau didatangkan dari luar dengan syarat-syarat tertentu. Guru-guru tersebut diberi gelar *Abah Anom.* Tempat belajar biasanya di serambi masjid dan mereka umumnya mondok. Kitab yang dipelajari adalah kitab-kitab dasar, *seperti Matan Taqrib, Bidayatul Hidayah.* Sistem yang digunakan adalah *Sorogan.*

2) Tingkat pesantren besar. Tingkat ini lengkap dengan pondok dan tergolong tingkat tinggi. Gurunya diberi gelar *Kiai Sepuh* atau *Kanjeng* Kiai dan umumnya para priayi "ulama kerajaan" yang tingkat kedudukannya sama dengan penghulu. Adapun pelajaran yang diberikan pada pondok pesantren tingkat ini pada umumnya berbentuk syarah dan hasyiyah dalam berbagai disiplin ilmu agama seperti fiqih, tafsir, hadits, ilmu kalam, tasawuf, nahwu, sharaf dan lain-lain.

b. Pondok pesantren tingkat keahlian *(takhassus)*. Pelajaran pada pondok pesantren tingkat takhassus ini adalah bersifat

---

[31] Karel A Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke – 19,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984) hal. 165 -172

memperdalam sesuatu fan atau disiplin ilmu pengetahuan agama seperti hadits, tafsir, tarekat dan sebagainya.[32]

Sejalan dengan proses dinamis ini pendidikan Islam di Jawa masa kerajaan Mataram, khususnya pada masa Sultan Agung, dipandang oleh Mahmud Yunus, sebagai masa keemasan sistem pendidikan Islam abad ke-19.

3. Masa Penjajahan

Kemajuan pendidikan dan pengajaran Islam yang pesat pada masa kerajaan Mataram rupanya membuat pemerintah kolonial Belanda merasa khawatir. Sebab, dengan majunya pesantren, pada suatu saat akan mengancam kedudukan Belanda. Oleh karena itu, dikalangan pemerintah Belanda, muncul ada dua alternatif untuk memberikan pendidikan kepada bangsa Indonesia, yaitu mendirikan lembaga pendidikan yang berdasarkan lembaga pendidikan tradisional, pesantren atau mendirikan lembaga pendidikan dengan sistem yang berlaku di Barat waktu itu.

Pendidikan yang diselenggarakan secara tradisional di pesantren menurut pemerintah Belanda terlalu jelek dan tidak mungkin dikembangkan menjadi sekolah-sekolah modern. Oleh karena itu, mereka memilih alternatif kedua yaitu mendirikan sekolah-sekolah sendiri yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan yang telah ada.[33] Pendidikan Kolonial Belanda ini sangat berbeda dengan pendidikan Islam Indonesia yang tradisional, bukan saja dari segi metode, tetapi lebih khusus dari segi isi dan tujuannya. Pendidikan yang dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda ini khususnya berpusat pada pengetahuan dan ketrampilan duniawi, yaitu pengetahuan umum. Sedangkan

---

[32] Mahmud Yunus, *Sejarah pendidikan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Mahmudiyah), hal. 196

[33] *Ibid,*hal. 226 – 227

lembaga pendidikan Islam lebih ditekankan pada pengetahuan dan ketrampilan yang berguna bagi penghayatan agama.[34]

Tetapi ternyata dengan diselenggarakannya pendidikan oleh pemerintah kolonial Belanda ini justru tidak lebih memberikan keleluasaan pendidikan pesantren yang dikelola orang-orang pribumi (umat Islam). Pemerintah kolonial berusaha menghalang-halanginya, terutama dengan mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijaksanaan yang dirasakan cukup menekan kegiatan pendidikan Islam di Indonesia. Dengan didirikannya lembaga pendidikan atau sekolah yang diperuntukkan bagi sebagian bangsa Indonesia, terutama bagi golongan priyayi dan pejabat, oleh pemerintah kolonial tersebut maka sejak itu terjadilah persaingan antara lembaga pendidikan tersebut dengan lembaga pendidikan pesantren Meskipun harus bersaing dengan sekolah-sekolah yang diselenggarakan pemerintah kolonial, lembaga pendidikan pesantren tetap eksis dan bahkan mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Jika pada awal abad ke-19, waktu Belanda mulai mendirikan sekolah-sekolah, jumlah pesantren di Jawa hanya sebanyak 1.853 buah, dengan jumlah santri 16.556 orang. Tetapi pada akhir abad ke-19 jumlah pesantren mencapai 14.929 buah dan jumlah santri sebanyak 222.663 orang.[35]

Persaingan yang terjadi tersebut bukan hanya segi-segi ideologis dan cita--cita pendidikan saja, melainkan juga muncul dalam bentuk perlawanan politis, bahkan perlawanan fisik. Hampir semua perlawanan fisik (peperangan) melawan pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-19 bersumber atau paling tidak mendapatkan dukungan dari pesantren. Perang-perang besar, seperti Perang Diponegoro, Perang Paderi, Perang

---

[34] Karel A Steenbrink, *Pesantren Sekolah, Madrasah*....., hal. 24

[35] Zamakhsari Dhofier....., hal. 33

Banjar, sampai perlawanan-perlawanan rakyat yang bersifat lokal tersebar di mana-mana, tokoh-tokoh pesantren atau alumni-alumninya memegang peranan utama.[36]

Menyaksikan kenyataan yang demikian menyebabkan pemerintah kolonial diakhir abad ke-19 mencurigai eksistensi pesantren, yang mereka anggap sebagai sumber perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Oleh karena itu, pemerintah kolonial mulai mengadakan pengawasan dan campur tangan terhadap pendidikan pesantren dengan mengeluarkan ketentuan-ketentuan pengawasan terhadap perguruan yang mengajarkan agama, seperti pesantren dan guru-guru agama yang akan mengajar juga harus mendapatkan izin dari pemerintah kolonial di wilayah setempat. Sejalan dengan perkembangan sekolah-sekolah Barat yang mulai menjangkau sebagian bangsa Indonesia, pesantren pun mulai mengalami perkembangan yang bersifat kualitatif. Ide-ide pembaruan dalam Islam, termasuk dalam bidang pendidikan mulai masuk ke Indonesia dan mulai merasuk ke dunia pesantren, serta dunia pendidikan Islam pada umumnya. Ide-ide pembaruan dalam dunia Islam itu timbul sebagai akibat kemunduran umat Islam dan merajalelanya penjajahan Barat. Umat Islam menyadari akan kelemahan dan ketertinggalannya dari Barat, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi maupun budaya. Olah karena itu usaha pembaruan pada umumnya ditekankan pada pembaruan dalam dunia pendidikan.

Pada garis besarnya ide pembaruan dalam bidang pendidikan yang berkembang di dunia Islam, bisa digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

a. Pembaruan pendidikan Islam yang berorientasi kepada sistem pendidikan yang berlaku di Barat, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebudayaan. Ilmu

---

[36] Sartono Kartodirjo, *Sejarah Nasional*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1977), hal. 131

pengetahuan dan teknologi yang berkembang di dunia Barat dipandang sebagai sumber kekuatan. Oleh karena itu kelompok ini mengembangkan sistem dan isi pendidikan Barat.

b. Pembaruan pendidikan Islam yang berorientasi pada ajaran Islam yang murni. Mereka berpandangan bahwa sesungguhnya ajaran Islam sendiri merupakan sumber bagi kemajuan dan perkembangan peradaban serta ilmu pengetahuan, sebagaimana telah dibuktikan oleh sejarah pada zaman keemasan Islam di masa lalu. Usaha pembaruan pendidikan bagi mereka harus kembali kepada sumber ajaran Islam yang murni Al-Qur'an dan Al-Sunnah, yang tidak pernah membedakan antara agama dan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya ilmu pengetahuan dan teknologi tidak boleh terpisah dari Islam. Pendidikan harus juga mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagimana yang dikembangkan oleh Barat.

c. Gerakan pembaruan pendidikan yang berorientasi pada kekuatan-kekuatan dan latar belakang sejarah bangsa masing-masing. Dengan memperbaiki dan mengembangkan apa yang telah ada, dengan menghilangkan kelemahan–kelemahannya, serta memasukkan unsur-unsur baru yakni ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya pesantren diharapkan akan membawa kemajuan bagi bangsa yang bersangkutan.

Ketiga pandangan tersebut, tampaknya mempunyai pengaruh terhadap perkembangan dan pembaruan pesantren dan sistem pendidikan Islam di Indonesia menjelang abad ke-20. Sistem penyelenggaraan sekolah-sekolah modern klasikal mulai masuk ke dunia pesantren. Sementara itu, di beberapa pesantren mulai memperkenalkan sistem madrasah, sebagaimana sistem yang berlaku di sekolah umum, tetapi pelajarannya dititik-beratkan pada pelajaran agama saja. Kemudian pada pcrkem-bangan berikutnya, madrasah-madrasah yang semata-mata bersifat diniyah berubah menjadi madrasah-madrasah yang mengajarkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan umum.

4. Masa kemerdekaan dan Pembangunan

Pesantren dalam perjalanan sejarahnya sejak masa kebangkitan nasional hingga masa perjuangan kemerdekaan, senantiasa tampil dan berpartisipasi aktif. Oleh karena itu, setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya, pesantren masih mendapatkan tempat dihati masyarakat Indonesia. Ki Hajar Dewantoro yang dikenal sebagai tokoh pendidikan nasional dan sekaligus Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan RI yang pertama menyatakan bahwa pondok pesantren merupakan dasar pendidikan nasional, karena sesuai dan selaras dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.[37]

Sejak awal kehadiran pesantren dengan sifatnya yang lentur ternyata mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat serta memenuhi tuntutan masyarakat. Begitu juga pada masa kemerdekaan dan pembangunan, pesantren mampu menampilkan dirinya berperan aktif mengisi kemerdekaan dan pembangunan, terutama dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Meskipun demikian, pesantren juga tidak luput dari berbagai kritik terhadap kelemahan sistem pendidikannya, dengan manajemen tradisional. Tetapi beberapa pesantren dapat segera mengidentifikasi persoalan ini dan melakukan berbagai inovasi untuk pengembangan pesantren. Di samping pengetahuan agama Islam, diajarkan pula pengetahuan umum dan ketrampilan (*vocational*) sebagai upaya untuk memberikan bekal tambahan kepada santri agar selepas mereka dari pesantren dapat hidup mandiri dan mapan di tengah-tengah masyarakat. Beberapa pesantern juga telah menggunakan sistem klasikal dengan saran dan prasarana pengajaran sebagaimana yang ada di sekolah-sekolah umum. Bahkan ada

---

[37] Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantoro, *Pendidikan*, bagian Pertama, cet. 2, (Yogyakarta: Majlis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1977) hal. 371

juga pesantren yang lebih cenderung mengelola dan membina lembaga pendidikan formal, baik madrasah atau sekolah umum mulai dari tingkat dasar, menengah hingga perguruan tinggi.

Transformasi kelembagaan pondok pesantren ini mengindikasikan terjadinya keberlangsungan dan perubahan dalam sistem pondok pesantren. Dalam konteks ini, pesantren di samping mampu terus menjaga eksistensinya juga sekaligus bisa mengimbangi dan menjawab perubahan dan tuntutan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa tradisi pesantren memiliki kelenturan budaya yang memungkinkannya bisa tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Penting ditegaskan di sini bahwa transformasi tersebut pada kenyataannya tiak menggeser ciri khas dan sekaligus kekuatannya sebagai lembaga pendidikan Islam.

Demikianlah pesantren yang telah ada di Indonesia sejak dua abad lalu tidak mengalami penurunan peran. Bahkan justru semakin eksis dan diminati masyarakat. Ini bisa dilihat dari pertumbuhan jumlah pesantren dalam tiga dasa warsa terakhir, sejak tahun 1970-an. Data Departemen Agama, misalnya, menyebutkan pada 1977 jumlah pesantren sekitar 4.195 buah dengan jumlah santri sekitar 677.384 orang. Jumlah tersebut mengalami peningkatan berarti pada 1981, di mana pesantren berjumlah sekitar 5.661 buah dengan jumlah santri sebanyak 938.397 orang. Pada 1985 jumlah pesantren mengalami kenaikan lagi menjadi 6.239 dengan jumlah santri mencapai sekitar 1.084.801 orang dan pada 1997/1998 Departemen Agama telah mencatat 9.388 buah pesantren dengan santri sebanyak 1.770.768 orang.[38]

---

[38] Data Potensi Pondok Pesantren Seluruh Indonesia tahun 1997 (Jakarta: Diroktoral Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1997)

Pertumbuhan dan perkembangan pesantren di Indonesia tampaknya cukup mewarnai perjalanan sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Kendatipun demikian pesantren dengan berbagai kelebihannya, tentunya juga tidak dapat menghindar dari kritik terhadap kekurangannya. Di antara kelebihan pesantren terletak pada kemampuan menciptakan sebuah sikap hidup universal yang merata, yang diikuti oleh semua warga pesantren, dilandasi oleh tata nilai yang menekankan pada fungsi mengutamakan beribadat sebagai pengabdian kepada Sang Khalik dan memuliakan guru sebagai jalan untuk memperoleh pengetahuan agama yang hakiki, yang dikejar adalah totalitas kehidupan yang diridhoi Allah. Sikap hidup yang demikian terlepas dari acuan-acuan struktural yang ada dalam susunan kehidupan masyarakat di luar pesantren. Hal ini dapat membuat santri mampu bersikap hidup tidak menguntungkan diri pada lembaga mesyarakat yang manapun.

Sementara kekurangan-kekurangannya antara lain adalah tidak adanya perencanaan yang terperinci dan rasional atas jalannya pendidikan itu sendiri, tidak adanya keharusan membuat kurikulum dalam susunan yang lebih rnudah dicerna dan dikuasai oleh santri (anak didik), tidak adanya pembedaan yang jelas antara hal-hal yang benar-benar diperlukan dan yang tidak diperlukan dalam suatu tingkat pendidikan. Pedoman yang digunakan tidak mengandung nilai-nilai pendidikan, akibatnya adalah tidak adanya landasan filsafat pendidikan yang jelas dan terperinci.[39]

Bagaimanapun keadaan pesantren dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kita mengakui besarnya arti pesantren dalam perjalanan bangsa Indonesia, khususnya Jawa, dan tidak

---

[39] Abdurrohman Wahid, *Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pesantren,* (Yogyakarta: LKiS, 2001) hal. 56-59.

berlebihan jika pesantren dianggap sebagai bagian historis bangsa Indonesia yang harus dipertahankan. Apalagi pesantren telah dianggap sebagai lembaga pendidikan asli Indonesia yang mengakar kuat dari masa pra-Islam. []

BAB IV
PONDOK PESANTREN DAN GLOBALISASI

A. Pendahuluan

Era globalisasi berpandangan bahwa dunia didominasi oleh perekonomian dan munculnya hegemoni pasar dunia kapitalis dan ideologi neoliberal yang menopangnya. Untuk mengimbangi derasnya arus dan tantangan globalisasi, perlu dikembangkan dan ditanamkan karakteristik pendidikan Islam yang mampu berperan dan menjawab tantangan tersebut yakni pesantren. Istilah Globalisasi saat ini cukup familiar di masyarakat, baik dalam bahasa lisan maupun tulisan. Istilah ini memiliki arti yang cukup luas. Globalisasi bukanlah sekadar konsep sosiologi hubungan internasional dalam pengertian tradisional. Juga bukan hanya interdepedensi ekonomi atau konvergensi negara-negara bangsa menjadi suatu masyarakat industri. Globalisasi merupakan proses strukturisasi dunia sebagai suatu keseluruhan yang menghadirkan dua kecenderungan yang saling bertentangan, yaitu proses penyeragaman *(homogenization)* dan pemberagaman *(differenciation),* sehingga membuat interaksi yang rumit antara hal-hal yang lokal dan global. Globalisasi mempunyai rangkaian panjang yang saling terhubung dari berbagai aspek.

Globalisasi menjadikan kebudayaan Barat sebagai trend kebudayaan dunia. Kebudayaan Barat yang didominasi budaya

Amerika yang sarat dengan konsumerisme, hedonisme dan materialisme menjadi kiblat bagi kebudayaan-kebudayaan di negara-negara berkembang. Budaya global ini melanda dunia ditandai dengan hegemonisasi *food* (makanan), *fun* (hiburan), *fashion* (mode), dan *thought* (pemikiran). Budaya-budaya ini terkadang dipaksakan masuk ke dalam budaya lain, sehingga tidak jarang terjadi "benturan-benturan" kebudayaan karena adanya perbedaan dan bahkan pertentangan.

Arus globalisasi yang kian deras berdampak cukup signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan. Institusi pendidikan sebagai institusi yang selalu berkembang seiring dengan denyut nadi perkembangan zaman tampaknya tidak terlepas dari dampak globalisasi ini. Arus globalisasi juga melanda pondok pesantren yang merupakan institusi pendidikan tertua di Indonesia. Namun demikian, pondok pesantren terus berupaya mengikuti dan mengimbangi irama dan alur perkembangan globalisasi. Bagaimana pondok pesantren mengimbangi perkembangan zaman dan arus globalisasi, dan apakah dengan mengimbangi perkembangan zaman ini ia tetap mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan non formal yang selalu menjunjung nilai-nilai moral.

B. Globalisasi sebagai Tantangan

Globalisasi berasal dari kata globalisme, yakni paham kebijakan nasional yang memperlakukan seluruh dunia sebagai lingkungan yang pantas untuk pengaruh politik.[1] Proses tersebut tentunya penuh dengan dinamika yang menuntut setiap negara menata rumah tangganya seideal mungkin. Atas nama "tatanan dunia baru"[2] itulah globalisasi dianggap menyatukan dunia dalam

---

[1] Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* (Bandung: M2S, 1997), hal. 148.

[2] Jam'iah Al-Islah Al-Ijtima'i, *Globalisasi dalam Timbangan Islam,* (Solo: Penerbit Era Intermedia, 2002), hal. 13

satu bingkai dan menghapuskan batas-batas geografis yang memisahkan antara negara satu dan lainnya. Tentunya didukung oleh adanya kebebasan mengakses informasi melalui berbagai media informasi dan telekomunikasi, khususnya internet.

John Tom Linson dalam tulisannya, *Cultural* Globalization*: Placing and Displacing the West,* sebagaimana dikutip oleh Amer al-Roubaie, mengintisarikan globalisasi sebagai berikut:

> "Proses hubungan yang rumit antarmasyarakat yang luas dunia, antarbudaya, institusi dan individual. Globalisasi merupakan proses sosial yang mempersingkat waktu dan jarak dari pengurungan waktu yang diambil baik secara langsung maupun tidak langsung,Jadi dengan dipersingkatnya jarak dan waktu, dunia dilihat seakan-akan semakin mengecil dalam beberapa aspek, yang membuat hubungan manusia antara yang satu dengan yang lain semakin dekat."[3]

Globalisasi terjadi pada setiap negara, tidak ada satu organisai atau satu negara pun yang mampu mengendalikannya. Simbol dari sistem global adalah luasnya jaringan.[4] Akbar S. Ahmed dan Hastings memberi batasan bahwa globalisasi pada prinsipnya mengacu pada perkembangan-perkembangan yang cepat di dalam teknologi komunikasi, transformasi dan informasi yang bisa membawa bagian-bagian dunia yang jauh menjadi hal yang bisa dijangkau dengan mudah.[5]

Teori globalisasi yang menandai dan menguji munculnya suatu sistem budaya global terjadi karena berbagai perkembangan

---

[3] Amer Al-Roubaie, *Globalisasi dan Posisi Peradaban Islam,* dalam jurnal Islamiyah Tahun I No. 4/Januari-Maret 2005 (Jakarta: Institute for Study of Islamic Thought and Civilization [INSIST] dan Khoirul Bayan), hal. 11.

[4] Louis P. Pojman, *Global Political Philosophy,* (New York: McGraw Hill, 2003), hal. 198.

[5] Ahmad Qodi Azizy, *Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 19.

sosial dan budaya, seperti adanya sistem satelit dunia, penggalian gaya hidup kosmopolitan, munculnya pola konsumsi dan konsumerisme global, munculnya even-even olahraga internasional, penyebaran dunia pariwisata, menurunnya kedaulatan negara bangsa, timbulnya sistem militer global (baik dalam bentuk *peace keeping force,* pasukan multinasional maupun pakta pertahanan regional dan lain-lain), pengakuan tentang terjadinya krisis-krisis lingkungan dunia, berkembangnya problem-problem kesehatan berskala dunia (seperti AIDS), munculnya lembaga-lembaga politik dunia (seperti PBB), munculnya gerakan-gerakan politik global, perluasan konsep demokrasi dan hak-hak asasi manusia dan interaksi rumit antara berbagai agama dunia.[6]

Bahkan lebih dari sekadar proses-proses di atas, globalisasi menyangkut kesadaran bahwa dunia ini adalah satu tempat milik bersama. Karena itu, globalisasi didefinisikan sebagai kesadaran yang tumbuh pada tingkat global bahwa dunia ini adalah sebuah lingkungan yang terbangun secara berkelanjutan, atau sebagai suatu proses sosial di mana hambatan-hambatan geografis berkaitan dengan pengaturan-pengaturan sosial dan budaya yang semakin surut.[7]

Menurut Qodri Azizy, istilah globalisasi dapat berarti juga alat dan dapat pula berarti ideologi. Sebagai alat karena merupakan wujud keberhasilan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama sekali di bidang komunikasi. Sebagai alat, globalisasi sangat netral. Ia berarti dan sekaligus mengandung hal-hal posistif, ketika dimanfaatkan untuk tujuan yang baik. Sebaliknya, ia berakibat negatif, ketika hanyut ke dalam hal-hal yang negatif. Sedangkan sebagai ideologi sudah mempunyai arti tersendiri

---

[6] M. Atho Mudzhar, *Masyarakat Indonesia Baru dalam Perspektif Global,* dalam jurnal Mukaddimah, No. 8 Tahun. V 1999, (Yogyakarta: Kopertais, 1999), hal. 43

[7] *Ibid.*

dan netralitasnya sangat berkurang. Oleh karena itu, tidak aneh kalau kemudian tidak sedikit yang menolaknya. Sebab kondisi ini berpotensi menimbulkan benturan nilai, antara nilai yang dianggap sebagai sebuah ideologi globalisasi dan nilai-nilai agama, termasuk agama Islam. Baik sebagai alat maupun sebagai ideologi, globalisasi merupakan ancaman dan sekaligus tantangan.[8]

Pertama, sebagai ancaman. Dengan alat komunikasi seperti Hand Phone, TV, para bola, telepon dan internet, kita dapat berhubungan dengan dunia luar. Dengan para bola atau internet, kita dapat menyaksikan hiburan porno dari kamar tidur. Kita dapat terpengaruh oleh segala macam bentuk iklan yang sangat konsumtif. *Kedua,* tantangan. Di pihak lain, jika globalisasi memberi pengaruh pada hal-hal, nilai dan praktik yang positif, maka seharusnya ia menjadi tantangan bagi umat manusia untuk mampu menyerapnya, terutama sekali hal-hal yang tidak mengalami benturan dengan budaya lokal atau nasional, terutama sekali nilai agama.[9]

Memang, globalisasi merupakan proses rumit yang melibatkan semua unsur kehidupan manusia seperti aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, agama, bahasa dan teknologi. Hingga saat ini globalisasi tetap dianggap sebagai proses rumit bukan hanya karena definisinya yang tidak jelas, tetapi juga karena dampak yang ditimbulkannya. Seperti yang dikatakan Giddens, globalisasi merupakan proses rumit dan merupakan proses tunggal. Proses-proses rumit itu juga berlangsung dalam model berlainan dan berlawanan.[10] Pada kenyataannya, globalisasi semakin mengarah kepada satu bentuk "imperialisme budaya" *(culture imperialism)* Barat terhadap budaya-budaya

---

[8] Ahmad Qodri Azizy, *Melawan.....,* hal. 19-21.

[9] *Ibid.*

[10] Giddens, dalam Amer al-Roubaie, hal. 12.

lain. Dalam sebuah makalah yang berjudul *Herirtage, Culture and Globalization,* Amer al-Roubaie, seorang pakar globalisasi di *International Institute of Islamic Thuoght and Civilization, International Islamic University Malaysia* (ISTAC-IIUM) mencatat:

> "Telah dipahami secara luas bahwa gelombang trend budaya global dewasa ini sebagian besar merupakan produk Barat, menyebar ke seluruh dunia lewat keunggulan teknologi elektronik dan berbagai bentuk media dan sistem komunikasi. Istilah-istilah seperti penjajahn budaya (*culture imperialism*), penggusuran kultural (*cultural cleansing*), ketergantungan budaya (*cultural dependency*), dan penjajahan elektronik (*electronic colonialism*) digunakan untuk menjelaskan kebudayaan global baru serta berbagai akibatnya terhadap masyarakat non-Barat."[11]

Rekayasa informasi global terus berlangsung melalui media-media massa global. Masyarakat global mengalami ketidakberdayaan *(disempowerment)* menghadapi hegemoni informasi dalam berbagai hal. Memang benar adanya slogan *"Barangsiapa yang mampu menguasai informasi, dialah yang akan menguasai dunia*." Seperti ungkapan salah seorang tokoh globalisasi Amerika Serikat, "kalau perjanjian diperlukan, kami akan melakukannya. Jika penyerahan dibutuhkan, kami akan menyerahkannya, jika informasi dibutuhkan, kami akan memberikannya dan jika kekuatan dibutuhkan demi stabilitas keamanan kami, kekuatan akan kami gunakan."[12]

Pada dasarnya konsep globalisasi yang dirancang oleh Barat adalah upaya untuk mengonsolidasikan segala kekuatan; ekonomi, politik, militer dan pertahanan dalam satu sentral, yaitu Amerika, Eropa, Jepang dan Cina. Jika ditelusuri lebih dalam, konsep globalisasi ini sebenarnya telah dirancang dan berjalan

---

[11] Amer al-Roubaie dalam Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat: dari Hegemmoni Kristen ke Dominasi Sekular-Liberal*, (Jakarta: Gema Innsani Press, 2005), hal. 20.

[12] Jam'iah Al-Islah Al-Ijtima'i, *Globalisasi.....,* hal. 28.

cukup lama. Fenomena ini telah dimulai menjelang berakhirnya Perang Dunia II di mana telah terjadi suatu titik balik dalam masalah-masalah global. AS sebagai kekuatan yang dominan mempersiapkan dirinya untuk melangkah pada suatu sistem internasional yang bertujuan membawa bangsa-bangsa di dunia ke dalam suatu sistem dengan aturan-aturan dan norma-norma yang disepakati bersama (*collective scurity*).[13]

Berbagai kemajuan dan kecanggihan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi, menjadikan betapa era sekarang merupakan era kesejagatan yang tak mengenal batas ruang. William Greider dalam bukunya yang berjudul *One World Ready or Not: The Manic Logic of Global Capitalism* (1997), mengisyaratkan bahwa saat ini dunia sudah masuk pada masa di mana tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi dari yang lain *(there is no place to hide from the other),* masa yang ditandai oleh semangat kapitalisme dengan meningkatnya industrialisasi, informasi dan transformasi. Di samping itu zaman ini juga memaksa kita untuk bertemu satu dengan lainnya dengan terjadinya *cross cultural context.* Segala bentuk perilaku manusia dapat dengan mudah dinilai orang lain, saling memengaruhi dan bahkan saling bertukar posisi secara bergantian. Semua aktivitas manusia mempunyai jaringan satu sama lain misalnya jaringan buruh, perdagangan, pendidikan dan kebudayaan.

Richard Hibart mengatakan bahwa Globalisasi merupakan sesuatu yang sudah menjadi tradisi negara-negara industri maju atas dunia ketiga, dan untuk beberapa kurun waktu kita menamainya dengan Imperialisme.[14] Era ini juga ditandai oleh dua proses sosial yang paradoks, yaitu proses homologisasi dan

---

[13] Hasan Habib, *Peta Politik Internasional dan Pengaruhnya terhadap Konstalasi Perpolitikan Indonesia,* paper disampaikan pada Munas Alim Ulama DPP PKB, 28 Mei 2003.

[14] Jam'iah Al-Islah Al-Ijtima'i. *Globalisasi……,* hal. 15.

proses paralogisasi dengan semakin menguatnya kesatuan *(increasing of unity)* di satu pihak namun dipihak lain juga terjadi penguatan perbedaan *(increasing of diversity).* Hal itu juga akan berdampak pada institusi pendidikan, termasuk pondok pesantren. Orientasi agama yang sebelumnya datang dari sumber yang sangat terbatas, orang tua, keluarga dan lingkungan saja. sekarang diakses dari beragam sumber yang tak terbatas.

Dengan kecangihan sains dan teknologi, manusia bahkan dapat menciptakan jalan kematiannya sendiri yang bisa dipilih. Di samping itu manusia semakin dimanjakan dengan produk-produk canggih yang bisa mengisolasikan dirinya dari orang lain karena segala kebutuhannya telah terpenuhi. Manusia menjadi sangat konsumtif dan disetir oleh semangat kapitalisme pasar. Ketergantungan terhadap produk baru sangat besar untuk hanya takut dikatakan sebagi orang yang tidak gaul dan kuno. Semua kebutuhan materi telah tercukupi oleh kemudahan-kemudahan yang ditawarkan globalisasi. Yang lebih parah adalah terjadinya pergeseran ukuran kesuksesan, yaitu hanya dinilai dengan kesuksesan harta dan kekuasaan.

C. Eksistensi Pondok Pesantren dalam Rekaman Sejarah

Pondok Pesantren merupakan lembaga studi Islam yang punya andil historis terhadap gerakan sosial keagamaan. Lembaga ini merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Maka wajarlah apabila banyak kalangan yang menyebutnya sebagai "Bapak" pendidikan Islam di negara yang mayoritas penduduknya muslim ini. Pondok pesantren lahir karena adanya tuntutan dan kebutuhan masyarakat, karena pada zaman dahulu belum ada lembaga pendidikan formal yang mengajarkan pendidikan agama.[15]

---

[15] Lihat Zamakhsyari Dhofir, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES, 1994); Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, *Islam Historis:*

Pondok pesantren lahir karena adanya tuntutan dan kebutuhan masyarakat, karena pada zaman dahulu belum ada lembaga pendidikan formal; dan meskipun ada hanya dapat diikuti oleh kelompok-kelompok tertentu. Karena adanya tuntutan dari umat, maka pondok pesantren selalu menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat disekitarnya sehingga kehadirannya di tengah-tengah masyarakat tidak menjadi terasing. Dalam waktu yang sama segala aktivitasnya juga mendapat dukungan dan apresiasi dari masyarakat sekitar.[16]

Menurut data Departemen Agama, pada tahun 1948-1985 diperoleh keterangan bahwa pesantren tertua didirikan pada tahun 1062 di Pamekasan Madura, dengan nama pesantren Jan Tampes II.[17] Namun keterangan ini kurang meyakinkan, karena apabila ada pesantren Jan Tampes II maka ada pesantren Jan Tampes I yang lebih tua.[18] Ada pula yang mencatat bahwa pondok pesantren muncul sejak munculnya masyaraka Islam di Nusantara pada abad XIII.

Seiring dengan perjalanan waktu, pendidikan pondok pesantren mengalami perkembangan. Lembaga ini semakin berkembang secara cepat dengan adanya sikap non-kooperatif ulama terhadap kebijakan "Politik Etis" pemerintah kolonial Belanda pada akahir abad XIX. Sikap non-koperatif dan *silent*

Dinamika Studi Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Galang Press, 2002), hal. 65-82.

[16] Hasan Basri, *Pesantren: Karakteristik dan Unsur-unsur kelembagaan,* dalam Buku *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2001), hal.101.

[17] Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hal. 41.

[18] Dwi Priyanto, Inovasi Kurikulum Pesantren:(Memproyeksikan Model Pendidikan Alternatif Masa Depan dalam *Mabda'* Jurnal Studi Islam dan Budaya, (Purwokerto: Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokwerto, 2006), hal. 22.

opposition para ulama itu kemudian ditunjukkan dengan mendirikan pesantren di daerah-daerah yang jauh dari kota untuk menghindari intervensi pemerintah kolonial serta memberikan kesempatan kepada rakyat yang belum memperoleh pendidikan.[19] Pada masa penjajahan kolonial Belanda inilah pondok pesantren mendapat tekanan yang cukup berat.[20]

Proklamasi kemerdekaan Indonesia membawa angin segar bagi perkembangan pendidikan Islam, khusunya pesantren, karena berarti tidak ada lagi tekanan dari penjajah asing untuk menjalankan dan mengembangkan pendidikan agama Islam. Pada masa ini pesantren mulai menata diri dan memapankan posisinya sebagai lembaga pendidikan agama. Menurut Abdurrahman Wahid sebenarnya sejak tahun 1920-an pondok pesantren telah mulai mengadakan eksperimentasi dengan mendirikan sekolah-sekolah di lingkungan pesantren sendiri. Kemudian pada tahun 1930-an, pondok pesantren sudah memperlihatkan kurikulum. Puncaknya kemapanan sekolah agama negeri di lingkungan pondok pesantren terjadi sekitar 1960-an meski saat itu juga terjadi percobaan isolasi di berbagai pondok pesantren, terutama menjelang G 30 S/PKI.[21]

Memasuki era 1970-an pondok pesantren mengalami perubahan sangat signifikan. Perubahan dan perkembangan ini bisi dilihat dari dua sudut pandang. *Pertama,* pesantren mengalami perkembangan kuantitas luar biasa, baik di wilayah rural (pedesaan), sub-urban (pinggiran kota), maupun urban

---

[19] M. Sulthon Mashhud dan Moh. Khusnurdilo, *Manajemen Pondok Pesantren*, (Jakarta: Diva Pustaka, 2003), hal. 1-2.

[20] Abdurrahman Mas'ud, *Intelektual Pesantren,* (Yogyakarta: LKiS, 2004), hal. 77.

[21] Abdurrahman Wahid, dalam Prolog Buku *Pondok Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hal. 20.

(perkotaan). Data Departemen Agama menyebutkan bahwa pada tahun 1977 jumlah pondok pesantren masih sekitar 4.195 buah dengan jumlah santri sekitar 677.394 orang. Kemudian pada tahun 1985 jumlah ini meningkat cukup drastis di mana jumlah pondok pesantren mencapai 6.239 buah dengan jumlah santri mencapai 1.084.801 orang. Pada tahun 1997, jumlah ini melonjak menjadi 9.388 buah dengan jumlah santri 1.770.768 orang. Pada tahun 2001 jumlah pondok pesantren terus meningkat mencapai 11.312 buah dengan jumlah santri 2.737.805 orang.[22]

Perkembangan kedua menyangkut penyelenggaraan pendidikan. Sejak tahun 1970-an bentuk-bentuk pendidikan yang diselenggarakan di pondok pesantren sudah sangat bervariasi. Bentuk-bentuk ini dapat diklasifikasikan menjadi empat tipe, yaitu: *pertama,* pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan menerapkan kurikulum nasional, baik yang hanya memiliki sekolah keagamaan maupun yang juga memiliki sekolah umum. *Kedua,* pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk madrasah dan mengajarkan ilmu-ilmu umum meskipun tidak menerapkan kurikulum nasional. *Ketiga,* pondok pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam bentuk Madrasah Diniyah (MD). *Keempat,* pondok pesantren yang hanya menjadi tempat melaksanakan pengajian.[23]

Dengan demikian, jelas bahwa pondok pesantren tidak hanya bisa bertahan, akan tetapi juga berkembang dan menempati posisi penting dalam percaturan pendidikan di Indonesia. Dalam mengembangkan pola pendidikan dan mentransformasikan diri menjadi lembaga pendidikan modern, tampaknya pondok pesantren tidak tergesa-gesa dan cukup berhati-hati. Hal ini

---

[22] M. Sulthon Mashhud dan Moh. Khusnurdilo, *Manajemen.....,* hal. 4.
[23] *Ibid.,* hal. 5.

terlihat dari penerimaan dan penyesuaian pola pendidikan yang hanya dalam skala yang sangat terbatas pada hal-hal yang mendukung komunitas pesantren itu sendiri. Azyumardi Azra berpendapat bahwa pesantren pada mulanya hanya *rural-based institution* yang kemudian menjadi lembaga pendidikan urban, yaitu munculnya sejumlah pondok pesantren di kota-kota.[24]

Ketika gerbang reformasi dibuka, peran dan kiprah pesantren semakin diperhitungkan dalam berbagai bidang. Dari bidang pendidikan, ekonomi, politik hingga sosial. Dalam bidang politik misalnya, pesantren dilirik oleh kalangan elit politik sebagai aset yang dapat menjadi penunjang tujuan politik. Sentralitas kepemimpinan kiai dan banyaknya massa sang kiai membuat pondok pesantren sering didekati dan dimanfaatkan oleh kalangan elit politik.

D. Keberadaan Pesantren di Tengah Arus Globalisasi

Kelahiran pondok pesantren adalah karena adanya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Karena lahir dari tuntutan umat, maka pondok pesantren selalu menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat di sekitarnya sehingga kehadirannya di tengah-tengah masyarakat tidak menjadi terasing. Dalam waktu yang sama segala aktivitasnya juga mendapat dukungan dan apresiasi dari masyarakat sekitar.

Harus diakui bahwa pesantren merupakan institusi pendidikan yang melekat dalam perjalanan kehidupan bangsa Indonesia sejak beratus tahun lalu. Sehingga Ki Hajar Dewantara pernah mencita-citakan model pesantren ini sebagai sistem pendidikan Indonesia, karena pesantren sudah melekat dalam

---

[24] Azyumardi Azra, *Kuantitas dan Perubahan* Pengantar Buku Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Pemikiran Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hal. XXII.

kehidupan di Indonesia serta merupakan kreasi budaya Indonesia.[25] Pondok pesantren adalah aset pendidikan bangsa Indonesia yang selama ini agak terabaikan. Selama ini, pondok pesantren cenderung dibiarkan berjalan sendiri, dan kurang begitu diakomodir dalam sistem pendidikan nasional, padahal sumbangan yang diberikan oleh pesantren terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia sangatlah besar. Karakter khas pondok pesantren yang merakyat, merupakan potensi yang seharusnya diperhatikan dan diberdayakan secara berkelanjutan dan terprogram.

Meskipun pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan produk zaman klasik, di era modern seperti sekarang ini, ia tetap tegar dan eksis. Ini terjadi karena adaptasi terhadap lingkungan dan perkembangan zaman. Pondok pesantren terus menyesuaikan diri dan berkembang seiring dengan perputaran roda zaman.

Arus globalisasi yang kian hari semakin deras tidak menggoyahkan nilai-nilai moral yang menjadi pegangan pokok bagi semua civitas dan warga pesantren. Bahkan tatanan moral yang dipegangi inilah yang membuat ia semakin eksis. Nilai-nilai moral tersebut menjadi pegangan dan acuan dalam segala aktivitas dan menjadi titik pokok sistem pendidikan yang dikembangkan di dalamnya. Pendidikan pesantren memang unik dan eksklusif. Dalam banyak perspektif, pendidikan di pesantren selalu menampakkan wajah yang terkesan tradisional, klasik serta apa adanya. Namun demikian, pesantren tetap mampu memikat sebagai komunitas masyarakat untuk tetap dijadikan sebagai tempat menuntut ilmu. Karena itu, jika dilihat dengan teleskop antropologis, pesantren bisa dibaca dalam berbagai aspek. Sebagai lembaga pendidikan, namun di sisi lain pesantren

---

[25] Lihat Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik.....*, hal. 121.

juga bisa dibaca sebagai sebuah identitas masyarakat yang strategis.[26]

Sebagai institusi pendidikan yang fungsional, pondok pesantren mampu memberi jawaban atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Pondok pesantren memang bukan hanya sekadar lembaga pendidikan. Pesantren juga merupakan medium budaya dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman Wahid, jarang sekali orang yang berpandangan demikian. Pondok pesantren bukan hanya lembaga pendidikan intelektual, akan tetapi juga, pendikan spiritual, pendidikan moral, dan sebagai lembaga pendidikan sosial kemsyarakatan. Di sini, pesantren mendidik santri kehidupan praktis di masyarakat tentang bagaimana mereka menjalankan peran sosial (*social role)* dalam masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan dan medium kebudayaan masyarakat, pondok pesantren dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat.

Hal di atas membuktikan bahwa sistem pendidikan pesantren sudah cukup antisipatif terhadap kebutuhan masyarakat. selain itu sistem pendidikannya juga dapat dengan mudah menyesuaikan dengan sistem pendidikan formal dari pemerintah. Hal ini terbukti dengan pengapdosian sistem pendidikan umum yang merupakan proses timbal balik antara pola pendidikan di pondok pesantren dan sistem pendidikan umum yang ada di luar pesantren. Meskipun menurut Nurcholish Madjid pesantren tidak mengenal istilah kurikulum, terutama pada masa pra-kemerdekaan, pesantren telah memberikan materi pendidikan yang cukup terprogram dan bahkan memberikan materi keterampilan.

---

[26] Mahfudz Ridwan, *Mendorong Pesantren Sebagai Agen Pendamping Perubahan Di Masyarakat*, Digital Library Responsible Development International (RDI), 2005.

Memang harus diakui, kebanyakan pesantren tidak merumuskan dasar dan tujuan pesantren secara eksplisit dalam bentuk kurikulum, karena tujuan pendidikan pesantren ditentukan oleh kiai, sesuai dengan perkembangan pesantren tersebut.[27] Namun demikian, pesantren terbukti telah mampu mempertahankan eksistensi meskipun perubahan zaman berjalan dengan pesat. Bukan hanya itu, sebagai lembaga pendidikan, pondok pesantren mampu menyesuaikan diri dengan berbagai situasi dan kondisi. Penyesuaian diri ini adalah keikutsertaan sepenuhnya dalam arus pengembangan ilmu pengetahuan (modern) dan teknologi.

Pondok pesantren selalu memodernisasi sistem pendidikannya dengan tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama saja, akan tetapi juga mengajarkan mata pelajaran umum yang ada dalam sistem pendidikan nasional. Dengan sistem pendidikan seperti ini maka pondok pesantren tidak hanya dapat bertahan, akan tetapi juga berkembang. Melihat perkembangan zaman yang semakin pesat, pesantren segera menyesuaikan diri dengan melakukan proses urbanisasi intelektual. Santri-santri yang tadinya hanya membaca kitab kuning, memakai sarung, peci, sekarang merambah "dunia lain" dengan menjadi seorang pemuda yang membaca kitab putih, memakai jeans dan gaya perlente, menulis menggunakan komputer, dan tidur di gedung-gedung yang serba beton. Maka wajar apabila ada yang menyebutnya dengan gejala "santri kota."[28] Bahkan, santri yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi mempunyai potensi intelektualitas yang lebih tinggi dibanding dengan yang lain.[29] Tidak dapat dipungkiri

---

[27] Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik*....., hal. 59.

[28] Mochamad Sodik, *Gejolak Santri Kota: Aktivis Muda NU Merambah Jalan Lain*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000).

[29] Azyumardi Azra, *Islam Substantif: agar Umat Tidak Jadi Buih,* (Bandung: Mizan, 2000), hal. 422.

bahwa kalangan santri, khususnya yang telah berpendidikan tinggi, ikut aktif dalam semua segi kehidupan nasional, termasuk pemerintahan.[30]

Berdasarkan catatan di atas, tidak mengherankan jika pesantren telah banyak melahirkan intelektual atau cendekiawan yang berkiprah di tingkat nasional maupun internasional. Nama-nama seperti Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim, Fakih Usman, Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, dan banyak lagi lainnya adalah tokoh-tokoh yang berasal dari lingkungan pesantren. Tokoh-tokoh ini menurut Dawam Rahardjo disebut sebagai kiai intelektual atau ulama cendekiawan.[31]

Ketika wacana Islam liberal mengemuka, pondok pesantren juga tidak mau tinggal diam. Tidak jarang pemikiran-pemikiran yang progresif dan di luar pemikiran mainstream muncul dari pesantren. Bahkan santri-santri atau mahasiswa yang pernah mengenyam pendidikan pesantren tampak mempunyai pandangan keislaman yang lebih berani dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah belajar di pesantren. Hal ini tidak terlepas dari peran civitas akademika pesantren yang mulai membuka diri dengan memperkaya literatur-literatur mereka dengan wacana Islam kontemporer seperti Syed Hussein Nashr, Fazlurrahman, Hasan Hanafi, Nashr Hamid Abu Zaid dan intelektual Islam kontemporer lainnya.

Dampak negatif globalisasi sejatinya dapat diimbangi oleh pesantren dengan memanfaatkan kemudahan-kemudahan akses informasi yang ditawarkan untuk menunjang proses pembelajaran dan memperluas jaringan dakwah. Komputer,

---

[30] Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan,* (Bandung: Mizan, 1998), hal. 86.

[31] Dawam Rahardjo, *Intelektual Inteligensia dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim,* (Bandung: Mizan, 1996), hal. 28 dan 33.

internet, dan alat-alat modern sudah dapat dijumpai di pondok-pondok pesantren. Para santri dibeberapa pesantren juga telah mengikuti pelatihan teknologi informasi untuk menambah wawasan agar mereka tidak gagap teknologi. Pelatihan ini didukung penuh oleh lembaga-lembaga baik pemerintah maupun swasta. Seperti pelatihan yang diselenggarakan oleh PT Telkom dan harian umum Republika yang diluncurkan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk kalangan pesantren yang bertajuk 'Santri Indigo'. Kegiatan ini bertujuan agar para santri tidak gagap teknologi (gatek) internet. Kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan santri-santri yang berkarya dan berbudaya digital, mengedepankan mentalitas positif dalam mencipta dan berkarya, dan membina silaturahmi dengan membentuk *Indonesia Digital Community* (Indigo).[32]

Pendidikan pesantren modern tidak boleh mengenyampingkan pendidikan teknologi. Terutama dalam menumbuhkan *Islamic technological-attitude* (sikap benar berteknologi secara Islami) dan *technological-quotient* (kecerdasan berteknologi) sehingga santri memiliki motivasi, inisiatif dan kreativitas untuk melek teknologi. Suatu saat mereka diharapkan mampu merebut teknologi, dan mengembangkan teknologi tersebut dengan nilai-nilai kepesantrenan yang kental. Untuk itulah pendidikan semacam SMK didirikan di pesantren. Suatu usaha untuk mencetak tenaga profesional di bidang IT tetapi berakhlaq santri.[33] Bahkan sudah ada pesantren yang menjadi mitra penyelenggara Program Pendidikan Jarak Jauh berbasis Internet dari sebuah institusi di Jakarta. Untuk menindaklanjuti program tersebut, diselengarakan workshop yang bertema "*Workshop*

---

[32] *Agar Santri Tidak Gaptek*. http://santri-indigo.org/?p = 7 , diakses pada 11 Maret 2008.

[33] Assalaam, *Blog Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pesantren,* http:// www pondokassalaam.blogspot.com/, diakses pada 11 Maret 2008.

Needs Assessment for Distance Learning for Islamic Transformation through Pesantren" yang dilanjutkan dengan "*Curriculum Workshop for Distance Learning for Islamic Transformation through Pesantren"*. Arahnya memetakan kondisi di pesantren berkaitan dengan pelaksanaan program dan perancangan kurikulum untuk melaksanakan program-program tersebut.

Santri pesantren diberi pelajaran untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara-cara yang elegan dan beradab. Dengan kata lain, Pesantren selalu mengajarkan santrinya bagaimana membangun keshalehan spiritual yang diambil dari berbagai sumber, mulai dari yang klasik sampai kontemporer. Penanaman nilai moral spiritual ini yang nantinya harus ditransformasikan ke dalam masyarakat. Dengan demikian maka alumninya mempunyai tradisi klasik yang mungkin tidak didapatkan dari lemabaga pendidikan lain. Tempaan disiplin dan filosofi yang membekas bagi para santri ketika mereka berkiprah di tengah-tengah masyarakat.[34] Inilah karakteristik unik yang selalu melekat pada pesantren dan setiap warganya.

Dari sini kita dapat melihat bahwa pendidikan pondok pesantren cukup terbuka dan tidak monoton atau kolot. Pesantren dapat menyesuaikan dan sekaligus membawa dirinya dalam segala situasi dan kondisi. Namun demikian perubahan zaman tidak dapat memudarkan eksistensi pesantren dan bahkan menjadi momentum untuk mengembangkan pola pendidikan yang lebih mampu melahirkan pemikir-pemikir Islam yang siap terjun di masyarakat dalam kondisi dan situasi apapun.

---

[34] Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, *Wajah Baru Islam Indonesia,* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 53-54.

E. Kiprah Riil Pondok Pesantren

Keberadaan pondok pesantren di Indonesia merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari sistem pendidikan nasional. Sayangnya, selama ini pengembangan pendidikan pesantren sering kali luput dari perhatian pemerintah. Padahal, pesantren telah banyak melahirkan para ulama serta tokoh-tokoh yang membantu tercapainya kemerdekaan bangsa Indonesia. Di tengah pergulatan masyarakat informasional, pesantren dipaksa memasuki ruang kontestasi dengan institusi pendidikan lainnya, terlebih dengan sangat maraknya pendidikan berlabel luar negeri yang menambah semakin ketatnya persaingan mutu lulusan (*out-put*) pendidikan. Kompetisi yang semakin ketat itu, mendorong institusi pesantren untuk mempertaruhkan kualitas *out-put* pendidikannya agar tetap unggul dan tetap menjadi pilihan masyarakat, terutama umat Islam. Ini mengindikasikan, bahwa pesantren perlu banyak melakukan pembenahan internal dan inovasi baru agar tetap mampu meningkatkan mutu pendidikannya.

Dewasa ini pesantren berhadapan dengan arus globalisasi dan modernisasi yang ditandai dengan cepatnya laju informasi dan teknologi. Akibatnya, pesantren harus mau melakukan perubahan format, bentuk, orientasi dan metode pendidikan dengan catatan tidak sampai mengubah visi, misi dan orientasi pesantren. Artinya, perubahan tersebut hanya pada sisi luarnya saja, sementara pada sisi dalam (ruh, semangat, pemahaman keagamaan, nilai-nilai, tradisi dan ideologi pesantren) masih tetap dipertahankan.

Dalam hal ini, Zastrawi mengatakan ada tiga pola sikap pesantren dalam menghadapi arus modernisme dan globalisasi, yaitu; *pertama*, menolak secara total. Sikap ini dibuktikan dengan menutup diri secara total terhadap modernisme, baik pola pikir maupun sistem pendidikan dengan cara menjaga otentisitas

tradisi dan nilai pesantren secara ketat, baik dalam bentuk simbol maupun substansi.

Kedua, menerima modernisme secara total, baik pemikiran, model maupun referensinya. Di sini tidak saja diajarkan nilai-nilai agama dengan referensi kitab klasik, tetapi juga diajarkan pengetahuan umum. Kurikulum yang digunakan juga kurikulum umum, tidak lagi kurikulum pesantren yang menggunakan kitab *mu'tabar*.

Ketiga, menerima modernisme secara selektif. Sikap ini ada proses kreatif dari kalangan pesantren dalam menerima modernisme, yaitu menerima sebagian modernisme kemudian dipadu dengan tradisi pesantren. Pada pola ini pesantren menerapkan metode modern dalam sistem pengajaran, memasukkan referensi-referensi pengetahuan umum dalam pendidikan, maupun kitab-kitab klasik dengan pola pengajaran ala pesantren tetap diterapkan.

F. Tantangan Global Pondok Pesantren

Eksistensi pondok pesantren dalam menyikapi perkembangan zaman, tentunya memiliki komitmen untuk tetap menyuguhkan pola pendidikan yang mampu melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang handal, kekuatan otak (berpikir), hati (keimanan), dan tangan (keterampilan), merupakan modal utama untuk membentuk pribadi santri yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks dilingkungan masyarakat, maka pesantren harus berani tampil dan mengembangkan dirinya sebagai pusat pendidikan unggulan. Pesantren tidak hanya mendidik santri agar memiliki ketangguhan jiwa, jalan hidup yang lurus, budi pekerti yang mulia, tetapi juga dibekali dengan berbagai disiplin ilmu.

Untuk mencapai tujuan di atas, para santri harus dibekali nilai-nilai keislaman yang terintegrasi dengan ilmu-ilmu mod-

ern. Pembekalan ilmu-ilmu modern dapat ditempuh dengan mempelajari tradisi ilmu pengetahuan agama dan penggalian dari teknologi ketrampilan umum dengan menjadikan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber inspirasi dan rujukan awal. Karena, tradisi keilmuan dan kebudayaan Islam sangat kaya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sayyid Kuthb;

Yang benar, bahwasannya agama (Islam) bukan mengganti ilmu dan kebudayaan, bahkan bukan pula musuh ilmu dan kebudayaan. Agama Islam merupakan bingkai ilmu dan kebudayaan poros/sumbu untuk ilmu kebudayaan, begitu pula sebagai metode ilmu dan kebudayaan dan membatasi bingkai dan poros yang mampu memberi hukum (peraturan) bagi segala masalah kehidupan.

Mencermati karakteristik umat Islam serta kecenderungan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa kini dan mendatang, disertai dengan perkembangan kebudayaan, maka pilihan format pesantren harus lebih menekankan terhadap sains dan teknologi. Pesantren sesungguhnya menyimpan kekuatan yang sangat luar biasa untuk menciptakan keseluruhan aspek lingkungan hidup dan dapat memberi informasi yang berharga dalam mempersiapkan kebutuhan yang inti untuk menghadapi masa depan. Oleh sebab itu pesantren harus mampu merespon dan tanggap atas semua itu.

Kiranya perlu disadari bersama, bahwa di era global ini, masyarakat tidak hanya dituntut piawai dalam bidang ilmu agama. Agama hanya difungsikan tak lebih sebagai benteng moral. Agama bukan alat untuk merebut kemenangan dalam dunia yang semakin kompetitif ini. Masa kejayaan agama, kini telah lewat. Karenanya, untuk menghadapi zaman yang tingkat kompetitifnya semakin "menjadi" ini, bukan benteng moral saja yang perlu dipentingkan, melainkan penanaman *skill* dan upaya-upaya pengembangan dalam sektor modern; seperti jasa,

ekonomi, bisnis, politik, komputer, teknologi tepat guna, dan sebagainya. Hal-hal inilah yang akan turut membantu masyarakat dalam menjawab tuntutan zaman modern ini. Hal inilah yang disebut dengan dakwah dengan kiprah nyata (*da'wah bi al-hal*) yang harus dimainkan pesantren.

Di sinilah peran pesantren perlu ditingkatkan. Tuntutan globalisasi tidak mungkin dihindari. Salah satu langkah yang bijak adalah mempersiapkan pesantren tidak "ketinggalan kereta" agar tidak kalah dalam persaingan. Menyikapi hal ini, paling tidak tiga hal yang mesti digarap oleh pesantren agar tetap sesuai dengan jati dirinya. *Pertama*, pesantren sebagai lembaga pendidikan pengkaderan ulama. Fungsi ini tetap harus melekat pada pesantren, karena pesantren adalah satu-satunya lembaga pendidikan yang melahirkan ulama. Namun demikian, tuntutan modernisasi dan globalisasi mengharuskan ulama memiliki kemampuan lebih, kapasitas intelektual yang memadai, wawasan, akses pengetahuan dan informasi yang cukup serta responsif terhadap perkembangan dan perubahan.

Kedua, pesantren sebagai lembaga pengembangan ilmu pengetahuan khusus agama Islam. Pada tatanan ini, pesantren masih dianggap lemah dalam penguasaan ilmu dan metodologi. Pesantren hanya mengajarkan ilmu agama dalam arti *transfer of knowledge.* Karena pesantren harus jelas memiliki potensi sebagai "lahan" pengembangan ilmu agama. *Ketiga*, dunia pesantren harus mampu menempatkan dirinya sebagai transformasi, motivator, dan inovator. Kehadiran pesantren dewasa ini telah memainkan perannya sebagai fungsi itu meskipun boleh dikata dalam taraf yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Sebagai salah satu komponen masyarakat, pesantren memiliki kekuatan dan "daya tawar" untuk melakukan perubahan-perubahan yang berarti.

Dari zaman ke zaman, generasi ke generasi peran pesantren melalui fungsi dan tugas santri adalah memperjuangkan tegaknya

nilai-nilai religius serta berjihad mentransformasikannya ke dalam proses pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Tujuan yang dimaksud adalah agar kehidupan masyarakat berada dalam kondisi berimbang (*balanced*) antara aspek dunia dan ukhrawi.

Pondok pesantren selama ini selalu tampak dengan wajah yang terkesan tradisional, klasik dan apa adanya. Namun tidak dipungkiri, dengan citra wajah yang muncul seperti itulah, justru pesantren tidak lapuk dimakan zaman. Bahkan di tengah gempuran arus globalisasi yang kian menggila, pesantren tetap mampu tampil memikat masyarakat untuk tetap dijadikan sebagai tempat menuntut ilmu. Bahkan menjadi lembaga pendidikan alternatif yang paling diminati.

Arus globalisasi yang kian hari kian deras membawa kebudayaan asing merasuk hampir ke seluruh aspek kehidupan manusia dewasa ini. Derasnya arus globalisasi ini tidak menggoyahkan eksistensi pondok pesantren sebagai institusi pendidikan non-formal. Pondok pesantren mampu mengikuti irama gerak laju zaman tanpa harus terbawa dan tenggelam di dalamnya. Pondok pesantren selalu memodernisasi sistem pendidikannya dengan tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama saja, akan tetapi juga mengajarkan mata pelajaran yang ada dalam sistem pendidikan nasional. Dengan sistem pendidikan seperti ini maka pondok pesantren tidak hanya dapat bertahan, akan tetapi juga berkembang dan tidak pernah tertinggal. Maka wajar apabila pesantren mampu mencetak banyak pemikir Islam.

Seluruh civitas akademika pondok pesantren, termasuk kiai yang menjadi "tuan" di dalamnya dituntut untuk berfikir dinamis dan kontekstual agar pondok pesantren dapat terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan denyut nadi waktu yang terus mengalir. Hal ini dilakukan agar pesantren tidak tertinggal oleh

kemajuan dunia modern. Pesantren harus dapat membuktikan diri bahwa ia bukanlah institusi pendidikan kelas dua yang terpinggirkan, kumuh, kolot dan anti kemajuan. Pesantren harus dapat memaksimalkan potensi yang telah dimilikinya; menambah wawasan dan berinteraksi secara maksimal dengan kemajuan zaman; berperan lebih aktif dalam ranah sosial masyarakat secara maksimal; dan mengaktualisasikan diri dalam rangka membangun masyarakat intelektual yang shalih sehingga masyarakat akan lebih cerdas dan dan tidak kaget dalam menerima kenyataan seperti modernisasi khususnya masyarakat pesantren. []

BAB V
KEPEMIMPINAN PONDOK PESANTREN

A. Kepemimpinan

Konsep kepemimpinan, Peter dan Yeni mengatakan bahwa kata kepemimpinan, berasal dari kata pimpin. Pimpin sama arti dengan bimbing dan tuntun. Pemimpin adalah mengetahui atau mengepalai rapat, perserikatan, pengarahan dan lain sebagainya. Bimbingan berarti memberi petunjuk pelajaran dan sebagainya. Sedangkan tuntun ialah memegangi tangan seseorang sambil berjalan. Selanjutnya kata pimpin yang diawali dengan *ke* dan diakhiri dengan *an*, adalah menunjukkan arti perihal memimpin.

Pemimpin adalah orang yang memimpin dan mengarahkan orang lain sehingga orang yang dipimpin itu mematuhi dengan sukarela apa yang diperintahkannya. Pemimpin diartikan sebagai seorang yang mempunyai wewenang untuk memerintah orang lain yang di dalam pekerjaanya untuk mencapai tujuan. Jadi kepemimpinn adalah ketermpilan dan seni mengarahkan dan mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan tugas tertentu dalam rangka mencapai tujuan bersama.[1]

---

[1] Anoraga, Pandji, *Psikologi Kepemimpinan*, (Renika Cipta: Yogyakarta, 1991), hal.1

B. Kepemimpinan Kiai Pesantren

Menurut asal-usulnya, istilah kiai dalam bahasa Jawa dipakai untuk tiga jenis gelar dengan peruntukan yang berbeda satu sama lain. *Pertama*, kiai sebagai gelar kehormatan bagi benda-benda yang dianggap keramat, misalnya Kiai Garuda Kencana, sebagai nama bagi salah satu kereta kuda milik kraton Yogyakarta. *Kedua*, sebagai gelar kehormatan untuk orang tua pada umumnya. Dan, *ketiga*, sebagai gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada ahli agama Islam (ulama) yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab--kitab klasik kepada para santrinya.[2]

Secara lebih ringkas, warga NU memberikan beberapa kriteria bagi seseorang untuk dihormati dan bisa dipanggil kiai: *pertama*, ia memiliki pesantren; *kedua*, bertakwa kepada Allah; *ketiga*, mengemban tugas utama mewarisi misi (*risalah*) rasul yang meliputi ucapan, ilmu, ajaran, perbuatan, tingkah laku, mental, dan moralnya, dan *keempat*, tekun beribadah (baik yang wajib maupun yang sunnah), *zuhud* (melepaskan diri dari ukuran dan kepentingan materi duniawi), mempunyai ilmu *akhirat* (ilmu agama dalam kadar yang cukup), mengerti kemaslahatan umat atau masyarakat, dan mengabdikan seluruh ilmunya untuk Allah dengan dilandasi niat yang benar, baik dalam berilmu maupun beramal.[3]

Sedangkan menurut Quaraisy Shihab, ada empat tugas utama yang harus dijalankan oleh seorang kiai sesuai tugas kenabian: *pertama*, menyampaikan (*tabligh*) ajaran-ajaran-Nya, sesuai dengan perintah:

---

[2] Zamahhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren....,*hal.55

[3] Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama,* (LKIS: Yogyakarta, 2007), hal.58

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ

Wahai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu (QS. al-Maidah [5]: 67).

Kedua, menjelaskan ajaran-ajaran-Nya, berdasarkan ayat:

وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ .....ۖ

Dan kami turunkan Al-Quran kepadarnu untuk kamu jelaskan kepada manusia (QS. an-Nahl [I6]: 44).

Ketiga, memutuskan perkara atau problem yang dihadapi masya-rakat, berdasarkan ayat:

وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِۚ

Dan Allah turunkan bersama mereka al-Kitab dengan benar, agar dapat memutuskan perkara yang diperselisihkan oleh manusia (QS. al-Baqarah [2]: 213).

Keempat, memberikan contoh pengamalan, sesuai dengan *hadits* yang diriwayatkan dari Aisyah r.a., yang menyatakan bahwa perilaku Âabi adalah praktik dari Al-Qur'an.

Terma kiai sering diidentikkan dengan kata ulama. Di dalam Al-Qur'an, kata ulama disebut dua kali: *pertama*, dalam konteks ajakan Al-Qur'an untuk memerhatikan turunnya hujan dari langit, beraneka ragamnya buah-buahan, gunung, binatang, dan manusia, yang diakhiri dengan ayat: *Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama* (QS. Fathir [35]: 28). Ayat ini menggambarkan bahwa yang dinamakan ulama adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang ayat-ayat Allah yang bersifat kealaman (*kauniyyah*). *Kedua*, dalam

konteks pembicaraan Al-Qur'an yang kebenaran kandungannya telah diakui oleh ulama Bani Israil.

Kemudian, di dalam hadits Nabi disebutkan: "Sungguhnya *para* ulama *di bumi seperti bintang di langit, yang menerangi umat dalam kegelapan, baik di daratan maupun di lautan* (HR. az-Zuhri dari Anas)." Dalam hadits lain dinyatakan: *"Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi*." Wahjosumidjo menyebutkan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas kelompok dalam rangka merumuskan dan pencapaian tujuan. Kimbal Young yang dikutip oleh K. Kartono mengatakan,[4] Kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang didasari oleh kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi khusus. Kepemimpinan ialah penggunaan kekuasaan secara cerdas dan peka sedangkan menurut Keating, kepemimpinan adalah suatu proses dengan berbagai cara mempengaruhi orang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan bersama.[5]

Nawawi berpendapat bahwa kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan mendorong sejumlah orang (dua atau lebih) agar bekerja sama dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah pada tujuan bersama.[6]

C. Asas Kepemimpinan

Asas-asas kepemimpinan yang baik menurut K. Kartono, (1) kemanusiaan, mengutamakan sifat-sifat kemanusiaan.

---

[4] Kartono Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (C.V. Rajawali Perss: Jakarta, 1986), hal. 40

[5] Keating. J. Charles, *Kepemimpinan Teori dan Pengembangannya*, (Kanisius: Yogyakarta, 1994), hal 9

[6] Nawawi, Hadari 8. Martiwi.M, *Kepemimpinan yang Efektif*, (UGM Press,Yogyakarta. 1993), hal. 9

Pembimbing manusia oleh manusia, untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya setiap individu, demi tujuan-tujuan human. (2) Effesiensi, effesiensi tehnis atau sosial, berkaitan dengan terbatasannya sumber, material dan manusia, atas prinsip penghematan dan adanya nilai-nilai ekonomis, serta asas-asas managemen modern. (3) Kesejahteraan kebahagiaan lebih merata, menuju taraf kehidupan yang lebih tinggi.[7]

Dalam kaitan ini Garungan, menyatakan bahwa tiap-tiap pemimpin sekurang-kurangnya hendaknya memiliki tiga ciri kemampuan yakni. (1) persepsi social, yang dimaksud adalah kecakapan untuk dapat melihat dan memahami perasaan-perasaan, sikap-sikap dan kebutuhan. (2) kemampuan berpikir abstrak, bahwa pemimpin-pemimpin itu mempunyai kecakapan untuk berpikir abstrak yang lebih tinggi daripada rata-rata anggota kelompoknya. (3) kestasbilan emosi, bahwa kestabilan dan kemantapan emosi merupakan faktor penting dalam kepemimpinan.

Sedangkan sifat yang harus dimiliki pemimpin sebagaimana yang katakan J. Slikboer yang dikutip oleh Fattah, Pemimpin hendaknya memiliki sifat-sifat: (1) dalam bidang intelektual, (2) berkaitan dengan watak, dan (3) berhubungan dengan tugasnya sebagai pemimpin. Cirri-ciri lain yang berbeda dikemukakan oleh Ruslan Abdulgani bahwa pemimpin harus mempunyai kelebihan dalam hal: (1) menggunakan pikiran; (2) rohani, dan (3) jasmani.

D. Faktor-Faktor dan Sifat-Sifat Pemimpin

Saksono, mengatakan bahwa dalam kepemimpinan terdapat empat faktor: yaitu pengikut, pemimpin, komunikasi dan situasi. Erat dengan praktik kepemimpinan terdapat istilah motivasi

---

[7] Kartono Kartini, *Pemimpin*..... , hal. 9

yang berhubungan dengan ide gerakan dan apabila dinyatakan dengan secara sederhana, maka sebuah motif merupakan hal yang mendorong atau menggerakkan, untuk berperilaku, adalah motivasi.

Motivasi yang digerakkan dan diupayakan dalam kepemimpinan dapat dilihat dalam tipe kepemimpinan. Yang jelas tidak akan sama pemimpin dengan pemimpin yang lain, dalam mengaktifkan gaya kepemimpinannya. Akan tetapi ada beberapa sifat yang menonjol dalam konsep kepemimpinan yang meliputi: Keterarahan, seorang pemimpin selalu akan menemukan jalan untuk maju. Ia akan menumbuhkan rasa keterarahan. Itu menckup pengidentifikasian sasaran baru.

Inspirasi, kepemimpinan berkaitan erat dengan inspirasi. Pendekatan pemimpin dan sikap yang diperlihatkannya mengobarkan motivasi. *Membangun tim*, seorang pemimpin dengan sendirinya cenderung berpikir dalam kerangka tim. Kelompok-kelompok individu ditransformasikan kedalam tim. *Teladan*, Kepemimpinan pada dirinya sendiri adalah teladan, seorang pemimpin harus memiliki hasilnya sendiri atau sumbangan langsung kepada tugas umum. Penerimaan, belum benar-benar menjadi pemimpin jika pemimpin itu belum diterima dalam hati dan pikiran mereka.

E. Tipe-Tipe Kepemimpinan

Tipe kepemimpinan dapat diartikan sebagai arah kebutuhan individual yang mendorong prilaku dalam berbagai situasi kepemimpinan. Sedangkan tipe atau tipologi kepemimpinan menurut Sigian, beliau mengatakan dari gaya kepemimpinan yang ada meskipun belum ada kesepakatan bulat tentang tipologi kepemimpinan yang secara luas, dikenal dewasa ini lima tipe kepemimpinan yang diakui keberadaannya yaitu Otokratik, Paternalistik, Kharismatik, Laissez Faire dan Demokratik.

1. Tipe Otokratik

Pemimpin otokratik dalam prakteknya akan menggunakan gaya kepemimpinan yang menuntut ketaatan penuh dari bawahannya dalam menegakkan disiplin menunjukkan kekakuan, benada keras dalam pemberian perintah atau intruksi dan menggunakan pendekatan positif dalam hal terjadinya penyimpangan oleh bawahan.

Perilaku kepemimpinan ini menurut Nawawi, menunjukkan ciri-ciri antara lain: (1) pelaksanaan tugas merupakan kegiatan terpenting, untuk itu ornag yang dipimpin harus diberi instruksi-instruksi agar melaksanakan tugasnya. (2) sanksi atau hukuman dijadikan alat agar orang-orang yang dipimpinnya berusaha melaksanakan tugasnya tanpa membuat kekeliruan.[8]

2. Tipe Paternalistik

Tipe paternalistik yaitu tipe kepemimpinan yang kebapakan. sifat-sifat dalam kepemimpinan nini adalah (1) dia menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak atau belum dewasa. (2) dia bersikap terlalu melindungi. (3) jarang dia memberikan kesempatan pada bawahannya untuk mengambil keputusannya sendiri. (4) dia hampir-hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk berinisiatif. (5) tidak pernah memberikan kesempatan pada pengikutnya untuk mengembangkan fantasi dan daya kreativitas. (6) selalu bersikap maha tahu dan maha besar.[9] Gaya kepemimpinan seorang yang paternalistic lebih bercorak pelindung, bapak dan guru. Artinya, kebersamaan bagi para anggota organisasi sedangkan pemimpin yang bersangkutan berada di atas para anggota tersebut.

---

[8] Nawawi, Hadari & Martiwi.M, *Kepemimpinan yang Efektif*, (Yogyakarta : UGM Press, 1993), hal. 85

[9] Lihat Kartini, *Kepemimpinan*.....hal.54

3. Tipe Kharismatik

Kepemimpinan yang kharismatik diartikan sebagai kemampuan mengerakkan orang lain dengan mendayagunakan keistimewaan atau kelebihan dalam sifat atau aspek kepribadian yang dimiliki pemimpinan, sehingga menimbulkan rasa menghormati, segan dan kepatuhan terhadap pemimpin.

4. Tipe Laissez Faire

Kartono, mengatakan tipe kepemimpinan kebalikan dari tipe otokratik atau otoriter. Pada tipe kepemimpinan *laissez faire* ini sang pemimpin praktis, sebab dia membiarkan kelompoknya berbuat semua sendiri, pemimpin tidak berpatisipasi dalam kegiatan kelompoknya.[10]

Pemimpin semacam ini menurut Siagian, beranggapan bahwa para anggota sudah mengetahui dan cukup dewasa untuk taat kepada permainan yang berlaku. Seorang pemimpin seperti ini cenderung memilih peranan yang pasif dan membiarkan organisasinya berjalan menurut temponya sendiri dan tanpa mencampuri bagaimana organisasi harus dijalankan dan digerakkan.

5. Tipe Demokratis

Kepemimpinan demokratis menempatkan manusia sebagai faktor utama dan yang terpenting dalam setiap kelompok. Tipe ini diwarnai dengan usaha mewujudkan dan mengembangkan hubungan manusiawi yang efektif berdasarkan prinsip saling menghormati dan menghargai yang satu dengan yang lain. Ralph White dan Ronald Lippi mengatakan sesuai yang dikutip oleh Winardi tipe demokratis ini memiliki karakter sebagai berikut:

---

[10] *Ibid.*

1. Semua *policis* merupakan bahan pembahasan kelompok dan keputusan kelompokyang dirangsang dan diBantu oleh pemimpin.

2. Perspektif aktivitas dicapai selama diskusi berlangsung. Dilukiskan langkah-langkah umum kearah tujuan kelompok dan apabila diperlukan nasehat teknis, maka pemimpin itu menyarankan dua atau lebih banyak prosedur-prosedur alternatif yang dapat dipilih.

3. Para anggota bebas bekerja dengan siapa yang mereka kehendaki dan pembagian tugas terserah kepada kelompok.

4. Pemimpin bersifat objektif dalam pujian dan kritiknya, ia berusaha menjadi anggota kelompok secara mental tanpa terlampau banyak melakukan pekerjaan tersebut.

F. Tipologi Kepemimpinan Kiai

Turmudi mengklasifikasikan tipologi kiai menjadi empat tipologi yaitu, *kiai perantren*, *kiai tarekat*, *kiai politik*, dan *kiai panggung*.[11] Ia menambahkan bahwa dalam kenyataannya seorang kiai dapat digolongkan dalam lebih dari satu kategori. Misalnya, ada seorang kiai politik yang terkenal karena ia menjadi anggota legislatif di sebuah kota. Akan tetapi, ia juga tergolong kiai panggung yang hampir setiap malam menyampaikan ceramah agama diberbagai tempat. Selain itu, ia juga tergolong kiai tarekat karena ia adalah wakil mursyid dalam struktur ketarekatan.

Kiai pesantren adalah mereka yang memusatkan perhatiannya pada aktivitas mengajar di pesantren untuk meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) masyarakat melalui pendidikan. Kiai model ini pada umumnya sangat ditaati oleh

---

[11] Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan,* (LKiS, Yogyakarta, 2003), hal.32-33

para santri, wali santri, dan masyarakat. Mereka berkeyakinan bahwa dengan mentaati para kiai maka akan terjamin eksistensi masa depannya.

Kiai tarekat adalah mereka yang memusatkan aktivitasnya dalam membangun kecerdasan hati (dunia batin) umat Islam. Oleh karena tarekat adalah sebuah lembaga formal maka pengikutnya adalah juga anggota formal gerakan tarekat. Jumlah pengikut kiai model ini bisa lebih banyak dibanding pengikut kiai pesantren, tentunya jika kiai tarekat tersebut berkedudukan sebagai *mursyid*. Sebab, melalui cabang-cabang yang ada di seluruh Indonesia para anggota tarekat secara otomatis menjadi pengikut kiai tarekat.

Kiai politik adalah mereka yang mempunyai perhatian (*concern*) untuk mengembangkan NU (Nahdhatul Ulama) dan pada umumnya terlibat dalam politik praktis. Pengembangan organisasi NU dalam kurun waktu yang cukup lama dikelola oleh kiai yang masuk dalam kategori ini. Kiai model ini juga memiliki pengikut meskipun jumlahnya tidak sebanyak pengikut dua tipologi kiai sebelumnya.

Kategori terakhir adalah *kiai panggung*. Mereka adalah para juru dakwah (*muballig-da'i*) yang hampir setiap hari menyampaikan ceramah agama di berbagai tempat. Mereka mengembangkan dan menyebarkan Islam melalui kegiatan dakwah. Pengikut kiai semacam ini juga sangat banyak dan tersebar di berbagai kabupaten dan propinsi. Terlebih lagi jika ia tergolong kiai panggung yang amat populer di Indonesia. Akan tetapi, jumlah kiai panggung yang populer tidaklah banyak, dan umumnya seorang kiai panggung hanya memiliki penga-ruh di tingkat kabupaten saja.

Semantara itu Warsono sebagaimana dikutip oleh Ali Maschan Moesa, mengklasifikasikan tipologi kepimimpinan kiai juga melakukan penelitian terhadap kiai menjadi tiga tipologi,

yaitu *kiai intelek-tual organik*, *kiai intelektual tradisional*, dan *kiai intelektual simultan*.[12] Klasifikasi tersebut didasarkan pada hasil kajian terhadap fungsi kiai dalam menghadapi dominasi negara dalam era pemerintahan Gus Dur menurut perspektif Gramci. Dalam perspektif Gramcian, kiai termasuk sosok yang bisa memosisikan diri sebagai intelektual organik, yang bertugas sebagai aparatur hegemoni. Akan tetapi, kiai juga dapat berfungsi sebagai intelektual tradisional, yang berusaha menegakkan kebenaran. Kedua fungsi tersebut bisa berjalam seiring, namun tidak jarang bertentangan antara yang satu dengan lainnya. Perbedaan kedua fungsi intelektual tersebut mengharuskan kiai untuk menentukan pilihan, apakah memilih sebagai intelektual organik atau intelektual tradisional, atau menjalankan kedua fungsi tersebut secara simultan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kehadiran kiai intelektual *organik* terkait dengan struktur produktif dan politik dari kelompok yang sedang berkuasa (dominan). Mereka berfungsi menguniversali sasikan pandangan-pandangan kelompok yang berkuasa dalam rangka mengorganisasi kesepakatan kelompok-kelompok subordinat sehingga para penguasa mendapatkan legitimasi. Mereka tampil sebagai juru kampanye dari penguasa atau kelompok yang berjuang untuk men-dapatkan kekuasaan dalam rangka menyebarkan dan menanamkan ideologi yang telah terorganisir. Mereka yang tergolong dalam tipologi ini adalah para kiai yang mempunyai hubungan dekat dengan Gus Dur, namun kedekatannya bukan karena hubungan darah atau jabatan politis, melainkan karena hubungan kultural dan organisatoris.

Secara kultural, para kiai memiliki hubungan dan dekat dengan Gus Dur karena ia adalah seorang kiai dan berasal dari

---

[12] Warsono, *Wacana Politik Kiai,Pada Era Pemerintahan Gus Dur, Apakah Sebagai Intelektual Organik atau Intelektual Tradisional,* (Disertasi tidak Diterbitkan, Universitas Air Langga, Surabaya, 2003), hal. 66-68

komunitas keluarga pesantren, terlebih lagi dia adalah cucu KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Bisri Syamsuri, di mana keduanya adalah pendiri Nahdhatul Ulama. Sementara secara organisatoris, para kiai memiliki kedekatan dengan Gus Dur karena pada saat menjadi presiden, ia masih men-jabat Ketua Umum PBNU (Pengurus Besar Nahdhatul Ulama). Sementara itu, yang dimaksud *kiai intelektual tradisional* adalah mereka yang memiliki otonomi dan tidak terkooptasi oleh kelompok yang dominan. Mereka menjalankan fungsi untuk menegakkan kebenaran yang diyakininya, dan tidak terikat oleh otonomi manapun, kecuali otonominya sendiri. Mereka adalah para kiai yang menjaga jarak dengan kekuasaan dan umumnya hanya berkosentrasi mengajar di pesantren dan menjalankan transformasi masyarakat.

Adapun kiai intelektual simultan adalah mereka yang berfungsi sebagai intelektual organic, namun dalam situasi yang lain mereka bisa berubah fungsinya sebagai intelektual tradisional. Pada era pemerinahan Gus Dur, yang termasuk tipologi ini adalah kiai-kiai yang menjadi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang mempunyai latar belakang pendidikan pesantren dan pendidikan umum. []

BAB VI
PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN

A. Pendahuluan

Era globalisasi dewasa ini dan di masa datang sedang dan akan mempengaruhi perkembangan sosial budaya masyarakat muslim Indonesia umumnya, atau pendidikan Islam, termasuk pondok pesantren khususnya. Bahwa masyarakat muslim tidak bisa menghindarkan diri dari proses globalisasi tersebut, apalagi jika ingin *survive* dan berjaya di tengah perkembangan dunia yang kian kompetitif di masa kini dan masa depan.

Dilihat dari tuntutan internal dan tantangan ekternal global, maka keunggulan-keunggulan yang mutlak dimiliki bangsa dan Negara Indonesia adalah penguasaan atas sains dan teknologi dan keunggulan kualitas sumberdaya manusia (SDM). Penguasaan sains dan teknologi, sebagaimana terlihat dalam pengalaman banyak negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman dan sebagainya, menunjukkan bahwa sains-teknologi merupakan salah satu faktor terpenting yang menghantarkan Negara-negara tersebut kepada kemajuan.

Sesuai dengan tujuan pembangunan Indonesia untuk mewujudkan manusia yang sejahtera lahir batin, maka

penguasaan atas sains dan teknologi memerlukan perspektif etis dan panduan moral. Sebab, seperti juga terlihat dalam pengalaman Negara-negara maju, kemajuan dan penguasaan atas sains-teknologi yang berlangsung tanpa perspektif etis dan bimbingan moral akan menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampak negatif, yang membuat manusia semakin jauh dari akses, dari pusat eksistensial-spritualnya. Ini pada gilirannya menciptakan masalah-masalah kemanusiaan yang cukup berat, di antaranya krisis nilai-nilai etis, dislokasi, alienasi, kekosongan nilai-nilai rohaniah, dan sebagainya.

Mempertimbangkan kenyataan ini, pengembangan dan penguasaan sains-teknologi di Indonesia seyogyanya berlandaskan pada wawasan moral dan etis, Indonesia mempunyai sejumlah modal dasar yang memadai untuk mewujudkan cita-cita ini. Di antara modal dasar terpenting adalah kenyataan bahwa rakyak dan bangsa Indonesia adalah umat yang agamis, yang sangat menghormati ajaran-ajaran agama. Peningkatan antusiasme keberagamaan itu pada gilirannya juga menimbulkan perkembangan-perkembangan baru pula terhadap pondok pesantren, selama ini pondok pesantren dikenal sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam yang telah turut membina dan mengembangkan SDM untuk mencapai keunggulan (*excellence*), meski selama ini dapat dikatakan relative "terbatas" pada bidang sosial keagamaan. Sebagai lembaga pendidikan Islam pondok pesantren sepanjang sejarahnya telah berperan besar dalam upaya-upaya meningkatkan kecerdasan dan martabat manusia.[1]

Sejak zaman penjajah, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang tumbuh dan berkembang di tengah-

---

[1] Azyumardi Azra, *Sosialisasi Politik dan Pendidikan Islam,* dalam Ismail SM dan Abdul Mukti (ed) *Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Msyarakat Madani*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2000), hal. 47

tengah masyarakat, eksistensinya telah mendapat pengakuan masyarakat. Ikut terlibat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak hanya dari segi moril, namun telah pula ikut serta memberikan sumbangsih yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebagai pusat pengajaran ilmu-ilmu agama Islam (*tafaqquh fiddin*) telah banyak melahirkan ulama, tokoh masyarakat, muballigh, guru agama yang sangat dibutuhkan masyarakat. Hingga kini pondok pesantren tetap konsisten melaksanakan fungsinya dengan baik, bahkan sebagian telah mengembangkan fungsinya dan perannya sebagai pusat pengembangan masyarakat.[2]

Tugas pokok yang dipikul pondok pesanten selama ini pada esensinya adalah mewujudkan manusia dan masyarakat muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt, dalam kaitan ini secara lebih khusus lagi, pondok pesantren bahkan diharapkan berfungsi lebih dari pada itu; ia diharapkan agar memikul tugas yang tak kalah pentingnya, yakni melakukan reproduksi ulama. Dengan kualitas keislaman, keimanan, keilmuan dan akhlaknya, para santri diharapkan mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya. Di sini, para santri diharapkan dapat memainkan fungsi ulama dan pengakuan terhadap keulamaan mereka biasanya pelan-pelan tapi pasti datang dari masyarakat. Selain itu juga pondok pesantren juga bertujuan untuk menciptakan manusia Muslim mandiri dan ini kultur pondok pesantren yang cukup menonjol yang mempunyai swakarya dan swadaya.

Dalam menghadapi era globalisasi dan informasi pondok pesantren perlu meningkatkan peranannya karena Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw sebagai agama yang berlaku seantero dunia sepanjang masa. Ini berarti ajaran Islam adalah global dan melakukan globalisasi untuk semua. Surat al-Hujurat:

---

[2] Depag RI 2003, hal. 1

13 kunci dari ayat di atas yakni setiap persaingan yang keluar sebagai pemenang adalah yang berkualitas, yaitu memiliki iman-takwa, kemampuan, ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan.[3]

Di sinilah peran pondok pesantren perlu ditingkatkan, tuntutan globalisasi tidak mungkin dihindari. Maka salah satu langkah bijak, kalau tidak mau dalam persaingan, adalah mempersiapkan pondok pesantren agar "tidak ketinggalan kereta". Azyumardi Azra mengatakan dengan demikian, keunggulan SDM yang ingin dicapai pondok pesantren adalah terwujudnya generasi muda yang berkualitas tidak hanya pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek afektif dan psikomotorik.[4] Tetapi, memandang tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa dan upaya dalam penguasaan sains-teknologi untuk turut memelihara momentum pembangunan, muncul pemikiran dan gagasan untuk mengembangkan pondok pesantren sekaligus sebagai wahana untuk menanamkan apresiasi, dan bahkan bibit-bibit keahlian dalam bidang sains-teknologi. Selain itu, pengembangan pesantren kearah ini tidak hanya akan menciptakan interaksi dan integrasi keilmuan yang lebih intens dan lebih padu antara "ilmu-ilmu agama" dengan "ilmu-ilmu umum", termasuk yang berkaitan dengan sains-teknologi.[5] Dalam kerangka ini, SDM yang dihasilkan pondok pesantren diharapkan tidak hanya mempunyai perspektif keilmuan yang lebih integrative dan komprehensif antara bidang ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu keduniaan tetapi juga memiliki kemampuan teoritis dan praktis tertentu yang diperlukan dalam masa industri dan pasca-industri.

---

[3] Rahim, 2001, hal.160

[4] Azyumardi Azra, *Sosialisasi Politik.....*,hal 48

[5] Azyumardi Azra, *Sosialisasi Politik dan Pendidikan Islam",* dalam Ismail SM dan Abdul Mukti (ed) *Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Msyarakat Madani*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 2000), hal 48

Berkaitan dengan hal tersebut, Mulyasa mengatakan bahwa peserta didik (santri) harus dibekali dengan berbagai kemampuan sesuai dengan tuntutan zaman dan reformasi yang sedang bergulir, guna menjawab tantangan globalisasi, berkontribusi pada pembangunan masyarakat dan kesejahteraan sosial, lentur, dan adaptif terhadap berbagai perubahan.[6]

Tantangan globalisasi pada satu pihak, dan kebutuhan menciptakan SDM unggul khususnya dalam sains dan teknologi sehingga mampu mendapatkan tempatnya dalam perkembangan dewasa ini dan masa mendatang dipihak lain, sesungguhnya menempatkan pondok pesantren ke dalam dilema yang sulit. Permasalahan seputar pengembangan model pendidikan pondok pesantren dalam hubungannya dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia (*human resources*) merupakan isu aktual dalam arus perbincangan kepesantrenan kontemporer. Maraknya perbincangan mengenai isu tersebut tidak bisa dilepaskan dari realitas empirik keberadaan pesantren dewasa ini kurang mampu mengoptimalisasi potensi yang dimilikinya. Setidaknya terdapat dua potensi besar yang dimiliki pesantren yaitu potensi pendidikan dan pengembangan masyarakat.

Khusus dalam bidang pendidikan, misalnya, pesantren dapat dikatakan kalah bersaing dalam menawarkan suatu model pendidikan kompetitif yang mampu melahirkan *out put* (santri) yang memiliki kompetensi dalam penguasaan ilmu sekaligus skill sehingga dapat menjadi bekal terjun kedalam kehidupan sosial yang terus mengalami percepatan perubahan akibat modernisasi yang ditopang kecangihan sains dan teknologi. Kegagalan pendidikan pesantren dalam melahirkan sumberdaya santri yang memiliki kecakapan dalam bidang ilmu-ilmu keislaman dan

---

[6] Mulyasa, E, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hal.vi

penguasaan teknologi secara sinergis berimplikasi terhadap kemacetan potensi pesantren kapasitasnya sebagai salah satu *agents of social change* dalam berpartisipasi mendukung proses transformasi sosial.[7]

Dikalangan pondok pesantren sendiri, setidaknya sejak dasawarsa terakhir telah muncul kesadaran untuk mengambil langkah-langkah tertentu guna meningkatkan kualitas SDM yang mampu menjawab tantangan dan kebutuhan transformasi sosial (pembangunan). Dari sinilah timbul berbagai model pengembangan SDM, baik dalam bentuk perubahan kurikulum pondok pesantren yang lebih berorientasi kepada kekinian atau dalam bentuk kelembagaan baru semacam pesantren agribisnis, atau sekolah-sekolah umum dilingkungan pondok pesantren, dan Bahkan dibeberapa pondok pesantren telah mengadopsi dengan teknologi maju, sudah mengajarkan berbagai macam teknologi yang berbasis keahlian dan pendidikan ketrampilan yang mengarah pada pendidikan profesi.

Penekanan pada bidang ketrampilan ini pondok pesantren semakin dituntut untuk *self supporting* dan *self financing*. Karena itu banyak pondok pesantren di antaranya seperti di pondok pesantren Sunan Drajat Lamongan mengarahkan para santrinya untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan vocational dalam usaha-usaha agribisnis yang mencakup pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan pengembangan industri dan sebagainya. Bahkan pondok pesantren Sunan Drajat memiliki beberapa unit usaha sebagai wahana pembelajaran ketrampilan Melalui kegiatan ketrampilan ini minat kewirausahaan para santri dibangkitkan, untuk kemudian diarahkan menuju pengembangan pengelolaan usaha-usaha ekonomi bila sang santri kembali ke masyarakat.

---

[7] Masyhud, 2003, hal.17

Pemikiran dan operasionalisasi menejemen pendidikan terpadu akan banyak ditentukan oleh tujuan dan arah keterpaduan, yang menyatakan bahwa arah pendidikan di Pondok Pesantren saat ini adalah dalam pembinaan IMTAQ, IPTEK dan Skill fungsional atas dasar kebutuhan. Keterpaduan akan ditekankan dalam menata manajemen dan implementasinya yang untuk saat ini harus dimiliki oleh lembaga pendidikan pesantren dengan strategi pengembangan pendidikan yang telah dirumuskan.

Atas dasar beberapa pemikiran di atas, pembahasan kita berfokus pada masalah Implementasi dari stategi pendidikan pesantren. Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, ketrampilan, maupun nilai, dan sikap.

Pada akhirnya akan membentuk pesantren yang merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional memiliki 3 unsur utama yaitu: 1) Kiai sebagai pendidik sekaligus pemilik pondok dan para santri; 2) Kurikulum pondok pesantren; dan 3) Sarana peribadatan dan pendidikan, seperti masjid, rumah kiai, dan pondok serta, sebagian madrasah dan bengkel-bengkel kerja keterampilan.

Di samping itu, sistem pendidikan pesantren melestarikan ciri-ciri khas dalam interaksi sosialnya, yaitu:

1. Adanya hubungan yang akrab antara santri dengan kiai serta taat dan hormatnya para santri kepada kiai yang merupakan figur kharismatik dan menjadi contoh yang baik.

2. Semangat menolong diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan kewiraswastaannya.

3. Jiwa dan sikap tolong-menolong, kesetiakawanan, dan suasana kebersamaan dan persaudaraan sangat mewarnai pergaulan di pesantren.

4. Disiplin waktu dalam melaksanakan pendidikan dan beribadah.

5. Hidup hemat dan sederhana.

6. Berani menderita untuk mencapai suatu tujuan, seperti tirakat, shalat tahajud diwaktu malam, *i'tikaf* di masjid untuk merenungkan kebesaran dan kesucian Allah SWT) Merintis sikap jujur dalam setiap ucapan dan perbuatan.

B. Pengembangan Program

Ketika arus global sudah merambah masyarakat secara menyeluruh, pendidikan pesantren dituntut menjadi semakin terstruktur dan kurikulum pesantren menjadi lebih tetap, sehingga saat ini banyak pesantren selain kurikulum agama, sekarang ini kebanyakan pesantren juga menawarkan mata pelajaran umum. Bahkan, banyak pesantren sekarang melaksanakan kurikulum Depdiknas. Sekolah-sekolah Islam yang melaksanakan kurikulum Depdiknas ini kebanyakan di Madrasah.

Dalam pengembangan program pendidikan di pesantren ada hal-hal yang harus di perhatikan oleh pengelola pesantren, yaitu, munculnya sekolah-sekolah terpadu (mulai tingkat dasar hingga menengah); dan penyelenggaraan sekolah bermutu yang sering disebut dengan *boarding school*. Nama lain dari istilah *boarding school* adalah sekolah berasrama. Para murid mengikuti pendidikan reguler dari pagi hingga siang di sekolah, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan agama atau pendidikan nilai-nilai khusus di malam hari. Selama 24 jam anak didik berada di bawah didikan dan pengawasan para ustadz pembimbing.

Di lingkungan sekolah ini mereka dipacu untuk menguasai ilmu dan teknologi secara intensif. Selama di lingkungan asrama mereka ditempa untuk menerapkan ajaran agama atau nilai-nilai khusus tadi, tak lupa mengekspresikan rasa seni dan

ketrampilan hidup di hari libur. Hari-hari mereka adalah hari-hari berinteraksi dengan teman sebaya dan para ustadz. Rutinitas kegiatan dari pagi hari hingga malam sampai ketemu pagi lagi, mereka menghadapi makhluk hidup yang sama, orang yang sama, lingkungan yang sama, dinamika dan romantika yang seperti itu pula. Dalam khazanah pendidikan kita, sekolah berasrama adalah model pendidikan yang cukup tua sebagaimana pesantren. Pengembangan progam pendidikan meliputi program jangka pendek. Tahun ke-1 sampai ke-3, menengah. Tahun ke-4 sampai ke-6, dan jangka panjang. Tahun ke-7 sampai ke-10. Dalam implementasinya program tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Kurikulum

a. Jangka pendek. Penerapan kurikulum dengan prosentase yang proposional, yaitu 80 persen disusun oleh pusat, dan 20 persen disusun ditingkat daerah atau disesuaikan dengan muatan lokal.

b. Jangka menengah. Pesantren atau sekolah memiliki kelenturan dalam menentukan waktu serta pesantren bisa mengubah beberapa pelajaran yang diangap penting.

c. Jangka panjang. Pembentukan standart inti kompetisi untuk menjaga kualitas pendidikan dan menngfokuskan semua pelajaran untuk menjaga kesatuan bangsa dan Negara.

2. Sarana dan Prasarana

Pengadaan sarana dan prasarana ditentukan dengan kebutuhan yang ada di pesantren atas kerjasama antara pesantren dan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

3. Tenaga Pendidikan

1. Kepala sekolah atau pengelola pesantren pelatihan-pelatihan tentang prinsip-prinsip kependidikan secara umum secara bertahap.

2. Memiliki keluasan dalam pengelolaan manajemen pesantren.

3. Memiliki kemandirian serta kebijakan yang luas, jauh dari intervensi.

4. Ustadz atau asatidz seleksi yang disesuaikan dengan kemampuan ustadz yang mengikuti standar pemerintah dan pesantren pengangkatan dan penempatan penghargaan

5. Pengawas atau komite pesantren pelatihan-pelatihan tentang prinsip-prinsip pendidikan dan kepengawasan menumbuhkan profesionalitas pengawasan.

C. Pengembangan Anggaran

Keberadaan pesantren sebagai bagian dari peran serta masyarakat dalam pendidikan juga mendapat penguatan dari UU Sisdiknas 2003. Pasal 54 menjelaskan: (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Bahkan, pesantren yang merupakan Pendidikan Berbasis Masyarakat diakui keberadaannya dan dijamin pendanaannya oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Pasal 55 menegaskan: (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah,

pemerintah daerah dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan pemerintah daerah.

Dalam implementasi angaran pesantren hal yang paling mendasar adalah memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a) Dana pembangunan, pengeluaran dana ini diatur dan digunakan untuk pembangunan dan pembenahan sarana fisik lembaga, dana ini di sesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah ustadz serta peserta didik yang ada di lembaga pendidikan tersebut.

b) Dana rutin, dana rutin adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional satu tahun anggaran. Dana rutin pengunaanya meliputi pelaksanaan progam belajar mengajar, pembayaran gaji ustadz maupun personil, serta pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana lembaga pendidikan.

Dari kedua prinsip ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Membangun unit belajar/ruang kelas baru berikut sarana-prasarananya termasuk sarana olahraga, yang ditempuh baik melalui anggaran pemerintah (pusat dan daerah) maupun melalui pemberdayaan pertisipasi masyarakat dengan pengelolaan yang efisien dan kontrol yang semakin ketat.

b. Mengembangkan model-model alternatif layanan pendidikan yang efisien dan relevan bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, baik kerena persoalan ketidakmampuan biaya maupun persoalan konflik sosial politik, untuk selanjutya dioperasionalkan oleh pengelola pendidikan daerah.

c. Memberikan beasiswa kepada keluarga miskin dan kepada siswa yang berprestasi dan bagi siswa yang secara sosial ekonomis tidak beruntung, yang bersumber dari pemerintah dan

masyarakat dengan memperhatikan prinsip pemberdayaan, kesempatan, pemerataan dan keadilan.

d. Berkerjasama denga lembaga -lembaga lain. Baik negeri maupun swasta dalam bentuk imbal swadaya, sehingga lebih berdaya dalam mengelola pendidikan serta memacu partisipasi yang semakin meluas dari instansi lainnya.

D. Prosedur dan Implimentasi

Dalam implementasinya pengembangan pendidikan pesantren harus mengacu pada UU yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ketentuan dalam BAB III tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, pada Pasal 4 dijelaskan bahwa:

a) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

b) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

c) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

d) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

e) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

f) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Semua prinsip penyelenggaraan pendidikan tersebut sampai saat ini masih berlaku dan dijalankan di pesantren. Karena itu, pesantren sebetulnya telah mengimplementasikan ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Sistem pendidikan nasional. Tidak hanya itu, keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang didirikan atas peran serta masyarakat, telah mendapatkan legitimasi dalam Undang-undang Sisdiknas. Ketentuan mengenai Hak dan Kewajiban Masyarakat pada Pasal 8 menegaskan bahwa Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Sedangkan dalam Pasal 9 dijelaskan bahwa Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Ketentuan ini berarti menjamin eksistendi dan keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan diakomodir dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini dipertegas lagi oleh Pasal 15 tentang jenis pendidikan yang menyatakan bahwa Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Pesantren adalah salah satu jenis pendidikan yang concern di bidang keagamaan.

Secara khusus, ketentuan tentang pendidikan keagamaan ini dijelaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Sisdiknas yang menegaskan: (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, dan bentuk lain yang sejenis.

Ketentuan mengenai lembaga pendidikan nonformal ini termuat dalam Pasal 26 yang menegaskan:

a) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

b) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

c) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

d) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

e) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

f) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Untuk sampai pada kemampuan mengatur penyelenggaraan dan pendidikan dengan baik disetiap satuan pendidikan tidak terkecuali pesantren diperlukan program yang sistematis dengan melakukan *capasity building* Untuk melakukan kegiatan *capasity building* perlu tahapan-tahapan agar arahnya terarah dan terukur. Ada empat tahapan yang perlu dilalui untuk kegiatan tersebut. Masing-masing tahap pengembangan dilakukan terhadap setiap kelompok satuan pendidikan yang mempunyai karateristik yang setara. *Capasity building* dilakukan untuk meningkatkan (*up grade*) suatu kelompok satuan pendidikan pada tahap perkembangan tertentu ke tahap berikutnya.

Keempat tahap tersebut adalah, Tahap pra format, ialah tahap di mana satuan pendidkan belum memiliki standar formal pendidikan masih belum terpenuhi sebagai sumber-sumber pendidikan dan perlu ditingkatkan ke tahap berikutnya. Tahap Formalitas, ialah pesantren yang sudah memiliki sumber-sumber pendidikan secara minimal. Satuan pendidikan tersebut sudah memiliki standar teknis minimal seperti kualifikasi ustadz, jumlah dan kualitas ruang kelas, kualitas buku serta jumlah kualitas pendidikan lainnya. Dengan *capasity building* pesantren dapat meningkatkan kemampuan administratur dan pelaksanaan pendidikandan dapat meningkatkan pembelajarannya lebih kreatif dan inovatif. Jika satuan pendidikan tersebut sudah berhasil ditingkatkan lagi ke tingkat transisional. Keberhasilan tersebut dapat diukur dengan standar pelayanan minimum tingkat sekolah umum yang telah ada dan dikorelasikan dengan pendidikan pesantren, terutama menyangkut output pendidikan seperti penurunan tingkat putus sekolah, mengulang kelas, kemampuan para siswa, tingkat kelulusan, serta tingkat melanjutkan sekolah.

Tahap Transisional, ialah satuan pendidikan sudah mampu memberikan pelayanan minimal pendidikan yang bermutu, seperti kemampuan mendayagunakan sumber-sumber

pendidikan secara optimal. Meningkatkan kreativitan ustadz, pendayagunaan perpustakaan, sekolah secara optimal. Tahap otonomi, pada tahap ini dapat dikatakan pesantren sudah mencapai tahap penyelesaian *capasity building* menuju profesionalisme pendidikan ke pelayanan pendidikan yang bermutu. Satuan pendidikan sudah dianggap dapat memberikan pelayanan di atas Standar Pelayanan Minimal dan bertanggung jawab terhadap klien serta stakeholder pendidikan lainnya.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa perubahan paradigma itu antara lain:

1. Melaksanakan program menjadi merumuskan program.
2. Keputusan terpusat menjadi keputusan bersama.
3. Ruang gerak terbatas menjadi ruang gerak fleksibel.
4. Sentralistik menjadi desentralistik.
5. Individual menjadi kerjasama
6. Basis birokratik menjadi basis profesional
7. Diatur menjadi mandiri
8. Malregulasi menjadi deregulasi
9. Informasi terbatas menjadi informasi terbuka
10. Boros menjadi efisien
11. Pendelegasian menjadi pemberdayaan
12. Organisasi vertical menjadi organisasi horizontal.

E. Pesantren dan Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi dan pesantren adalah dua tradisi pendidikan yang mempunyai banyak perbedaan. Perguruan tinggi merupakan gejala di perkotaan, sedangkan pesantren merupakan gejala di pedesaan; perguruan tinggi identik dengan kemodernan, pesantren identik dengan ketradisionalan;

perguruan tinggi lebih menekankan pendidikan yang bersifat liberal, pesantren lebih menekankan sikap konservatif yang bersandar karena berpusat pada figur sang kiai; dan seterusnya. Persepsi dualisme dikotomik semacam itu mungkin saja kurang begitu tepat, karena pada kenyataannya banyak juga pesantren yang telah melakukan perubahan baik secara struktural maupun kultural. Munculnya banyak pesantren dengan klaim pesantren modern, yang bisa saja terkesan supervisial bagaimanapun telah menjadi petunjuk penting hahwa pesantren tidak selamanya memperlihatkan perkembangan yang statis atau *status quo.* Maka kalau perguruan tinggi sering diberi citra "wah", tidak berarti keberadaannya lebih unggul dibandingkan pesantren. Bahkan, kalau dilihat dari sisi kemandirian, pesantren mempunyai kelebihan. Dan kalau mau jujur, sebenarnya lembaga yang paling bertanggung jawab terhadap munculnya fenomena masyarakat pendidikan berlebih (*overeducated society)* yang dapat dilihat pada semakin membludaknya pengangguran intelektual di kota sekarang ini, adalah Perguruan Tinggi (PT) itu.

Berbicara tentang sisi kelebihan pesantren, saya teringat polemik kebudayaan yang berlangsung pada tahun 30-an.[8] Salah seorang cendekiawan yang terlibat dalam polemik tersebut ialah Dr. Soetomo. Yang menarik dari pemikiran Soetomo adalah anjurannya agar asas-asas sistem pendidikan pesantren digunakan sebagai dasar pembangunan pendidikan nasional Indonesia. Meskipun pemikiran Soetomo kurang mendapat tanggapan yang berarti, tetapi patut digarisbawahi bahwa paling tidak pesantren telah dilihat sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan identitas budaya bangsa Indonesia. Dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan pendidikan di Indonesia, agaknya tidak dapat dipungkiri bahwa

---

[8] Alfian, *Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan* (Jakarta: Gramedia, 1987)

pesantren telah menjadi semacam *local genius.* Dikalangan umat Islam sendiri, pesantren sedemikian jauh telah dianggap sebagai model institusi pendidikan yang mempunyai keunggulan baik pada sisi tradisi keilmuannya—yang oleh Martin van Bruinessen dinilai sebagai salah satu tradisi agung (*great tradition*), maupun pada sisi transmisi dan internalisasi moralitas umat Islam.

Seandainya negeri kita ini tidak mengalami penjajahan, dalam Nurcholish Madjid, tentulah pertumbuhan sistem pendidikan di Indonesia akan mengikuti jalur-jalur yang ditempuh pesantren itu. Sehingga perguruan tinggi tidak akan berupa UI, ITB, IPB, UGM, Unair, dan lain-lain, tetapi mungkin akan bernama Universitas Tremas, Krapyak, Tebuireng, Bangkalan, Lasem, dan sebagainya. Menurut Nurcholish Madjid, setelah melihat dan membuat kias secara kasar terhadap pertumbuhan sistem pendidikan di negara-negara Barat, di mana perguruan-perguruan tinggi terkenal di sana cikal bakalnya adalah perguruan-perguruan keagamaan. Mungkin juga, seandainya kita tidak pernah dijajah, pesantren-pesantren tidak begitu jauh terperosok ke dalam daerah pedesaaan yang terpencil seperti sekarang, rnelainkan tentunya akan berada di kota-kota pusat kekuasaan atau ekonomi, sekurang-kurangnya tidak terlalu jauh dari sana, sebagai halnya sekolah-sekolah keagamaan di Barat yang kemudian tumbuh menjadi universitas-universitas.

Pendapat Nurcholish Madjid di atas mungkin terkesan *klise* atau gagasan yang *utopis* bagi orang yang sudah terlanjur terbingkai dalam wacana modernisme.[9] Akan tetapi, dengan mempertimbangkan kelebihan yang di milikinya, bukan tidak mungkin pesantren akan dilirik sebagai alternatif di tengah

---

[9] Nurcholish Madjid, "*Merumuskan Kembali Tujuan Pendidikan Pesantren",* dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren, Membangun dari Bawah* (Jakarta: P3M, 1985).

pengapnya suasana pendidikan formal di Indonesia, termasuk juga perguruan tinggi sebagai jenjang pendidikan formal yang paling tinggi. Pada dekade 70-an dan 80-an ketika LSM menjadi *mainstream* gerakan pemberdayaan rakyat, pesantren seringkali dilibatkan sebagai mitra dalam pembangunan masyarakat pedesaaan. Kenapa pesantren, sebab jika dipandang dari perspektif *people centered development*—sebuah model pembangunan alternatif yang pernah diintrodusir oleh David C. Korten—pesantren dinilai lebih dekat dan mengetahui seluk-beluk masyarakat yang berada dilapisan bawah. Maka dari ujung pulau Madura sebuah pesantren dikenal dengan nama An-Nuqayah, yang terdapat di desa Guluk-guluk, Sumenep, tampil dengan rintisan Program Pengembangan Masyarakat yang membawa perubahan yang luar biasa terhadap lingkungan sekitarnya. Atas hasilnya itu, An-Nuqayah nendapatkan hadiah dan penghargaan Kalpataru karena prestasinya dalam menyelamatkan lingkungan.[10]

Namun demikian, tidak berarti pesantren lepas dari kelemahan. Justru dalam zaman yang ditandai dengan cepatnya perubahan di semua sektor dewasa ini pesantren menyimpan banyak persoalan yang menjadikannya agak tertatih-tatih, kalau tidak malah kehilangan kreativitas dalam merespon perkembangan zaman. Beberapa pesantren yang ada pada saat ini, masih saja secara kaku (*rigid*) mempertahankan pola *salafiyah* yang dianggapnya masih *sophisticated* dalam menghadapi persoalan eksternal. Padahal sebagai suatu institusi pendidikan, keagamaan, dan sosial, pesantren dituntut melakukan kontekstualisasi tanpa harus mengorbankan watak aslinya. Kenapa ini bisa terjadi? *Pertama,* dari segi kepemimpinan pesantren secara kukuh masih

---

[10] Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1995).

terpola dengan kepemimpinan yang sentralistik dan hirarkis yang berpusat pada satu orang kiai. Ikhwal pendirian pesantren memang memiliki sejarah yang unik. Berdirinya pesantren biasanya atas usaha pribadi kiai. Maka, dalam perkembangan selanjutnya figur sang kiai sangat menentukan hitam putihnya pesantren. Pola semacam ini tak pelak lagi melahirkan implikasi manajemen yang *otoritarianistik.* Pembaruan menjadi hal yang sangat sulit dilakukan karena sangat tergantung pada sikap sang kiai. Tambahan pula, pola seperti ini akan berdampak kurang prospektif bagi kesinambungan pesantren bagi masa depan. Banyak pesantren yang sebelumnya populer, tiba-tiba hilang begitu saja karena sang kiai meninggal dunia.

Kedua, kelemahan dibidang metodologi. Telah umum diketahui bahwa pesantren mempunyai tradisi yang kuat dibidang transmisi keilmuan klasik. Namun, karena kurang adanya improvisasi metodologi, proses transmisi itu hanya melahirkan penumpukan keilmuan. Menurut Martin van Bruinessen, ilmu yang bersangkutan dianggap sesuatu yang sudah bulat dan tidak dapat ditambah. Jadi, proses transmisi itu merupakan penerimaan secara *taken for granted.* Muhammad Tholhah Hasan, salah seorang intelektual Muslim dikalangan Nahdlatul Ulama (NU) pernah mengeritik, bahwa tradisi pengajaran yang demikian memberikan dampak lemahnya kreativitas. Dan kalau yang mendapatkan penekanan di pesantren itu adalah ilmu fiqh (*fiqh orriented*), maka penerapan fiqh menjadi teralienasi dengan realitas sosial keilmuan serta teknologi kontemporer.

Ketiga, terjadinya disorientasi, yakni pesantren kehilangan kemampuan mendefinisikan dan memposisikan dirinya di tengah realitas sosial yang sekarang ini terjadi perubahan yang demikian cepat. Dalam konteks perubahan ini, pesantren mengalami dilema antara keharusan mempertahankan dirinya dengan kebutuhan menyerap budaya baru yang datang dari luar

pesantren. Kalau oleh M.M. Billah, pesantren diberi ciri kontekstual, yaitu ciri-ciri lingkungan sekitar (sosial dan fisik) di mana pesantren berada, yang tersadap oleh dan memberi warna pada ciri-ciri pesantren, maka ciri kontekstual tersebut terjadi pemekaran sejalan dengan terjadinya urbanisasi dan industrialisasi, yang juga sudah mulai merambah ke desa. Pesantren dituntut untuk melakukan reorientasi terhadap peran pendidikan, keagamaan, dan sosialnya.

Nah, kalau belakangan kita menyaksikan terjadinya *sintesa* atau *konvergensi* antara pesantren dengan perguru tinggi, hal itu dapat dipandang sebagai perkembangan yang konstruktif. Seperti kita ketahui, banyak pesantren yang mendirikan perguruan tinggi, dan sebaliknya. Atau di beberapa kota mulai didirikan pesantren yang bernuansakan dunia perguruan tinggi, meskipun di dalamnya tidak ada pendidikan yang secara formal disebut perguruan tinggi. Di Surakarta misalnya, terdapat pondok pesantren Hj. Nurriyah Sobron yang didirikan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Contoh lainnya seperti Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton, Probolinggo, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iah Sukerejo Asembagus Situbondo, Pondok Pesantren Al Qodiri Jember, Pondok Pesantren Assuniyah Kencong Jember dan banyak perguruan tinggi yang lain yang sudah didirikan sebuah institute atau perguruan tinggi. Di Malang terdapat Pondok Pesantren Al-Hikam yang santrinya dari kalangan mahasiswa. Masih di Malang, Universitas Islam Malang (UNISMA) kabarnya sedang merencanakan pesantren mahasiswa. Yang menarik lagi adalah ide dari CIDES tentang pendirian Pondok Pesantren Politeknik. Perkembangan lain yang juga menarik untuk dicermati adalah pertumbuhan pesantren kilat yang sekarang sudah *trend* di beberapa kota di Indonesia, seperti Surabaya dan Jakarta.

Dari berbagai uraian Pesantren dan Perguruan Tinggi di atas, menyisakan masalah yang sangat prinsip yakni, apakah dengan didirikanya perguruan tinggi di pesantren-pesantren merupakan wujud dari sebuah pemikiran solutif dari perguruan Tinggi di Indonesia yang telah gagal mempersiapkan dan mencetak manusia Indonesia yang benar-benar asli Indonesia yang santun, saling tolong menolong, egalitarian, mandiri sebagaimana watak dan corak pondok Pesantren? Atau jangan-jangan Pesantren hanya sekadar menangkap "gizi" yang dipersiapkan pemerintah, sehingga pesantren ikut latah ramai-ramai mendirikan perguruan Tinggi.

Kalau hal yang pertama sebagai asumsi dasar pemikiranya, mungkin "pesantren sekian puluh tahun lagi" akan mampu menggilas dan mengubah watak kapitalis manusia Indonesia yang selama ini mendominasi dijagat raya ini, dan pesantrenlah yang memang diharapkan bisa dan harus bisa menjadi jawaban kegagalan pendidikan yang hanya mengandalkan "otak dan otot" tanpa memiliki "rasa" dan seni.

Namun jika asumsi dasar munculnya perguruan Tinggi di dalam pesantren adalah yang kedua, maka amat celakalah kita, akar budaya masyarakat Indonesia akan habis digilas zaman dan akan menjadi museum tua yang dijadikan kenangan, karena perguruan Tinggi di pesantren dianggap tidak jauh beda dengan perguruan tinggi lain yang telah berjalan persis produk pendidikan gaya kapitalis?semoga bukan hal ini yang menjangkiti pesantren. []

BAB VII
KURIKULUM DAN PENGAJARAN DI PESANTREN

A. Pendahuluan

Berbicara tentang metode sangat di butuhkan dalam upaya untuk melakukan sebuah tindakan lebih-lebih pada dunia ilmiah. Dalam dunia akademis ada upaya ilmiah yang disebut metode, yaitu cara kerja untuk memahami objek sasaran ilmu yang sedang di kaji objek yang dimaksud adalah objek material dari ilmu pengetahuan. Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui dan memahami terhadap segala sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis, serta komprehensif.[1]

Selanjutnya Dalam rangkaian sistem pengajaran, metode menempati urutan sesudah materi. Penyampaian materi tidak akan signifikan tanpa melibatkan metode. Metode selalu mengikuti materi, dalam arti mengadaptasikan dengan bentuk dan coraknya, sehingga metode mengalami transformasi bila materi yang sama dipakai metode yang berbeda-beda. Sebagai lembaga Pendidikan Islam yang berpengalaman, Pesantren telah

---

[1] Mujamil Qomar, *Epistemologi Pendidikan Islam Dari Metode Rasional Hingga Metode Kritik* (Jakarta : Erlangga, 2005), hal. 20.

mengalami pergeseran dan perubahan baik terkait dengan institusi maupun kurikulum karena pesantren berada di tengah-tengah masyarakat.

Seperti halnya penjelasan di atas tentang tujuan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yaitu untuk mendidik para santri agar kelak menjadi pemimpin umat bangsa dan negara yang benar-benar dapat diandalkan kualitas keilmuannya baik dalam disiplin ilmu keagamaan tradisional maupun dalam ilmu pengetahuan lainnya. Maka dari itu, Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam mengadakan pengajaran kitab-kitab klasik yakni kitab kuning.

B. Metode Pendidikan Pesantren

Berikut penulis jelaskan pengertian metode-metode pengajaran yang ada di pondok pesantren, antara lain:

a. Metode *Sorogan*

Imron Arifin berpendapat bahwa metode *sorogan* adalah suatu metode di mana santri yang pandai mengajukan sebuh kitab kepada kiai untuk dibaca dihadapan kiai tersebut. Kalau dalam membaca dan memahami terdapat kesalahan maka kesalahan tersebut langsung akan dibenarkan oleh kiai.[2]

Dalam pengembangan dan aplikasi dari metode ini akan menuntut adanya kesabaran, kerajinan, ketelatenan dan disiplin para santri. Sehingga dengan demikian metode ini dapat efektif dalam pelaksanaannya yang memungkinkan para kiai mengawasi, menilai dan membimbing santrinya dengan maksimal. Di samping pelakasanaan metode sorogan ini bisa juga dijadikan

---

[2] Arifin, Imron, *Kepemimpinan Kyai kasus Pondok Pesantren Tebu Ireng,* (Jombang, Kalimasahadah, 1993), hal.38

sebagai tolak ukur dari keberhasilan pendidikan pengajaran yang ada di pondok pesantren.

b. Metode *Wetonan*

Selain metode pengajaran dalam bentuk sorogan di pondok pesantren juga terdapat metode wetonan dalam pengajarannya. Metode wetonan adalah kiai membaca suatu kitab dalam waktu tertentu dan santri membawa kitab yang sama, kemudian santri mendengarkan dan menyimak bacaan kiai tersebut.[3]

Dalam metode pengajaran tersebut (*wetonan*) tidak ada ikatan yang mengikat kepada santri untuk harus mengikuti hal tersebut, artinya santri diberi kebebasan untuk datang dan mengikutinya atau bahkan santri diberi kebebasan untuk tidak datang ataupun tidak mengikutinya. Oleh karena itu dalam metode ini tidak ada penilaian terhadap santri dari para kiai tentang tingkat kepandaian dan tidak ada bentuk kenaikan kelas, akan tetapi santri yang telah melaksanakan atau menyelesaikan kitab yang dipelajarinya dapat melanjutnya ke jenjang kitab yang lebih tinggi tingkatnya. Sehingga secara tidak langsung metode ini seolah-olah mempunyai tujuan untuk membentuk seorang santri untuk selalu berfikir kreatif dan dinamis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuannya.

c. Metode Mudzakarah/Diskusi

Seorang santri yang dituntut untuk mampu mengembangkan ilmu pengetahuan keagamaannya yang sampai saat ini dapat dibilang tradisional, maka agar tidak ketinggalan dengan ilmu pengetahuan lainnya yang perkembangannya pesat sekali, oleh karena itu pertemuan-pertemuan ilmiah yang membahas dan memecahkan suatu permasalahan sering dilakukan dalam

---

[3] Abd. Rachman Shaleh, *Pedoman Pembinaan Pondok Pesantren,* (Pendidikan dan BKPP Depag, 1978), hal.17

kegiatan di Pondok Pesantren. Metode mudzakarah/diskusi ini merupakan pertemuan ilmiah yang secara spesifik membahas masalah diniyah, seperti ibadah (ritual), aqidah (teologi) serta masalah agama pada umumnya.[4]

Metode mudzakarah/diskusi ini menurut Imron Arifin dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

1). Mudzakarah yang diselenggarakan oleh sesama santri untuk membahas suatu masalah dengan tujuan mendetail. Para santri agar terlatih dalam memecahkan persoalan dengan menggunakan kitab-kitab yang tersedia.

2). Mudzakarah yang dipimpin oleh kiai, di mana hasil dari mudzakarah para santri diajukan untuk dibahas dan dinilai seperti dalam suatu seminar.[5]

Berdasarkan keterangan di atas tersebut, jelas sekali bahwa metode ini bertujuan dan berfungsi untuk menambah wawasan dan cakrawala berpikir keagamaan para santri serta sekaligus untuk meningkatkan daya intelektualitas para santri agar siap pakai nantinya bila terjun dalam kehidupan bermasyarakat.

d. Metode Majelis Ta'lim

Majelis Ta'lim adalah suatu media penyampaian ajaran Islam yang bersifat umum dan terbuka. Perjama'ah terdiri dari dari berbagai lapisan yang memiliki latar belakang pengetahuan yang bermacam-macam dan tidak dibatasi oleh tingkatan usia maupun perbedaan kelamin. Pengajian semacam ini hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja.[6]

---

[4] Arifin, Imron, *Kepemimpinan Kyai kasus Pondok Pesantren Tebu Ireng,* (Jombang, Kalimasahadah, 1993), hal.120

[5] *Ibid*, hal. 120

[6] Arifin, Imron, *Kepemimpinan Kiai...*, hal.38

Dalam pelaksanaannya, metode ini dilaksanakan biasanya hanya satu minggu satu kali dengan materi yang bersifat umum serta berisi nesehat-nasehat atau wejangan-wejangan keagamaan *amar ma'ruf nahi munkar* yang mana hal tersebut diambil dari kitab-kitab tertentu. Jadi metode *majelis ta'lim* ini boleh diikuti oleh masyarakat yang berminat untuk menuntut ilmu keagamaan yang berdomisili disekitar pondok pesantren tersebut.

e. Metode Perpaduan

Penyerapan metode baru sebagai tambahan terhadap metode yang bersifat tradisional tidak pernah seragam. Para peneliti menemukan perbedaan pemakaian metode dikalangan Pesantren, karena disebabkan oleh kecenderungan kiai sebagai refleksi otonominya. Oleh karenanya, pengamatan terhadap Pesantren yang berbeda akan menemukan penerapan metode yang berlainan pula.

Observasi yang cermat terhadap pelaksanaan proses belajar-mengajar di pesantren akan menemukan perubahan bentuk metode pendidikan yang amat beragam baik yang sering diterapkan maupun terbatas pada saat-saat tertentu. Para pimpinan pesantren yang tergabung dalam *Rabithah Ma'ahid* telah memperaktekkan metode-metode yang sangat beragam, kemudian mereka menetapkannya dalam muktamar ke-1 pada tahun 1959 yang meliputi, tanya jawab, Diskusi, imla'muthala'ah, proyek, dialog, karyawisata, hafalan, sosio-drama, widyawisata, *problem solving*, pemberian situasi, habituasi, dramatisasi, *reinforcement*, stimulus respons, dan sistem modul.

C. Kurikulum Pendidikan Pondok Pesantren

Pengertian kurikulum yang sering kita kenal adalah seluruh usaha sekolah (lembaga pendidikan) untuk merangsang anak belajar, baik dalam lingkungan kelas, di halaman sekolah atau di luar sekolah. Sedangkan istilah kurikulum masuk dalam dunia

pondok pesantren sejak satu abad yang lalu, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dalam dunia pondok pesantren tidak mengenal istilah kurikulum. Hal ini disebabkan sampai saat ini belum terdapat rumusan secara eksplisit tentang tujuan pendidikan pondok pesantren. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Habib Hirzin:

> Istilah kurikulum tidak dikenal dalam kamus sebagian pondok pesantren terutama dalam masa sebelum perang, walau materinya ada di dalam praktek pengajran, bimbingan rohani dan latihan kecakapan dalam kehidupan sehari-hari di Pesantren, yang merupakan kesatuan dalam proses pendidikan di pesantren.[7]

Sebagaimana yang dijelaskan di atas tentang pengetian kurikulum yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam pondok pesantren, akan tetapi kalau kita tinjau lagi pengertian kurikulum modern maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seperti halnya pengertian kurikulum dikaitkan dengan sekolah (lembaga pendidikan) begitu juga kurikulum bila dikaitkan dengan aktivitas pondok pesantren yang mana hal tersebut meliputi seluruh aktivitas atau kegiatan pondok pesantren baik pada waktu jam pelajaran maupun di luar jam pelajaran. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kurikulum pondok pesantren merupakan pendidikan pesantren yang mengandung aktivitas ekstra kurikuler apabila hal tersebut dipandang sebagai kegiatan di luar jam pelajaran.

D. Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam

Kata Kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu *currere* yang berarti jarak tempuh lari, yakni jarak yang harus ditempuh dalam kegiatan berlari mulai dari start hingga finish. Pengertian

---

[7] Hirzin, Habib, *Agama Dan Ilmu Pesantren dalam Dawam Raharjo Pesantren Dan Pembaharuan,* (Jakarta, LP3ES, 1988), hal. 38

ini kemudian diterapkan dalam dunia pendidikan. Dalam bahasa Arab, istilah kurikulum diartikan dengan *Manhaj*, yakni jalan yang terang, atau jalan terang yang dilalui oleh manusia pada bidang kehidupannya. Dalam konteks pendidikan, kurikulum berarti jalan terang yang dilalui oleh pendidik/guru dengan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta nilai-nilai[8]. Pengertian kurikulum yang diungkapkan oleh para ahli ternyata sangat beragam, tetapi dari beberapa definisi itu dapat ditarik kesimpulan, bahwa di satu pihak ada yang menekankan pada isi pelajaran atau mata kuliah, dan di lain pihak lebih menekankan pada proses atau pengalaman belajar.

Pengertian lama tentang kurikulum lebih menekankan pada isi pelajaran atau mata kuliah, dalam arti sejumlah mata pelajaran atau kuliah di sekolah atau perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk mencapai suatu ijazah juga keseluruhan pelajaran yang disajikan oleh suatu lembaga pendidikan, terbatas pada pengetahuan-pengetahuan yang dikemukakan oleh guru atau sekolah atau institusi pendidikan lainnya dalam bentuk mata pelajaran-mata pelajaran yang dikaji begitu lama oleh peserta didik dalam tiap tahap pendidikannya[9].

Kurikulum adalah segala kegiatan dan pengalaman belajar yang direncana dan diorganisir untuk dilakukan dan dialami oleh anak didik agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah di tetapkan.[10] Kurikulum juga dapat di artikan perangkat mata pelajaran yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan

---

[8] Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 1-3

[9] *Ibid,* 3

[10] Muhammad Zein, *Asas dan Pengembangan Kurikulum*, (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991), 3- 4.

kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut.

Dalam PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.[11] Dan juga definisi kurikulum dalam UU Sisdiknas No. 20/2003 dikembangkan ke arah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.[12]

Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pendidikan. Tanpa kurikulum, proses pendidikan tidak akan berjalan mulus. Kurikulum diperlukan sebagai salah satu komponen untuk menentukan tercapainya tujuan pendidikan. Di dalam kurikulum terangkum berbagai kegiatan dan pola pengajaran yang dapat menentukan arah proses pembelajaran. Itulah sebabnya, menelaah dan mengkaji kurikulum merupakan suatu kewajiban bagi setiap guru yang berkutat dalam dunia pendidikan.

E. Manajemen Pendidikan Islam

1. Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam

Sebelum membahas lebih jauh mengenai manajemen kurikulum dalam pendidikan Islam, penulis membatasi bahasan

---

[11] Mulyasa, E, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 2

[12] UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003

pokok terkait hakikat kurikulum itu sendiri, kosakata kurikulum telah masuk kedalam kosakata bahasa Indonesia, dengan arti susun rencana pengajaran. Kosakata tersebut berasal dari bahasa latin, *curriculum* yang berarti bahan penngajaran, dan ada pula yang mengatakan *courier* dari bahasa prancis. Dalam bahasa Arab, ada yang menggunakan kosakata *al-manhaj* untuk kosakata kurikulum. Yang berarti jalan terang atau jalan terang yang dilalui manusia dalam kehidupannya. Selanjutnya dapat dijumai kurkulum yang dikemukakan para ahli pendidikan, yang secara umum dapat dibedakan kedalam pengertian tiga tokoh:

1. Menurut Crow and crow adalah rancangan pengajaran yang isinya sejumlah mata pelajaran yang di susun secara sistematis, sebagai syarat untuk menyelesaikn suatu program tertentu.[13]

2. Abdurrahman Shalih, sejumlah mata pelajaran yang dipersiapkan berdasarkan rancangan yang sistematik dan koordinatif dalam rangka mencaai tujuan yang ditetapkan.

3. Dalam konteks pandangan tradisional dan modern terdapat pemisah pada pengetian secara maknawiyah kurikulum itu sebagai rencana pelajaran dalam arti modern sedngkan arti modern kurikulum adalah semua yang nyata terjadi dalam proses pendidikan di sekolah.[14]

4. Menurut hemat penulis kurikulum adalah Rancangan pelajaran yang memuat guru, siswa, sekolah dan keterlibatan stacholder tertentu secara sistematis dalam penyusuanannya dan aplikatif dalam penggunaannya.

---

[13] Abudin Nata, *Manajemen Pendidikan* (*Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*) (Jakarta: Prenada Media, 2003), 122

[14] Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Persepektif Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 53

Dalam prakteknya, selama ini kurikulum dianggap sebagai penentu keberhasilan pendidikan, termasuk Pendidikan Islam. Karena itu, perhatian para guru, dosen, kepala sekolah atau sekolah/madrasah, ketua, rektor, maupun praktisi pendidikan terkonsentrasi pada kurikulum. Padahal, kurikulum bukanlah penentu utama. Dalam kasus pendidikan di Indonesia misalnya, problem paling besar yang dihadapi bangsa ini sesungguhnya bukan berarti kurikulum tidak menimbulkan problem. Namun, masalah kesadaran merupakan problem yang paling besar. Yaitu lemahnya kesadaran untuk berprestasi, kesadaran untuk menghilangkan kebodohan, maupun kesadaran untuk berbuat yang terbaik.

Dari segi pelakunya, kesadaran yang lemah itu terjadi pada semua pihak secara merata baik pada pemerintah, kepala sekolah/madrasah atau sekolah, guru, siswa, maupun masyarakat. Pemerintah kurang menghargai guru, dan dosen, terutama bagi yang berstatus tidak tetap, padahal mereka merupakan ujung tombak pendidikan. Kepala sekolah/madrasah lebih memerhatikan urusan fisik sekolah atau sekolah/madrasah daripada kualitas pembelajaran. Para guru hanya mengerjakan rutinitas mengajar dan hamper tida pernah melakukan inovasi-inovasi. Sementara itu, masyarakat juga bersikap pragmatis dengan cenderung mengejar pendidikan yang cepat selesai, tugas ringan, dan cepat kerja tanpa mempertimbangkan efek negatifnya.

Kurikulum pendidikan Islam memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri-cirinya sebagai berikut:[15]

1. Menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan, kandungan, metode, alat, dan tekniknya.

---

[15] Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam (Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam)*, 149-151.

2. Memiliki keseimbangan antara kandungan kurikulum dari segi ilmu dan seni, kemestian, pengalaman, dan kegiatan pengajaran yang beragam.

3. Memiliki perhatian yang luas dan kandungan yang menyeluruh. Maksudnya ialah aspek pribadi siswa tepat pada sasaran, terutama aspek pribadi, yaitu jasmani, akal, dan rohani.

4. Berkecenderungan pada seni halus, aktivitas pendidikan jasmani, latihan militer, pengetahuan teknik, latihan kejuruan, dan bahasa asing untuk perorangan maupun bagi mereka yang memiliki kesediaan, bakat, dan keinginan.

5. Keterkaitan kurikulum dengan kesediaan, minat, kemampuan, kebutuhan, dan perbedaan perorangan di antara mereka.

Ciri-ciri ini menggambarkan adanya berbagai tuntutan yang harus ada dalam kurikulum pendidikan Islam. Tuntutan ini terus berkembang sesuai dengan tantangan zaman yang sedang dihadapi. Tuntutan zaman Islam sekarang lebih kompleks. Oleh karena itu perlu adanya ciri-ciri permanen dan ciri-ciri responsif terhadap tuntutan zaman di dalam kurikulum pendidikan Islam. Di samping ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam, juga terdapat prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar kurikulum pendidikan Islam, yaitu sebagai berikut.

1. Pertautan yang sempurna dengan agama, termasuk ajaran-ajaran dan nilai-nilainya.

2. Prinsip menyeluruh (universal) pada tujuan-tujuan dan kandungan-kandungan kurikulum.

3. Keseimbangan yang relatif antara tujuan-tujuan dan kandungan-kandungan kurikulum.

4. Ada pertautan antara bakat, minat, kemampuan, dan kebutuhan pelajar.

5. Pemeliharaan perbedaan individual di antara pelajar dalam bakat, minat, kemampuan, kebutuhan, dan masalahnya serta memelihara perbedaan di antara alam sekitar dan masyarakat.

6. Prinsip perkembangan dan perubahan.

7. Prinsip pertautan antarmata pelajaran, pengalaman, dan aktivitas yang terkandung dalam kurikulum.

Di antara ketujuh prinsip tersebut terdapat prinsip pengembangan dan perubahan. Prinsip ini menunjukkan adanya dinamika dari kondisi yang serba kekuarangan menuj kondisi yang lebih sempurna atau perubahan yang positif-konstruktif. Mengingat perkembangan sains dan teknologi telah tejadi perubahan-perubahan yang cepat sekali. Pada akhinya perubahan itu mempengaruhi konsep pendidikan tanpa mengenal batas akhir, sebab banyak persoalan yang harus dihadapi oleh pendidikan. Dalam Al-Qur'an disebut *watawasau bi al-haqq watawasau bi al-shbar* (saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehat dengan kesabaran, sementara PBB mensosialisasikan *long life education* (pendidikan sepanjanga masa) pada tahun 1970-an.

Berbicara konteks pengembangan kurikulum dapat dilaksanakan pada berbagai tingkat, mulai dari tingkat kelas sampai tingkat nasional. Urutan tingkat tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut.

1. Pengembangan kurikulum pada tingkat guru kelas.

2. Pengembangan kurikulum pada tingkat kelompok guru dalam suatu sekolah.

3. Pengembangan kurikulum pada tingkat pusat guru.

4. Pengembangan kurikulum pada tingkat nasional.

Hal ini menunjukkan bahwa guru merupakan ujung tombak pendidikan. Karena itu, para guru dituntut mampu mengembang-

kan kurikulum pembelajaran di kelas yang didasarkan pada teori-teori pengembangan kurikulum dan pengalaman mengajar di kelas sebagai figur pelaksana kurikulum. Dalam hal ini penulis menguraikan pendapatt terkait peran guru sebagai *pekerja profesional* dalam artian guru dengan kompetensinya sebagai seorang pendidik dan memiliki naluriah mendidik, bertindak sebagai generator pembangkit semangat siswa baik sebagai motivator, fasilitator, innovator dn sebagainya mampu memberikan internalisasi berupa pembelajaran yang benar-benar sampai pada proses mendidik.[16]

Selanjutnya, Hamalik menyatakan bahwa pengemabangan kurikulum harus dikaitkan dengan perkembangan komponen-komponen yang mendasari prencanaan dan pengembangan kurikulum. Komponen-komponen adalah:

1. Perkembangan tujuan pendidikan.
2. Perekembangan teori belajar.
3. Perkambangan siswa.
4. Perkembangan kultur.
5. Perkembangan bentuk kurikulum yang digunakan.

Dalam pendapat lain Muhaimin mengatakan tentang kurikulum PAI (Pendidikan Agama Islam) memerlukan landasan jelas dan kokoh, sehingga tidak mudah terombang-ambing oleh transformasi dan inovasi pendidikan dan pembelajaran yang sangat dahsyat akhir-akhir ini. Apalagi inovasi tersebut cenderung *Top Down* melalui strategi *Power corcieve* (paksaan dari atasan yang berkuasa). Berbeda dengan kasus kurkulum PAI di sekolah atau sekolah/madrasah, maupun perguruan tinggi, pesantren juga memliki kebebasan yang seluas-luasnya dalam menentukan,

---

[16] Zainal Arifin. *Pengembangan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan Islam*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2012), 48

memilih dan memberlakukan suatu jenis atau model kurikulum yang digunakan di pesantren. Dalam hal ini kurikulum sebagai aset sekolah atau sekolah/madrasah yang ke seluruhnya harus tersistem dengan baik dan benar, bersensi dasarkan edukasi yang mampu mengarahkan pada proses pembelajaran.

Selain itu muhaimin mengatakan, kurikulum sekolah/ madrasah perlu dikembangkan secara terpadu. Yaitu dengan menjdikan ajaran dan nilai-nilai Islam sebagai petunjk dan sumber konsultasi bagi pengembangan beberapa mata pelajaran umum., ang operasionalnya dapat dikembangkan engan cara mengimplisitkan materi pelajaran Islam kepada bidang pelajaran umum (IPA, IPS dan sebagainya) sehingga kesan dikotomis tidak terjadi .

Selain itu untuk mewujudkan semua keunggulan itu dibutuhkan upaya pengembangan tertentu dari segi kejiwaan atau psikologis. Maka, kurikulum atau program pendidikan sekolah/madrasah, menurut Muhaimin, perlu dirancang dan diarahkan untuk mambantu, membimbing, melatih, serta mengajak dan atau menciptakan suasana agar para peserta didik dapat mengembangkan dan meningkatkan kualitas IQ (*Intelligent Quotient*). EQ (*Emotional Quotient*), CQ (*Creativity Quotient*), dan SQ (*Spiritual Quotient*). Pendidikan IQ menyangkut peningkatan kualitas *head* agar peserta didik menjadi orang yang cerdas, pintar, dan lain-lain. Pendidikan EQ menyangkut peningkatan kualitas *heart* agar peserta didik menjadi orang yang berjiwa pesaing, sabar, rendah hati, menjaga diri, berempati, cinta kebaikan, dan lain-lain. Pendidikan CQ menyangkut peningkatan kualitas *hand* agar peserta didik menjadi *agent of change* dan mampu mampu membuat inovasi. Sementara itu, pendidikan SQ menyangkut kualitas *honest* agar peserta didik menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia[17].

[17] *Ibid,* 48

Upaya pengembangan kurikulum itu diaplikasikan melalui suatu mekanisme tertentu. Menurut Hamalik, mekanisme pengembangan kurikulum tersebut meliputi:

1. Studi kelayakan dan kebutuhan.
2. Penyusunan konsep awal perencanaan kurikulum.
3. Pengembangan rencana untuk melaksanakan kurikulum.
4. Pelaksanaan uji coba kurikulum di lapangan.
5. Palaksanaan kurikulum.
6. Pelaksanaan penilaian dan pemantauan kurikulum.
7. Pelaksanaan perbaikan dan penyesuaian.

Adapun pada tahap pelaksanaan kurikulum meliputi tahap perencanaan, pengorganisasian, dan koordinasi, pelaksanaan, serta pengendalian, dengan perincian berikut:

1) Tahap Perencanaan

a. Menghitung hari kerja efektif dan jam pelajaran efektif untuk setiap mata pelajaran, hari libur, hari untuk ulangan, dan hari-hari tidak efektif.

b. Menyusun program tahunan (PROTA)

c. Menyusun program caturwulan

d. Program satuan pembelajaran

e. Rencana perencanaan pengajaran (RPP)

2) Tahap pengorganisasian dan kordinasi

a. Pembagian tugas mengajar guru

b. Penyuusunan jadwal pelajaran

c. Penyusuan jadwal kegiatan pengayaan dan perbaikan.

d. Penyusunan dalam kgiatan ekstrakurikuler

3) Tahap pelaksaanan

Teutama tugas kepala sekolah adalah melakukan supervisi untuk membantu guru mengemukakan dan mengatasi masalah yang dihadapi.

4) Tahap Pengendalian

Kepala sekolah perlu mengingatkan para guru bahwa evaluasi memiliki tujuan ganda, yaitu : untuk mengetahui tujuan pembelajaran khusus (TPK) dan mengetahui kesulitan siswa. Evaluasi benar-benar dimanfaatkana guru untuk memperbaki kegiatan pembelajaran. Berdasrkan uraian tersebut di atas dapat ditarik pemahaman bahwa manajemen kurikulum sebenarnya menekankan pada strategi pengelolaan pembelajaran secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil pendidikan secara maksimal. Ibrahim Bafadhal menegaskan bahwa pembelajaran unggulan bukanlah pembelajaran khsusus dan dikembangkan hanya untuk siswa yang unggul, melainkan lebih merupakan pembelajaran secara metodologis dan psikologis dapat membuat semua siswa mengalami proses pembelajaran secara maksimal dengan memperhatikan kapasitas peserta didik. Selain itu penulis berpendapat seorang pendidik perlu memahami kriteria siswa dan karakteristik siswa selama proses pembelajaran siswa disekolah itu, dengan demikian peserta didik dapat menyerap pemahaman secara keseluuhn dan aplikasinya.

F. Manajemen Peserta Didik Pendidikan Islam

Mutu peserta didik di madrsah perlu dikembangkan dengan mengacu pada karakteristik pendidika Islam itu sendiri. Peserta didik disebut juga murid, yang berarti orang yang menginginkan *(the willer),* dan menjadi salah satu sifat Alah SWT yang berarti maha menghendaki. Seorang murid adalah seorang yang menghendaki agar mendapatkan Ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kepribadian yang baik untuk bekal hidupnya agar berbahagia didunia dan diakhirat denan jalan belajar dengan

sugguh-sungguh. Istilah murid digunakan dalam ilmu tasawuf sebagai orang yang belajar mendalami ilmu tasawuf yang mendalami ilmu kepada seorang guru yang bernama *syaikh*.[18]

Selain itu kata murid sering dijumpai dalam pula kata *al-Tilmidz* yang juga berasal dari bahasa Arab, yang memiliki arti pelajar. Kata ini digunakan untu menunjkan peserta didik yang belajar di Sekolah/madrasah, dan istilah lain yang digunakan oleh Ahmad Tahalabi. Selanjutnya terdapat pula kata *Al-Mudarris*, yang berarti orang yang mempelajari sesuatu. Istilah lain yang, berkaitan dengan peserta didik adalah *al-thalib* yang berarti orang yang mencari sesuatu. Konsep ini dapat dipahami karena seorang pelajar adalah orang yang tengah mencari Ilmu pengetahuan, pengalaman, ketrampilan dan pembentukan kepribadian untuk bekal kehidupannya dimasa depan agar berbahagia di dunia dan di akhirat. Istilah *al-thalib* lebih bersifat mandiri, kreatif, dan sedikit bergantung kepada guru.

Selanjutnya, istilah yang berhubungan erat dengan peserta didik yaitu *al-muta'alim* yang berarti orang yang mencari ilmu pengetahuan. Istilah *al-Muta'allim* yang menunjukkan peserta didik sebagai orang yang menggali ilmu pengetahuan merupakan istilah yang populer dalam karya-karya ilmiah para ahli pendidikan Islam.

Jika merujuk pada Al-Qur'an dan hadits, dapat dijumpai penggunaan kata *al-muta'alim* untuk arti orang yang menuntut Ilmu pengetahuan. Allah bertindak sebagai *Al-Muallim* (yang mengajar) dan Nabi Adam As. Berada dalam posisi *Al-Muta'allim* (yang belajar).

Allah SWT mengajarkan kepada manusia termasuk Adam AS. dari apa yang tidak diketahui menjadi diketahui, sehingga

---

[18] Deden Makbulloh, *Manajemen Mutu Pendidikan Islam (Model Pengembangan Teori Dan Aplikasi Sistem Penjaminan Mutu)*, 157-158.

terdapat prose dai tidak berpngetahuan menjadi pengetahuan. Istilah *Al-Muta'allim* bersifat universal, mencakup semua orang yang menuntut ilmu pada semua tingkatan. Peserta didik di sebut *al-Muta'allim*. Dalam Ilmu pendidikan Islam hakikat ilmu berasal dari Allah SWT. Belajar dapat dilakukan oleh diri sendiri atau melalui orang lain. Oleh arena itu ilmu bersumber dari Allah sehingga didapati konsekuensinya adalah seorang peserta didik perlu mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia yang disukai Allah dan sejauh mungkin meninggalkan perbuatan yang tidak disukai Allah.

Ilmu itu hakikatnya cahaya dari Allah SWT dan hal itu hanya diberikan kepada hambanya yang taat kepadanya. Peserta didik merupakan unsur manusiawi yang sedang bersungguh-sungguh mencari Ilmu pengetahuan dan berusaha keras untuk mendapatkannya. Kedudukan peserta didik dalam ajaran Islam ditempatkan pada kedudukan yang terhormat dan dihormati. Oleh karenanya peserta didik dalam pendidikan Islam merupakan generasi awam dengan segala karakternya dan perubahannya yang cepat. Dalam pendidikan Islam, kemuliaan peserta didik itu karena kemuliaan ilmu itu sendiri, baru kemuliaan pemilik ilmu itu sendiri. Peserta didik harus dipicu untuk sedemikian rupa mengenali dirinya dan dunianya, terutama dalam menuntut ilmu yang merupakan proses kearah yang dituju. Oleh karenanya setiap peserta didik memahami ilmu dan memperoleh ilmu dengan adab-adabnya. Peserta didik dalam lembaga formal (Sekolah/madrasah, pesantren atau sekolah) dapat diartkan sebagai siswa, oleh karenanya perlu diketahui manajemen kesiswaan terkait pengelolaan dan pngeluaran hasil siswa itu sendiri.

Berbicara mengenai Manajemen kesiswaan, perlu kita ketahui definisi dari Manajemen Kesiswaan itu sendiri. Manajemen Kesiswaan adalah pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik mulai dari awal masuk (bahkan,

sebelum masuk) hingga akhir (tamat) dari lembaga pendidikan[4]. Dalam konteks pendidikan Islam, Manajemen kesiswaan memiliki makna relatif yang sama dengan manajemen kemahasiswaan dan manajemen kesantrian. Istilah yang terakhir khusunya berlaku dikalangan pesantren, dan berbeda dengan pengertian santri secara umum, yakni orang yang menjalankan ibadah wajib terutama shalat.

Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib, teratur serta mampu mencapai tujuan sekolah. Manajemen kesiswaan tidak hanya terbatas pada pengaturan siswa ketika mengikuti proses pembelajaran di sekolah, tetapi juga ketika mereka akan keluar untuk studi pendidikan kejenjang yang lebih tinggi ataupun jika mereka memilih masuk dunia kerja.

Oleh karena itu manajemen kesiswaan pendidikan Islam bisa dilihat dari segi tahapan dalam masa studi di sekolah atau sekolah/madrasah dapat dibagi menjadi tiga tahap yaitu:

1. Penerimaan siswa baru
2. Proses pembelajaran, dan
3. Persiapan studi lanjut atau bekerja

Ketiga tahapan tersebut disebut tahap penjaringan, pemrosesan, dan pendistribusian. Menurut hemat penulis ke semuanya merupakan kesatuan proses dan harus dikelola secara maksimal di mana penulis mengatakan sebagai proses *input, transformasi,* dan *output serta outcome.*berikut adalah uraian terkait mengenai pembahasan berikut:

1) Tahap Penerimaan Siswa Baru

Pada tahap penerimaan siswa baru, ada beberapa langkah yang perlu ditempuh yaitu sebagai berikut:

a. Promosi atau publikasi yang dilakukan sepanjang tahun, terutama pada momen-momen penting.

b. Mengalokasikan dana yang memadai untuk publikasi tersebut.

c. Memiliki media promosi pribadi, seperti radio, untuk lebih memaksimalkan publikasi.

d. Membentuk group khusus sesuai dengan kecenderungan masyarakat sekitar. Misalnya, jika masyarakat sekitar mereka gemar sepak bola, sekolah atau sekolah/madrasah sebaiknya membentuk klub sepakbola yang cukup kuat.

e. Melakukan pembinaan terhadap sekolah atau sekolah/ madrasah di level yang lebih rendah yang kelak diharapkan menjadi basis calon siswa.

f. Menjalin hubungan baik dengan pemimpin-pemimpin lembaga pendidikan di level yang lebih rendah.

g. Menjalin hubungan baik dengan tokoh-tokoh kunci (*key person*).

h. Bagi lembaga pendidikan yang cukup maju, seharusnya mau mencari beberapa siswa yang sangat pandai dengan memberikan pembebasan semua iuran belajar, bahkan mereka diberikan beberap fasilitas tambahan seperti buku, seragam dan pelajaran tambahan privat. Mereka inilah yang diproyeksikan mampu meraih prestasi terbaik dalam ujian Akhir Negara (UAN), lomba cerdas cermat, atau olimpiade.

i. Sebaiknya lembaga pendidikan Islam menerima siswa atau mahasiswa atau santri dari semua lapisan intelektual, sosial, dan budaya meskipun masing-masing lapisan itu.

Manajer lembaga pendidikan Islam tidak perlu mengikuti manajer lembagas pendidikan lain yang cenderung menekankan *input* yaitu dengan hanya menerima siswa atau mahasiswa yang berkualitas baik. Seorang manajer lembaga pendidikan harus

mengedapankan proses untuk mewujudkan hasil yang maksimal. Oleh karenanya para siswa yang diterima dilapisan intelektual dapat diberdayakan secara maksimal untuk mencapai hasil yang maksimal pada ranah kognitif, afektif, psikomotorik, bahkan metakognitif.

Berkaitan dengan tahap penerimaan siswa baru, ada beberapa pendekatan yang perlu ditempuh: pendekatan formal, sosial, kultural, rasional-profesional, dan ideologis. Pendekatan formal ditempu dengan cara menyebarkan brosur, memasang spanduk dan baliho, serta siaran radio, televisi, dan media masa. *Pendekatan sosial* ditempuh dengan kepedulian sosial seperti pemberian santunan pada anak yatim piatu pada saat peringatan hari besar Islam. *Pendekatan kultural* ditempuh dengan menyesuaikan kultur masyarakat sekitar, seperti membentuk grup sepakbola yang kuat bagi lembaga pendidikan Islam yang berada ditengah-tengah masyarakat pecandu sepakbola. *Pendekatan rasional-profesional* ditempuh dengan menunjukkan kelebihan-kelebihan lembaga pendidikan Islam yang sedang dikelola. *Pendekatan ideologis* ditempuh dengan menggunakan "bahasa agama" untuk menetukan lembaga pendidikan yang dipilih bagi umat Islam.

2) Proses pembelajaran

Ketika para siswa atau mahasiswa atau santri telah resmi diterima di lembaga pendidikan Islam, ada beberapa langkah lanjutan yang perlu ditempuh, yaitu : (1) pengelompokkansiswa atau mahasiswa atau santri secara homogon atau heterogen; (2) penentuan program belajar; (3) penentuan strategi pembelajaran; (4) pembinaan disiplin dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran; (5) pembinaan kegiatan ekstrakurikuler; dan (6) penentuan kenaikan kelas dan/atau nilai prestasi belajar.

Sehubungan dengan langkah itu, ada empat prinsip dasar dalam manajemen kesiswaan, yaitu sebagai berikut:

a) Siswa harus diperlakukan sebagai subjek dan bukan sebagai objek.

b) Kenyataan bhawa kondisi siswa sangat beragam baik dari segi fisik, intelektual, sosial, ekonomi, minat, dan sebagainya.

c) Siswa hanya termotivasi belajar jika mereka menyukai apa yang diajarkan.

d) Pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif dan psikomotorik, bahkan metakognitif.

Oleh karena itu, siswa hendaknya diberikan peran yang lebih aktif lagi dalam berbagai kegiatan sekolah. Mereka bukan saja sebagai peserta, tetapi juga penggagas pelaksanaan suatu kegiatan. Artinya, siswa pun diharapkan berperan aktif, berinisiatif, dan bereaksi dalam proses pembelajaran di sekolah.

Di samping itu, guru dan siswa harus menyadari bahwa potensi siswa jangan hanya dipandang dari sudut afektif dan psikomotoriknya. Cukup lazim siswa yang aspek kognitifnya menonjol, aspek psikomotoriknya lemah. Sebaliknya, jika aspek psikomotoriknya kuat, maka aspek kognitifnya lemah. Di samping teradapat pengelolaan yang terkait dengan teknik pembelajaran siswa tersebut, pimpinan lembaga pendidikan Islam juga harus mengelola hal-hal yang terkait erat dengan proses yaitu kedisiplinan. Dalam proses pembelajaran maupun ada aturan-aturan yang mengikat siswa untuk tunduk pada displin. Manakala siswa melakukan pelanggaran harus dikenakan hukuman, meskipun hukuman yang bersifat pedagogis.

3) Persiapan studi lanjut atau bekerja

Pada tahapan ini masih banyak lembaga pendidikan yang tidak memperhatikan nasib siswa atau mahasiswa. Berdasarkan penelusuran bakat dan minat, seharusnya pihak lembaga pendidikan melalui guru Bimbingan dan Penyuluhan (BP)

mengambil langkah-langkah startegis untuk mengelola mereka. Guru BP harus mengarahkan mereka untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan mereka, baik kemampuan intelektual maupun ekonomi. adapun bagi sekolah kejuruan dan perguruan tinggi, sebaiknya ada upaya riil untuk menyalurkan, setidaknya sebagian, siswa/mahasiswa untuk memasuki dunia kerja terutama bagi mereka yang berperestasi. Maka, lembaga pendidikan Islam perlu membangun jaringan kerja sama dengan paera pengusaha maupun instansi terkait.

Pengarahan bakat, minat, serta kemampuan siswa dan penyaluran para alumni untuk memasuki lapangan kerja merupakan bentuk kepedulian lembaga pendidikan Islam terhadap siswa/mahasiswa maupun alumninya. Bila kepedulian ini benar-benar dapat diwujudkan dengan baik dan mereka dapat merasakan kemudahan, terutama dalam mendapatkan lapangan kerja, tentu dapat meningkatkan posisi tawar lembaga pendidikan Islam tersebut di masyarakat secara luas. Sekarang ini, rumus yang dipegang siswa/mahasiswa sangat pragmatis. Siapapun yang menjadi manajer dan apapun nama lebaga pendidikannya, selama pihak lembaga dapat mempromosikan para alumninya, maka lembaga tersebut akan mereka serbu. Orientasi siswa/mahasiswa baru dalam bersekolah atau kuliah adalah mendapatkan lapangan kerja yang mapan, bukan semata-mata mencari ilmu.

Kecenderungan pragmatis dari para siswa atau mahasiswa sekarang inilah yang perlu dibaca, dipahami, dan direspons melalui pelaksanaan strategi pengembangan siswa, sehingga para calon siswa tertarik memasuki lembaga pendidikan Islam. Sebaiknya harus dikondisikan agar siswa di lembaga pendidikan Islam merasakan berbagai kelebihan, antara lain: unggul dalam kepribadian, unggul dalam intelektual, unggul dalam kepedulian, dan keunggulan dalam mengakses lapangan kerja. Selanjutnya

keunggulan-keunggulan tersebut secara tekhnis harus dirancang melalui program-program kegiatan yang riil dan jelas serta harus dapat buktikan.

G.Asas-Asas Kurikulum Pendidikan Islam

Suatu kurikulum pendidikan, termasuk pendidikan Islam, hendaknya mengandung beberapa komponen utama seperti tujuan, isi mata pelajaran, metode mengajar, dan metode penilaian. Kesemuaannya harus tersusun dan mengacu pada suatu sumber kekuatan yang menjadi landasan dalam pembentukannya. Sumber-sumber tersebut dikatakan sebagai asas-asas pembentukan kurikulum pendidikan. Asas-asas umum yang menjadi landasan pembentukan kurikulum dalam pendidikan Islam adalah:

1. Asas Agama

Seluruh sistem yang ada dalam masyarakat Islam, termasuk sistem pendidikannya harus meletakan dasar falsafah, tujuan, dan kurikulumnya pada ajaran Islam yang meliputi aqidah, ibadah dan muamalah. Hal ini bermakna bahwa itu semua pada akhirnya harus mengacu pada dua sumber utama syariat Islam, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Sementara sumber lainnya sering dikategorikan sebagai metode seperti ijma, qiyas dan istihsan. Pembentukan kurikulum pendidikan Islam harus diletakan pada apa yang telah digariskan oleh dua sumber tersebut dalam rangka menciptakan mausia yang bertaqwa sebagai 'abd dan khalifah dimuka bumi.

2. Asas Filosofis

Sekolah bertujuan mendidik anak agar menjadi manusia yang "baik". Faktor "baik" tidak hanya ditentukan oleh nilai-nilai, cita-cita, atau filsafat yang dianut sebuah negara, tetapi juga oleh guru, orang tua, masyarakat, bahkan dunia. Kurikulum mempunyai hubungan yang erat dengan filsafat suatu bangsa, terutama dalam menentukan manusia yang dicita-citakan

sebagai tujuan yang harus dicapai melalui pendidikan formal. Kurikulum yang dikembangkan harus mampu menjamin terwujudnya tujuan pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.[19]

Secara umum, dasar falsafah ini membawa konsekwensi bahwa rumusan kurikulum pendidikan Islam harus beranjak dari konsep ontologi, epistemologi dan aksiologi yang digali dari pemikiran manusia muslim, yang sepenuhnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai asasi ajaran Islam.

Filsafat sangat diperlukan dalam dunia pendidikan. Menurut Nasution filsafat besar manfaatnya bagi kurikulum, yakni:[20]

a. Filsafat pendidikan menentukan arah ke mana anak-anak harus dibimbing. Sekolah ialah suatu lembaga yang didirikan oleh masyarakat untuk mendidik anak menjadi manusia dan warga negara yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Jadi, filsafat menentukan tujuan pendidikan.

b. Dengan adanya tujuan pendidikan ada gambaran yang jelas tentang hasil pendidikan yang harus dicapai, manusia yang bagaimana yang harus dibentuk.

c. Filsafat juga menentukan cara dan proses yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan itu.

d. Filsafat memberikan kebulatan kepada usaha pendidikan, sehingga tidak lepas-lepas. Dengan demikian terdapat kontinuitas dalam perkembangan anak.

e. Tujuan pendidikan memberikan petunjuk apa yang harus dinilai dan hingga mana tujuan itu telah tercapai.

---

[19] Tonipurwakarta, "azas-azas-kurikulum", dalam http://tonipurwakarta.blogspot.com

[20] Nasution, S . *Asas-asas Kurikulum*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2008), 28

f. Tujuan pendidikan memberi motivasi dalam proses belajar-mengajar, bila jelas diketahui apa yang ingin dicapai.

3. Asas Psikologis

a. Ilmu Jiwa Belajar (Psikologi Belajar)

Pendidikan disekolah diberikan dengan kepercayaan dan keyakinan bahwa anak-anak dapat di didik. Anak-anak dapat belajar, dapat menguasai sejumlah pengetahuan, dapat mengubah sikapnya, dapat menerima norma-norma, dapat mempelajari macam-macam keterampilan. Kurikulum dapat di susun dan disajikan dengan jalan yang seefektif-efektifnya agar proses keberlangsungan belajar berjalan dengan baik.[21] Teori belajar dijadikan dasar bagi proses belajar mengajar. Dengan demikian, ada hubungan yang erat antara kurikulum dan psikologi belajar juga psikologi anak. Karena hubungan yang sangat erat itu maka psikologi menjadi salah satu dasar kurikulum.[22]

b. Ilmu jiwa anak

Sekolah didirikan untuk anak, untuk kepentingan anak, yakni menciptakan situasi-situasi di mana anak dapat belajar untuk mengembangkan bakatnya. Selama berabad-abad, anak tidak dipandang sebagai manusia yang lain daripada orang dewasa. Hal ini tampak dari kurikulum yang mengutamakan bahan, sedangkan anak "dipaksa" menyesuaikan diri dengan bahan tersebut dengan segala kesulitannya. Padahal anak mempunyai kebutuhan sendiri sesuai dengan perkembangannya. Pada permulaan abad ke-20, anak kian mendapat perhatian menjadi salah satu asas dalam pengembangan kurikulum. Kemudian muncullah aliran progresif, yakni kurikulum yang semata-mata didasarkan atas minat dan perkembangan anak

---

[21] Zein, *Asas,* 22.

[22] Nasution, *Kurikulum,*13

(*child centered curiculum*). Kurikulum ini dapat diapandang sebagai reaksi terhadap kurikulum yang diperlukan orang dewasa tanpa menghiraukan kebutuhan anak. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dlam pengembangan kurikulum adalah:

1) Anak bukan miniatur orang dewasa.

2) Fungsi sekolah di antaranya mengembangkan pribadi anak seutuhnya.

3) Faktor anak harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum.

4) Anak harus menjadi pusat pendidikan/sebagai subjek belajar dan bukan objek belajar.

5) Tiap anak unik, mempunyai ciri-ciri tersendiri, lain dari yang lain. Kurikulum hendaknya mempertimbangkan keunikan anak agar ia sedapat mungkin berkembang sesuai dengan bakatnya.

6) Walaupun tiap anak berbeda dari yang lain, banyak pula persamaan di antara mereka. Maka sebagian dari kurikulum dapat sama bagi semua.

4. Asas Sosiologis

Asas ini berkaitan dengan penyampaian kebudayaan, Proses sosialisasi individu dan rekontruksi masyarakat. Dalam membina kurikulum, kita sering kali menemui kesulitan tentang bentuk-bentuk kebudayaan mana yang patut disampaikan serta kearah mana proses sosialisai tersebut ingin dikontruksi sesuai dengan tuntutan masyrakat. Masyarakat mempunyai norma-norma, ada kebiasaan yang mau tidak mau harus dikenal dan diwujudkan anak-anak dalam kelakuannya. Disini juga harus dijaga keseimbangan antara kepentingan anak sebagai individu dengan kepentingan anak sebagai anggota masyarakat, dan ini dapat dicapai apabila dicegah kurikulum yang semata mata bersifat *suciety-centered*. Landasan sosial budaya ternyata bukan hanya

semata-mata digunakan dalam mengembangkan kurikulum pada tingkat nasional, melainkan juga bagi guru dalam pembinaan kurikulum tingkat sekolah atau bahkan tingkat pengajaran.[23]

5. Asas Organisatoris

Asas ini mengenai bentuk penyajian bahan pelajaran, yakni organisasi kurikulum. Ilmu jiwa asosiasi yang menganggap bahwa keseluruhan jumlah sebagian kurikulum merupakan mata pelajaran yang terpisah-pisah, yang mempunyai keuntungan dan juga kelemahan. Menurut Gestalt, prinsip keseluruhan mempengaruhi organisasi kurikulum yang telah di susun secara unit, tidak diadakan batasan antar mata pelajaran.[24]

Dilihat dari organisasinya, ada tiga kemungkinan tipe bentuk kurikulum:[25]

a. Kurikulum yang berisi sejumlah mata pelajaran yang terpisah-pisah, (*separatet subjec curriculum*).

b. Kurikulum yang berisi sejumlah mata pelajaran yang sejenis dihubung-hubungkan (*correlated curiculum*).

c. Kurikulum yang terdiri dari peleburan semua/hampir semua maka pelajaran (*integrated curriculum*).

Pada *seperated subjeck curriculum*, bahan dikelompokkan pada mata pelajaran yang sempit, sehingga banyak jenismata pelajaran dan menjadi sempit ruang lingkupnya. Sedangkan *correlated curriculum* mata pelajaran itu di hubungkan antara satu dengan yang lainya, sehingga tidak berdiri sendiri-sendiri pada *separated subject curriculum* dan ini dibuat sebagai reaksi

---

[23] Ancharyu," asas-pengembangan-kurikulum" dalam http:// ancharyu.wordpress.com

[24] Zein. *Asas,* 23- 24

[25] Ancharyu, *Asas*

terhadap kurikulum yang di anggap kurang sempurna. Pada *integrated curriculum,* kurikulum dipadukan secara menyeluruh dan dalam kesatuan, dan diharapkan dapat membentuk manusia yang utuh.

6. Asas Sosial

Pembentukan kurikulum pendidikan Islam harus mengacu ke arah realisasi individu dalam masyarakat. Pola yang demikian ini berarti bahwa semua kecenderungan dan perubahan yang telah dan bakal terjadi dalam perkembangan masyarakat manusia sebagai mahluk sosial harus mendapat tempat dalam kurikulum pendidikan Islam. Hal ini dimaksudkan agar *out-put* yang dihasilkan menjadi manusia yang mampu mengambil peran dalam masyarakat dan kebudayaan dalam konteks kehidupan zamannya.[26]

Keenam asas tersebut di atas harus dijadikan landasan dalam pembentukan kurikulum pendidikan Islam. Perlu ditekankan bahwa antara satu asas dengan asas lainnya tidaklah berdiri sendiri-sendiri, tetapi harus merupakan suatu kesatuan yang utuh sehingga dapat membentuk kurikulum pendidikan Islam yang terpadu, yaitu kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pengembangan anak didik dalam unsur ketauhidan, keagamaan, pengembangan potensinya sebagai khalifah, pengembangan kepribadiannya sebagai individu dan pengembangannya dalam kehidupan sosial

H. Ciri-Ciri Kurikulum Pendidikan Islam

Omar Muhammad al-Toumy al-Syaibany menyebutkan lima ciri kurikulum Pendidikan Islam. Kelima ciri tersebut secara ringkas dapat disebutkan sebagai berikut:

---

[26] Afifatin, "tinjauan-filsafat-pendidikan-islam" dalam http://afifatin.blogspot.com

1. Menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan-tujuannya dan kandungan-kandungan, metode-metode, alat-alat dan tekniknya bercorak agama.

2. Cakupannya luas dan menyeluruh kandungannya, yaitu kurikulum yang benar-benar mencerminkan semangat, pemikiran dan ajaran yang menyeluruh. Di samping itu ia juga luas dalam perhatiannya. Ia memperhatikan pengembangan dan bimbingan terhadap segala aspek pribadi pelajar dari segi intelektual, psikologis, sosial, dan spiritual.

3. Bersikap seimbang di antara berbagai ilmu yang dikandung dalam kurikulum yang akan digunakan. Selain itu juga seimbang antara pengetahuan yang berguna bagi pengembangan individual dan pengembangan sosial.

4. Bersikap menyeluruh dalam menata seluruh mata pelajaran yang diperlukan oleh anak didik.

5. Kurikulum yang disusun selalu disesuaikan dengan minat dan bakat anak didik.[27]

I. Prinsip Kurikulum Pendidikan Islam

Secara prinsipil kurikulum pendidikan Islam tak terlepas dari keterkaitannya dengan dasar-dasar dan tujuan falsafat pendidikan Islam itu sendiri. Beberapa bagian materi kurikulum dapat saja dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman dan lingkungan manusia, tetapi keterikatan hubungannya dengan hakikat kejadian manusia sebagai khalifah dan pengabdi Allah yang setia, tidak dapat dilepaskan sama sekali. Secara garis besarnya dalam kurikulum pendidikan Islam harus terlihat adanya unsur-unsur; (1) Ketauhidan; (2) Keagamaan; (3)

---

[27] Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 127

Pengembangan potensi manusia sebagai khalifah Allah; (4) Pengembangan hubungan antar manusia; dan (5) Pengembangan diri sebagai individu[28].

Kurikulum Pendidikan Islam memiliki beberapa prinsip yang harus ditegaskan. Al-Syaibany dalam hal ini menyebutkan tujuh prinsip kurikulum pendidikan Islam, yaitu:

Pertama, prinsip pertautan yang sempurna dengan agama, termasuk ajarannya dan nilai-nilainya. Setiap bagian yang terdapat dalam kurikulum, mulai dari tujuan, kandungan, metode mengajar, cara-cara perlakuan dan sebagainya harus berdasar pada agama dan akhlak Islam.Yakni harus terisi dengan jiwa agama Islam, keutamaan, cita-cita, dan kemauannya yang baik sesuai dengan ajaran Islam.

Kedua, prinsip menyeluruh (universal) pada tujuan-tujuan dan kandungan-kandungan kurikulum, yakni mencakup tujuan membina akidah, akal, dan jasmaninya, dan hal lain yang bermanfaat bagi masyarakat dalam perkembangan spiritual, kebudayaan, sosial, ekonomi, politik termasuk ilmu-ilmu agama, bahasa, kemanusiaan, fisik, praktis, profesional, seni rupa, dan sebagainya.

Ketiga, prinsip keseimbangan yang relatif antara tujuan-tujuan dan kandungan kurikulum.

Keempat, prinsip perkaitan antara bakat, minat, kemampuan-kemampuan, dan kebutuhan belajar.Begitu juga dengan alam sekitar baik yang bersifat fisik maupun sosial di mana pelajar itu hidup dan berinteraksi.

---

[28] Jalaluddin & Usman Said, *Filsafat Pendidikan Islam: Konsep dan Perkembangan Pemikirannya,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 51-52

Kelima, prinsip pemeliharaan perbedaan-perbedaan individual di antara para pelajar, baik dari segi minat maupun bakatnya.

Keenam, prinsip menerima perkembangan dan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat.

Ketujuh, prinsip keterkaitan antara berbagai mata pelajaran dengan pengalaman-pengalaman dan aktivitas yang terkandung dalam kurikulum.[29] []

[29] Abuddin Nata, *Filsafat,* 128.

DAFTAR PUSTAKA

A Halim, *Manajemen Pesantren*, Yogyakarta: LKiS, 2005.

A. Malik Fajar 1999, *Sintesa Antara Perguruan Tinggi dan Pesantren*: Upaya Menghadirkan wacana pendidikan Alternatif.

_____, 1995, *Pengembangan Pendidikan Islam*, dalam Nafis (Ed), *Konstekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof Dr. Munawir Sjadzali, MA,* IPHI dan Paramadina, Jakarta.

Abd. Al Rohman Al Nahkawi,.1992, *Ushul al tarbiyah al Islamiyah wa Asalibuha* Damaskus, Dar al Fikr.

Abd. Rachman Shaleh, 1978, *Pedoman Pembinaan Pondok Pesantren,* Pendidikan dan BKPP Depag.

Abdurrahman Mas'ud, 2004, *Intelektual Pesantren,* LKiS, Yogyakarta.

Abdurrahman Wahid, 1999, dalam Prolog Buku *Pondok Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, Pustaka Hidayah, Bandung.

_____, 2001, *Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pesantren,* LKiS Yogyakarta.

Abudin Nata, 1997, *Filsafat Pendidikan Islam 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

_____, 2003, *Manajemen Pendidikan* (*Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*) Jakarta: Prenada Media.

Afifatin, "tinjauan-filsafat-pendidikan-islam" dalam http://afifatin.blogspot.com

Agar Santri Tidak Gaptek. http://santri-indigo.org/?p=7, diakses pada 11 *Maret* 2008.

Ahmad Ludjito, 1996, *Pendekatatan integratik Pendidikan agama pada sekolah di Indonesia*, dalam H.M. Chabib Thoha dkk(ed) *Reformulasi Filsafat Pendidikan Islam,* Pustaka Pelajar, Semarang.

Ahmad Qodi Azizy, 2004, *Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Ahmad Tafsir, 1992, *Ilmu Pendidikan dan Perspektif Islam,* Remaja Rosda Karya Bandung.

_____, 2005, *Ilmu Pendidikan dalam Persepektif Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Al Roghib Al Isfahani,. 1992, M*ufrodat alfadz al Qur'an*, Dar al Qalam, Damaskus.

Ali Maschan Moesa, 2007, *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama,* LKiS, Jogjakarta.

Amer al-Roubaie dalam Adian Husaini, 2005, *Wajah Peradaban Barat: dari Hegemmoni Kristen ke Dominasi Sekular*-Liberal, Gema Innsani Press. Jakarta

_____, *Globalisasi dan Posisi Peradaban Islam,* dalam jurnal Islamiyah Tahun I No. 4/Januari-Maret 2005 (*Jakarta*: *Institute for Study of Islamic Thought and Civilization [INSIST]* dan Khoirul Bayan.

Anoraga, Pandji, 1991, *Psikologi Kepemimpinan*, Renika Cipta, Yogyakarta.

Anwar Dessy, 2001, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Aditama.

Ari Ginanjar Agustian, 2001, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam*, Arga, Jakarta.

Assalaam, *Blog Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pesantren,* http://*www* pondokassalaam.blogspot.com/diakses pada 11 Maret 2008.

Azyumardi Azra, 1997, *Kuantitas dan Perubahan* Pengantar Buku Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Pemikiran Islam di Indonesia*, Paramadina, Jakarta.

_____, 1998, *Esei-esei Intelektual Muslim & Pendidikan Islam*, cet. I Logos, Jakarta.

_____, 2000, *Sosialisasi Politik dan Pendidikan Islam,* dalam Ismail SM dan Abdul Mukti (ed) *Pendidikan Islam*, *Demokratisasi dan Msyarakat Madani*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

_____, 2002, *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih,* Mizan Bandung.

Chabib Thoha, 1996, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Grafindo, Jakarta.

_____, 2001, *Mencari Format Pesantren Salaf*, dalam *Majalah Bulanan Rindang* No. 9 Th.XXVI.

Clillifort Geertz, 1983, *Abangan, Santri dan Priyayi dalam* Masyarakat *Jawa*, Pustaka Jaya, Jakarta.

Dahlan M Albarri, 1994, Pius A Partanto. *Kamus Ilmiyah Populer.* Surabaya: Arkola.

Daulay, Haidar Putra, 2001, *Hostorisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah Dan Madrasah*, Tiara Wacana, Yogyakarta.

Dawam Rahardjo, 1985, *Perkembangan Masyarakat dalam Perspektif Pesantren*, Pengantar dalam M. Dawam Raharjo (ed), *Pergaulan Dunia Pesantren: Membangun dri Bawah,P3m,* Jakarta.

_____, 1996, *Intelektual Inteligensia dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim,* Mizan, Bandung.

Deden Makbulloh, *Manajemen Mutu Pendidikan Islam (Model Pengembangan Teori dan Aplikasi Sistem Penjaminan Mutu)*

Departemen Agama RI, 1993, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Intermassa, Jakarta.

_____, 2006, *Akuntabilitas Dan Good Governance*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Biro Organisasi Dan Tatalaksana,

Dhofier, Zamakhsyari. 1982, *Tradisi Pesantren : Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, Cet I, LP3ES, Jakarta.

Djamaluddin dan Abdullah Aly, 1999, *Kapita Slekta Pendidikan Islam*, CV. Pustaka Setia Bandung.

Dwi Priyanto, 2006, *Inovasi Kurikulum Pesantren: (*Memproyeksikan Model Pendidikan Alternatif Masa Depan dalam *Mabda'* Jurnal Studi Islam dan Budaya, (Purwokerto: Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokwerto.

Endang Turmudi, 2003, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan,* LKiS, Yogyakarta.

Ety Rochaety, dkk, 2006, *Sistem informasi Manajemen Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara.

Faisal Ismail, 1984, *Percikan Pemikiran Islam*, Bina Usaha, Yogyakarta.

George R Terry, 2001, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Bumi Aksara Jakarta.

H.A. Tilaar, 1997, *Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Era Globalisasi*, Grasindo, Jakarta.

Habib Hirzin, 1988, *Agama Dan Ilmu Pesantren dalam Dawam Raharjo Pesantren Dan Pembaharuan,* LP3ES, Jakarta.

Hanun Asrohah, 1999, *Sejarah Pendidikan Islam*, Logos, Jakarta.

Hanun Asrohah,1999, *Sejarah Pendidikan Islam*, Cet. I, Logos, Jakarta.

Hasan Basri, *Pesantren: Karakteristik dan Unsur-unsur kelembagaan,* dalam Buku *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2001), hal.101.

Hasan Habib, *Peta Politik Internasional dan Pengaruhnya terhadap* Konstalasi *Perpolitikan Indonesia,* paper disampaikan pada Munas Alim Ulama DPP PKB, 28 Mei 2003.

Hasbullah, 1996, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, J: Raja Grafindo, Jakarta.

_____, 1999, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, Raja Grafindo Persada, Jakatra.

Hendyat Soetopo, *Manajemen Pendidikan,* Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang.

Husaini Usman, 2006, *Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Imam Zarkasyi, 1965, *Pembangunan Pondok Pesantren dan Usaha Untuk Melanjutkan Hidupnya*" dalam Al jami'ah No. 5-6 Th. Ke-4 Sept–Nop. 1965 IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Imron Arifin, 1993, *Kepemimpinan Kiai Studi Kasus Pondok Pesantren Tebu Ireng,* Jombang, Kalimasahadah.

Irwan Abdullah, dkk. 2008, *Agama, Pendidikan Islam dan Tanggung Jawab Sosial Pesantren,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ismail, 2002, *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.

Jalaluddin & Usman Said, 1999, *Filsafat Pendidikan Islam: Konsep dan Perkembangan Pemikirannya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jam'iah Al-Islah Al-Ijtima'i, 2002, *Globalisasi dalam Timbangan Islam,* Penerbit Era Intermedia, Solo.

John M. Echols dan Hassan Shadly, 1986, *Kamus Inggris Indonesia* cetakan XIV Jakarta: PT Gramedia Jakarta.

Joko Widodo. 2001, *Good Governance: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*. Surabaya: Insan Cendikiawan.

Joseph. G. Jabbra dan O. P. Dwivedi. 1989, *Publik Service Accountability, A Comparative Perspective Connecticut*, Kumarian Press. Inc.

Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, 2002, *Islam Historis: Dinamika Studi Islam* di *Indonesia*, Galang Press, Yogyakarta.

_____, 2004, *Wajah Baru Islam Indonesia,* UII Press Yogyakarta.

Karel Steenbrink, 1984, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke–19*, Bulan Bintang. Jakarta.

Kartono Kartini, 1986, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, C.V. Rajawali Perss, Jakarta.

Keating. J. Charles, 1994, *Kepemimpinan Teori dan Pengembangannya*, Kanisius, Yogyakarta.

KH. Saefuddin Zuhri, 1979, *Sejarah Kebangkitan Islam dan perkembangannya di Indonesia*, Al Ma'arif, Bandung.

Ki Hajar Dewantoro, 1977, *Pendidikan*, bagian Pertama, cet 2, Majlis Luhur Persatuan Taman Siswa Yogyakarta.

LAN dan BPKP, 2000, *Modul I. Akuntabilitas dan Good Governance*.

Louis P. Pojman, 2003, *Global Political Philosophy,* New York, McGraw Hill.

M. Atho Mudzhar, 1999, *Masyarakat Indonesia Baru dalam Perspektif Global,* dalam jurnal Mukaddimah, No. 8 Tahun. V Kopertais, Yogyakarta.

M. Sulthon Mashhud dan Moh. Khusnurdilo, 2003, *Manajemen Pondok Pesantren*, Diva Pustaka, Jakarta.

Made Pidarta, 1998, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Aksara.

Made Pidarta. 2004, *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mahfudz Ridwan, 2005, *Mendorong Pesantren Sebagai Agen Pendamping Perubahan Di Masyarakat*, Digital Library Responsible Development International (RDI).

Mahmud Yunus,1991, *Sejarah pendidikan Islam di Indonesia, Mahmudiyah*, Jakarta.

Manfred Ziemek, 1986, *Pesantren Dalam Perubahan Sosial*, terj. Butche B. Soendjojo, cet . P3M, Jakarta.

Marwan Saridjo dkk, 1982, *Sejarah Pondok Persantren di Indonesia*, Dharma Bhakti, Jakarta.

Mastuhu, 1996, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang unsur dan nilai Sintem pendidikan Pesantren*, INIS, Jakarta.

Mochamad Sodik, 2000, *Gejolak Santri Kota: Aktivis Muda NU Merambah Jalan Lain*, Tiara Wacana, Yogyakarta.

Moejiono Hasibuan, 1986, *Proses Belajar Mengajar,* Remaja Rosda Karya, Bandung.

Muhaimin, 2007, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muhammad al Naquid al Attas, 1990, *Konsep Pendidikan Islam*, Mizan, Bandung.

Muhammad Zein, 1991, *Asas dan Pengembangan Kurikulum*, Yogyakarta: Sumbangsih Offset.

Mujamil Qomar, 2005, *Epistemologi Pendidikan Islam Dari Metode Rasional Hingga Metode Kritik,* Erlangga, Jakarta.

_____, *Manajemen Pendidikan Islam (Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam).*

Mulyasa, E, 2004, *Manajemen Berbasis Sekolah*, PT. Remaja Rosdakarya Bandung.

Mulyasa, E, 2008, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah,* Jakarta: Bumi Aksara.

Nanang Fattah, 1999, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: Remaja RosdaKarya.

_____, 2000. *Landasan Manajemen Pendidikan* Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Nasution, S. 2008, *Asas-asas Kurikulum*, Jakarta: Bumi Aksara. 2008.

Nawawi, Hadari Martiwi. 1993, *Kepemimpinan Yang Efektif*, (UGM Press,Yogyakarta.

Nurcholish Madjid, 1997, *Bili-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan,* Paramadina, Jakarta.

_____, 1998, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan,* Mizan, *Bandung*.

Oxford Advance Learner's Dictionary. 2005. Oxford: Oxford University Press.

Rosemarie S.N. *Akuntabilitas sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan* Bandung: Univ. Kristen Maranatha.

Sartono Karto Dirjo, 1977, *Sejarah Nasional*, Balai Pustaka, Jakarta.

Sekretariat Negara RI. *UURI No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem* Pendidikan *Nasional dan Penjelasannya,* Raneka Ilmu, Semarang.

Soebagio Armodiwirio, 2005, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Ardadizya Jaya.

Sondang P Siagaan, 1992, *Fungsi-Fungsi Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara.

Sulistyorini. *Manajemen Pendidikan Islam, Konsep, Strategi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Teras, 2009

Suryo Subroto, 1997, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, Jakarta: Rineka Cipta.

Tim Redaksi, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* PT. Balai *Pustaka*, Jakarta.

Wahyudi Kumorotomo. 1994, *Etika Administrasi Negara*. Ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Warsono, 2003, *Wacana Politik Kiai, Pada Era Pemerintahan Gus Dur, Apakah Sebagai Intelektual Organik atau Intelektual Tradisional,* (Disertasi tidak Diterbitkan, Universitas Air Langga, Surabaya.

Widodo, dkk. 2002, *Kamus Ilmiah Popular*. Yogyakarta: Absolut,

Yandianto, 1997, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* M2S, Bandung.

Zainal Arifin. 2012, *Pengembangan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan Islam*, Jogjakarta: DIVA Press.

Zuhairini, 1993, *Metodik Khusus Pendidikan Agama,* Usaha Nasional, Surabaya.

BIODATA PENULIS

Dr. H. M. Hadi Purnomo, M.Pd. Lahir di Banyuwangi, 1 Desember 1965. Lulus SD Negeri Kedunggebang I Banyuwangi (1979) dan melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) II Banyuwangi (1982), Melanjutkan ke SMA Negeri Genteng Banyuwangi lulus 1985. Pada tahun 1990 menyelesaikan Strata Satu (S1) di Universitas Jember (Unej), menempuh Program S2 di IKIP Jakarta lulus tahun 1994 dan mendapat gelar doktor (S3) di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, lulus 2005. Semasa kuliah sangat rajin dan menjadi narasumber di berbagai seminar, workshop. Pengalaman menjabat Kepala SMA Unggulan BPPT Darus Sholah Jember, Kepala Seksi Mapenda, Kantor Kementrerian Agama Kabupaten Jember dan aktif mengajar di IAIN Jember.

Penelitian yang dilakukan antara lain: *Hubungan Penggunaan Pendekatan Keterampilan Proses dengan Prestasi Belajar Siswa Bidang Studi Fisika Kelas 1 Sekolah Menengah Atas Negeri Genteng Banyuwangi Tahun Ajaran 1989-1990*; *Iklim Belajar dalam Kaitannya dengan Prestasi Belajar, 1994; Strategi Peningkatan Mutu Madrasah Tsanawiyah (Penelitian Kualitatif terhadap strategi Peningakatn Mutu*

MTs Negeri di Kabupaten Jember Jawa Timur) 2005; *Implementasi Manajemen Perpustakaan (Studi Kasus di Perpustakaan STAI Al Falah As Sunniyyah Kencong Jember (2016).*

Selain itu, penulis juga produktif menulis buku dan jurnal. Karya bukunya adalah: (1) *Kiyai dan Transformasi Sosial: Dinamika Kiyai dalam Masyarakat*, Edisi Revisi (ISBN 978-602-96063-1-7, Absolute Media Yogyakarta 2016); (2) *Pendidikan Islam: Integrasi Nilai-Nilai Humanis, Liberasi, dan Transendensi: Sebuah Gagasan Paradigma Baru Pendidikan,* Edisi Revisi, (ISBN 978-602-96063-2-4, Absolute Media Yogyakarta 2016). Adapun karya yang dimuat di jurnal adalah: (1) "Peningkatan Manajemen Perpustakaan dengan Sistem Otomasi (Upaya Pelayanan terhadap Pengguna Perpustakaan)", Jurnal *FALASIFA* Vol.7, No.1 Maret 2016/ISSN 2085-3815, E-ISSN: 2527-8711; (2) "Regulasi Kebijakan Pendidikan Agama Islam (Kajian Kritis terhadap Regulasi Kebijakan PAI dalam Peningkatan Mutu)", Jurnal *Edumika*, Vol.2, No.1 Juni 2016/ISSN 2442-3785; (3) "Manajemen Strategi Marketing Perguruan Tinggi," Jurnal *Edukasi,* Vol.2, No. 1 April 2016/ISSN 2085-5087; (4) "Strategi Manajerial Pemasaran (Studi atas Konsep Pemasaran dan Orientasi pada Masyarakat)", Jurnal *Edumika* ISSN 2442-3785 Vol..3 Nomor 1 September 2016.

BERBICARA tentang pesantren, biasanya orang lebih tertarik pada sejarahnya, kitab-kitab yang dijadikan bahan kajian, perannya di tengah masyarakat, santri dan alumni, dan sejenisnya. Hal yang belum banyak dibicarakan adalah tentang masa depan atau keberlanjutan pesantren itu sendiri, yang dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan soal manajemen pengelolaan pendidikan pesantren.

Buku yang ada di tangan saudara ini merupakan karya penelitian yang mengurai tentang bagaimana seharusnya mengelola pendidikan pesantren, yang di satu sisi diharapkan dapat bersaing dengan pendidikan umum non-pesantren dan di lain sisi dapat berkontribusi pada kebutuhan bangsa dan negara.

Penulis dalam buku ini secara panjang lebar mengurai manajemen pendidikan pesantren dalam segala dimensinya, yang tujuan utamanya adalah memajukan pendidikan pesantren yang profesional, modern, tanpa tercerabut dari akar tradisi kepesantrenan.

BILDUNG
Pustaka Utama

Perum Graha Banguntapan B-23
Jl. Raya Pleret KM 2
Banguntapan Bantul Yogyakarta, 55791
Telepon: 081 2274 75754
E-mail: bildungpustakautama@gmail.com
www.penerbitbildung.com

ISBN 978-602-50675-63